

STRATEGI KAMPANYE HAM

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

(Studi Kasus Kampanye Kontras dalam Kasus Munir)



Fauzan Ramadhan

4825111621

**Skripsi ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
(KONSENTRASI SOSIOLOGI PEMBANGUNAN)
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2015

ABSTRAK

Fauzan Ramadhan, Strategi Kampanye HAM *Civil Society Organizations*: Studi Kasus Kampanye KontraS dalam Kasus Munir, Skripsi. Jakarta, Konsentrasi Sosiologi Pembangunan, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2015.

Kasus Munir menjadi cerminan bagaimana bangsa ini memperlakukan hak asasi manusia. Upaya-upaya advokasi yang dilakukan tidak sesuai dengan proses hukum yang seharusnya. Data dan fakta dikesampingkan demi kepentingan politik. Oknum-oknum yang diduga terlibat, acap kali mengatasnamakan kepentingan negara demi menghindari pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penyebab-penyebab yang menghambat penuntasan kasus Munir. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi kampanye KontraS dalam mendukung advokasi kasus Munir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-naratif. Informan utama penelitian ini adalah Haris Azhar (Koordinator KontraS), selaku pengawas kegiatan kampanye, Alves Fonataba, Indah Nurmasari, dan Luh Putu Kusuma Ririen (Biro Kampanye dan Jaringan), selaku pelaksana kegiatan kampanye, dan Chrisbiantoro (Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi) yang tentunya tak dapat dipisahkan dari perencanaan dan perancangan kampanye KontraS. Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap informan dan observasi dokumen untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara horizontal yakni pada ranah publik strategi kampanye memiliki implikasi pada terciptanya gerakan-gerakan sosial yang mendukung pengusutan tuntas kasus Munir. Sedangkan secara vertikal yakni pada tataran hukum efek dari strategi kampanye belum signifikan mampu menstimulasi agar proses hukum yang mandek dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Strategi; Kampanye; *Civil Society Organizations*; Hak Asasi Manusia.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta

Dr. Muhammad Zid, M. Si
NIP. 19630412 199403 1 002

No	Nama	TTD	Tanggal
1	<u>Dr. Robertus Robet, MA</u> NIP. 19710516 200604 1 001 Ketua Sidang
2	<u>Dian Rinanta Sari, S.Sos</u> NIP. 19690306 199802 2 001 Sekretaris Sidang
3	<u>Abdi Rahmat, M.Si</u> NIP. 19730218 200604 1 001 Penguji Ahli
4	<u>Abdil Mughis Mudhoffir, M.Si</u> NIP. 19840403 201012 1 002 Dosen Pembimbing I
5	<u>Dewi Sartika, M.Si</u> NIP. 19731212 200501 2 001 Dosen Pembimbing II

Tanggal Lulus: 12 Januari 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Strategi Kampanye *Civil Society Organizations* (Studi Kasus: Kampanye KontraS dalam Kasus Munir). Skripsi ini dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Program Studi Sosiologi Pembangunan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Ibu saya Nani Heryani dan Bapak saya Dedy Suryadarma, serta Kakak saya Denny dan Naila, dan juga Adik saya Neeky.

Tak lupa pula ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, baik berupa waktu, materi, perhatian, saran, maupun kritik yang membangun. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si.
2. Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Robertus Robet, MA.
3. Sekertaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Ibu Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si
4. Pembimbing Akademik, Ibu Dian Rinanta, S.Sos
5. Bapak Abdil Mughis, M.Si. selaku dosen pembimbing saya, atas segala bantuan dan masukan dalam kelancaran skripsi ini.
6. Ibu Dewi Sartika, M.Si atas koreksi serta masukannya yang diberikan untuk melengkapi kekurangan skripsi ini.

7. Bang Haris, Bang Alves, Bang Masihuddin, Bang Chris, Mba Indah, Kak Ririen, dan orang-orang KontraS atas bimbingan dan gagasan pemikiran serta informasi yang diberikan, sehingga saya dapat mengumpulkan data untuk menulis skripsi.
8. Almarhum Munir, yang sangat menginspirasi saya dengan segala gagasan serta keberaniannya. Saya dedikasikan skripsi ini untuk mendiang Munir dan keluarga.
9. Seluruh lembaga swadaya masyarakat dan teman-teman media pers yang turut aktif menyuarakan maupun memberitakan kampanye untuk Munir.
10. Teman-teman seperjuangan: Paulo, Reza, Thohar, Marie, Marvin, Rangga, Eta, Tiara, Hanum, Intan, Novy, Dwi, Ami, Adit, Endi, Wahyudi dan semua teman di Sosiologi Pembangunan Reguler 2011. Dan juga untuk segenap keluarga besar Sosiologi UNJ.
11. Dan untuk Surya, Molan, Felix dan semua pendengar Morning Zone, yang aktif atau pun yang pasif. Terimakasih selalu menemani pagi hari saya. Berkat kalian skripsi ini kadang terbengkalai karena saya terlalu asik menertawakan kebodohan kita.

Saya menyadari bahwa karya berupa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan dan kritik yang membangun sangat saya harapkan dalam perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Tinjauan Pustaka	5
1.6. Kerangka Konseptual	9
1.6.1. <i>Civil Society Organizations</i>	9
1.6.2. Hak Asasi Manusia.....	14
1.6.3. Kampanye Advokasi HAM	20
1.7. Metodologi Penelitian	24
1.7.1. Peran Peneliti.....	25
1.7.2. Subjek Penelitian	26
1.7.3. Sifat Penelitian	26
1.7.5. Metode Pengumpulan Data	27
1.8. Sistematika Penulisan.....	28
 BAB II PROFIL KONTRAS SEBAGAI <i>CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS</i>	
2.1. Pengantar	30
2.2. Sejarah KontraS	31
2.3. KontraS sebagai Civil Society Organizations	33
2.3.1. Penanganan Kasus	37
2.3.2. Struktur Orgaisasi	41
2.4. Deskripsi Biro Kampanye dan Jaringan	42
2.5. Penutup	48

BAB III DESKRIPSI KASUS MUNIR

3.1. Pengantar	50
3.2. Deskripsi Kronik Kematian Munir	51
3.3. Advokasi Kasus	55
3.3.1. Pembentukan Tim Pencari Fakta	56
3.3.2. Menelusuri Keterlibatan PT Garuda dan BIN	58
3.3.3. Mandegnya Proses Hukum	62
3.4. Belenggu Kekuasaan Melanggengkan Impunitas	66
3.5. Penutup	74

BAB IV STRATEGI KAMPANYE ADVOKASI PENUNTASAN KASUS MUNIR

4.1. Pengantar	76
4.2. Kampanye Konvensional	78
4.2.1. Siaran Pers	78
4.2.2. Aksi Turun Ke Jalan	81
4.2.3. Lobi-lobi	84
4.3. Kampanye Populer	86
4.3.1. Diskusi Publik	87
4.3.2. Media Sosial dan Messenger	89
4.3.3. Karya Seni	90
4.4. Kampanye dalam Strategi Advokasi	93
4.5. Tinjauan Kampanye dalam Unsur-unsur Pokok Advokasi	97
4.6. Penutup	101

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	104
5.2. Saran dan Rekomendasi	106

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Tabel Jumlah CSO di Indonesia (periode tahun 2000)	12
1.2. Tabel Kampanye dan Propaganda	22
4.1. Tabel Siaran Pers Kasus Munir Periode 2005-2015.....	80
4.2. Tabel Lobi-lobi kasus Munir	85
4.3. Perbandingan capaian Strategi Kampanye kasus Munir	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Gambar Struktur Badan Pekerja KontraS.....	41
2.2. Gambar Rancangan Strategi Biro Kampanye dan Jaringan	43
2.3. Gambar Poster Dukung Pilkada Langsung.....	44
2.4. Gambar Poster Tolak UU Pilkada	45
2.5. Gambar Poster <i>Tools Campaign Grab Your Rights</i>	46
2.6. Gambar Poster <i>Tools Campaign Poster Human Rights Day 2014</i>	47
4.1. Gambar Foto Konferensi Pers KontraS	79
4.2. Gambar Aksi Kamisan ke-364	83
4.3. Gambar Dokumentasi Diskusi “Obrolan Anak Muda”	88
4.4. Gambar Launching Komik “Mereka Bunuh Munir”	91
4.5. Gambar Karya-karya Persembahan untuk Munir	92
4.6. Gambar Unsur-unsur Pokok Advokasi.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir hingga kini belum menemui titik terang. Munir Said Thalib meninggal pada 7 September 2004 di atas pesawat akibat racun arsenik yang sengaja dicampur dengan hidangan yang disajikan sebuah maskapai penerbangan ternama di Indonesia. Ada dugaan Munir dibunuh karena ia memegang data penting seputar pelanggaran HAM seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung, pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur, hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004.¹

Fakta terbaru dari kelanjutan kasus ini menghadirkan kesaksian dari mantan Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Intelenjen Negara (BIN), Budi Santoso mengkonfirmasi bahwa pernah ada rapat internal lembaganya membahas Munir yang disangkakan akan menjual negara dengan data-data yang dibawanya ke Belanda untuk studi hukum di Utrecht Universiteit. “Hendropriyono meminta upaya Munir itu dicegah,” kata Budi dalam kesaksiannya. Ia juga menyebutkan bahwa Pollycarpus melaporkan padanya setelah menghabisi Munir.² Fakta-fakta yang selama ini dibantah oleh BIN. Meskipun Tim Pencari Fakta (TPF) Munir telah

¹ Majalah *Tempo*, *Fakta Terbaru Pembunuhan Munir*, edisi Desember 2014.

² *Ibid.*,

mengemukakan beberapa indikasi yang mengarah pada keterlibatan intelejen negara, namun hanya Pollycarpus, sang aktor lapangan pembunuh Munir yang dijadikan terdakwa oleh pengadilan dengan mengabaikan fakta-fakta lainnya.³

Kasus kematian Munir menunjukkan bahwa perkara pelanggaran HAM di negeri ini adalah sesuatu yang sepertinya sulit untuk benar-benar tuntas, bahkan di era reformasi seperti saat ini. Meskipun dikemukakan bahwa aturan hukum Indonesia saat ini memberi perlindungan HAM jauh lebih kuat dibanding masa Orde Baru, namun dalam berbagai bidang tetap terjadi pelanggaran atau kurangnya perlindungan terhadap HAM.⁴ Untuk memahami fenomena tersebut setidaknya terdapat empat perspektif yaitu: perspektif legalistik, perspektif kulturalis, perspektif radikal populis, dan perspektif pluralis.

Perspektif legalistik melihat pelaksanaan dan penegakan HAM sering kali lemah karena faktor politik yang masih dominan dalam membentuk keluaran kebijakan HAM di Indonesia. Sedangkan dalam perspektif kulturalis setidaknya terdapat tiga prinsip budaya Indonesia yang selama ini menggerogoti perlindungan HAM yakni: 1) keyakinan akan hierarki sosial yang lama tertanam; 2) obsesi budaya dengan menjaga sekaligus mempertahankan keselarasan dan stabilitas; 3) penekanan pada pentingnya menjalankan kewajiban ketimbang hak.⁵ Sementara perspektif radikal populis menitikberatkan pelanggaran HAM di Indonesia pada isu-isu keadilan

³ KontraS, *Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2006* (Jakarta: KontraS, 2007).

⁴ Andrew Rosser, “Memahami Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia” dalam Wawasan dari Indonesia: *The Rise of Capital*, Richard Robinson (Prisma Vol. 32, No. 1. 2013), hlm. 37.

⁵ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order* (Jakarta: Gramedia dan SPES Foundation, 1993), hlm. 297.

sosial, yakni intervensi asing pada sektor ekonomi justru menimbulkan kesenjangan, serta asas liberalisme yang semakin memarginalisasi kaum miskin.⁶ Yang terakhir, perspektif pluralis mengkritisi pelanggaran HAM pada era reformasi terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan pada masyarakat Indonesia.

Keempat perspektif tersebut secara teoritis dapat menjelaskan dengan rinci kompleksitas pelanggaran HAM di Indonesia, akan tetapi secara konkrit kurang memberikan solusi atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada kasus Munir. Penelitian ini berusaha menyajikan sebuah alternatif yang berangkat dari perspektif advokasi *civil society*, dalam upaya memperjuangkan hak-hak sipil-politik. Penelitian ini merujuk pada strategi kampanye sebagai sarana advokasi — dalam hal ini terkait kasus pembunuhan Munir — yang dilakukan oleh KontraS sebagai *Civil Society Organizations* (CSO) yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia.

1.2 Perumusan Masalah

Strategi kampanye ini peneliti angkat sebagai objek penelitian untuk melihat potensi dari kampanye sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam advokasi oleh CSO. Padahal, dalam beberapa kasus strategi kampanye berhasil mengubah kebijakan pemerintah dan memiliki kekuatan dalam membangun persepsi publik. Contohnya pada kampanye menolak UU Pilkada tahun 2014 lalu yang menghasilkan Perppu dan

⁶ Andrew Rosser, *Op.cit.*, hlm. 42.

mengembalikan mandat hak memilih ke tangan rakyat.⁷ Berkaca pada pengalaman tersebut, strategi kampanye mempunyai peluang untuk diterapkan dalam upaya penuntasan kasus Munir.

Advokasi secara hukum merupakan ujung tombak dalam upaya penuntasan kasus Munir. Akan tetapi, intervensi dari kepentingan orang-orang tertentu membuat penegakkan hukum terhambat dan mengaburkan substansi dari keadilan itu sendiri. Sementara itu, strategi kampanye yang dilakukan dalam rangka mendukung advokasi hukum belum berjalan optimal.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi kampanye KontraS dalam advokasi kasus Munir?
2. Bagaimana tinjauan teori advokasi *civil society* dalam mengevaluasi strategi kampanye KontraS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bagaimana strategi kampanye KontraS dalam advokasi kasus Munir.
- b. Memaparkan tinjauan teori advokasi *civil society* dalam mengevaluasi strategi kampanye KontraS

⁷ Lihat detiknews.com edisi 20 Januari 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada kajian ilmu sosiologi politik, karena pembahasan pada penelitian ini mendeskripsikan bagaimana *civil society* memainkan peran pada ranah hukum sebagai representasi dari suatu masyarakat yang demokratis.

Sementara itu, manfaat praktis penelitian ini adalah dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi atau literatur baru dalam rangka merancang strategi kampanye yang proporsional, efektif, dan efisien baik untuk LSM KontraS sebagai subjek penelitian maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Memahami pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada era reformasi setidaknya dibutuhkan empat perspektif yang dapat dikaji untuk kemudian dikritisi. Keempat perspektif tersebut yaitu: *Pertama*, perspektif legalistik mengasumsikan, ketika perlindungan HAM memadai, pelaksanaan dan penegakannya sering kali lemah karena militer dan polisi (pelaku utama pelanggaran hak-hak sipil dan politik) tidak bertanggung jawab, Kejaksaan Agung dan sistem peradilan korup sehingga tidak efisien, serta Komnas HAM memiliki kekuasaan dan mandat yang terbatas.⁸ Pelanggaran HAM terjadi dan tidak terselesaikan karena perangkat hukum itu sendiri

⁸ Andrew Rosser, *Op.cit.*, hlm. 37.

tidak mampu untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM.⁹ Oleh karena itu, perspektif ini berasumsi perlu adanya perubahan pada ranah hukum di Indonesia dengan reformasi kelembagaan.¹⁰

Kedua, perspektif kulturalis melihat adanya pertentangan HAM universal dan HAM relativisme budaya. Budaya di negara-negara berkembang cenderung membagi derajat individu yakni dengan cara mempertinggi martabat ketimbang melihat mereka setara dengan seperangkat hak yang sama. Perspektif kulturalis dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membenarkan kekuasaan otoriter dan menangkis kritik NGO-NGO internasional dan pemerintah asing terhadap catatan HAM mereka.¹¹ Sejalan dengan itu, prinsip tradisionalisme juga berpandangan bahwa masyarakat tradisional harus diperbolehkan melanggar HAM manakala hak itu bertentangan dengan aturan-aturan tradisional tentang perilaku sosial yang tertata.¹² Meski selama periode pasca Orde Baru perspektif ini mulai kurang diminati – yang mencerminkan adanya pergeseran ke arah demokratisasi – namun pengaruhnya masih ada. Ini dikarenakan tokoh-tokohnya masih diberi ruang dan memiliki pengaruh kuat dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan politik negara.

Ketiga, perspektif radikal populis melihat pelanggaran HAM di Indonesia pada era reformasi terjadi disebabkan oleh intervensi asing dalam ekonomi justru menimbulkan kesenjangan, karena asas liberalisme yang semakin memarjinalisasi

⁹ Muchamad Ali Safa'at, "Penegakan HAM di Era Reformasi" dalam HAM di Era Reformasi, (Malang: nitropdf).

¹⁰ Andrew Rosser, *loc.cit.*,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 41.

¹² Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000).

kaum miskin.¹³ Berdasarkan teori ketergantungan, gagasan-gagasan populis radikal menghasilkan analisis implisit bahwa pelanggaran HAM di Indonesia disebabkan pemerintahan Barat, kelompok bisnis, dan organisasi-organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang menggerogoti penegakkan HAM.¹⁴ Namun, perspektif ini terlalu naif dan tendensius, karena faktanya pelanggaran HAM juga sering terjadi disebabkan dominasi politik-birokrasi dan elit-elit korporasi domestik. Perspektif ini menjelaskan bahwa, kebijakan politik pemerintah tentang ekonomi kerakyatan sangat diperlukan sebagai cara keberpihakan negara.

Keempat, perspektif pluralis menjelaskan, pelanggaran HAM era reformasi cenderung disebabkan adanya ketidakadilan struktural. Perspektif pluralis memperlihatkan: 1) masyarakat Indonesia terbagi atas “kaya” dan “miskin” – dirumuskan oleh akses mereka yang lebih besar terhadap modal; 2) kaum kaya lebih kuat dalam perumusan aturan perundangan di Indonesia daripada kaum miskin, alhasil “sistem hukum mengandung bias tersembunyi terhadap kepentingan dan gagasan keadilan bagi lapisan masyarakat yang relatif tidak berdaya”; 3) lapisan masyarakat yang tak berdaya dalam sistem peradilan atau mekanisme keadilan formal lainnya karena kasus-kasus di pengadilan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti korupsi dan tekanan politik.¹⁵

Secara teoritis, keempat perspektif tersebut dapat menggambarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran HAM di Indonesia pada era reformasi, dan

¹³ Andrew Rosser, *Op.cit.*, hlm. 42.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

juga menjelaskan bagaimana upaya yang harus dilakukan. Akan tetapi, sejatinya dalam upaya penegakkan HAM tidak bisa hanya mengandalkan analisis saja sebagai acuan. Maka dari itu penelitian ini berusaha memberikan sebuah metode yang dapat mendukung analisis keempat perspektif tersebut. Metode tersebut adalah strategi kampanye – dalam hal ini yang dilakukan oleh *civil society organizations*/CSO – sebagai upaya penegakan HAM.

Penerapan strategi kampanye – oleh KontraS yang didukung LSM lainnya – dalam beberapa kasus terbukti mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kendati begitu, strategi kampanye tidak dapat berdiri sendiri dalam menegakan HAM, akan tapi diperlukan juga sinkronisasi dengan reformasi kelembagaan, pergeseran *mindset* masyarakat ke arah demokratis, kebijakan politik pemerintah, serta bantuan hukum struktural seperti yang direkomendasikan keempat perspektif berdasarkan analisis-analisis yang ada.

CSO merupakan bandul pemberat untuk menciptakan keseimbangan antara negara dengan warga negara. Negara—sebagai lembaga yang memiliki kekuatan memaksa, mengikat, dan mencakup semua—berpotensi melakukan pelanggaran dan pengabaian atas kewajiban dan tanggung jawab penegakan HAM. Eksistensi CSO mampu untuk menjembatani *public interest* dari warga negara *vis a vis* negara, meminimalisasi potensi pelanggaran HAM serta mendesak kepada negara untuk menyegerakan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi warga negaranya.¹⁶ Dalam

¹⁶ Halili, “*Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil dalam Gerakan Hak Asasi Manusia*” dalam Jurnal Kajian Kewarganegaraan Vol. 6, No. 1, 2009, CIVICS, hlm. 2.

penelitian ini, KontraS sebagai CSO – dalam advokasi kasus Munir – melaksanakan strategi kampanye selain sebagai upaya melawan abainya pemerintah menindaklanjuti proses hukum kasus kematian Munir, juga merupakan dalam rangka mempopulerkan isu hak asasi manusia di Indonesia.

1.6 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep dalam penelitian pada dasarnya merupakan suatu hubungan atau kaitan antara satu konsep terhadap konsep lainnya dari masalah yang hendak diteliti. Untuk menjelaskan strategi kampanye *civil society* dalam penelitian ini, maka diperlukan konsep-konsep yang dapat saling mengaitkan satu sama lain, seperti hubungan *civil society* dengan kampanye advokasi hak asasi manusia. Untuk itu, maka kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Civil Society Organizations

Civil Society Organizations (CSO) hadir didorong oleh harapan meningkatnya peran masyarakat dalam relasinya dengan Negara dan pelaku pasar agar tercipta relasi yang lebih seimbang. Relasi yang seimbang menjadi cukup penting karena dianggap sebagai prasyarat terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang sejatinya merupakan subyek pembangunan suatu bangsa.¹⁷ CSO adalah representasi

¹⁷ Abdi Rahmat, *Peran Civil Society dalam Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2013), hlm. 1.

dari masyarakat yang berdaulat, dan kedaulatan adalah salah satu faktor penting dalam proses demokratisasi.

CSO merupakan salah satu organ vital dalam pelebagaan dan gerakan hak asasi manusia. Para pakar bahkan sepakat bahwa *civil society* merupakan “*the idea of the late twentieth century*” (gagasan terpenting pada akhir abad ke-20 ini).¹⁸ Dalam banyak kasus pelanggaran HAM, CSO bersumbangsih dalam bentuk investigasi dan pengumpulan data. Dalam pemajuan hak asasi manusia, mereka berkontribusi dengan *setting* yang standar dalam promosi, implementasi, dan penegakan norma-norma HAM.¹⁹

Mary Kaldor menyatakan bahwa *civil society* adalah sebuah entitas etis, di mana kelompok-kelompok yang patuh hukum, menghargai hak asasi manusia, mengembangkan sikap toleran, dan anti-kekerasan berkumpul.²⁰ Sedangkan, bagi Robert Putnam, *civil society* merupakan tempat di mana perbedaan kepentingan dinegosiasikan sehingga kehadirannya bisa meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam merepresentasi kepentingan dan sekaligus memperluas partisipasi politik.²¹

Civil society setidaknya mengalami tiga tahap perkembangan yaitu tahap liberalisasi, tahap transisi, dan tahap konsolidasi. Pada tahap liberalisasi, *civil society*

¹⁸ Sunil Khilnani, “*The Development of Civil Society*”, *Civil Society: Histories and Possibilities*, dalam *Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi*, Bob Sugeng Hadiwinata, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 9, No. 1, 2005, hlm. 2.

¹⁹ Halili, *op.cit.*, hlm. 1.

²⁰ Mary Kaldor, “*Transnasional Civil Society*” dalam Tim Dunne dan Nicholas, Wheeler (eds). *Human Rights in Global Politic*, 1999, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 96.

²¹ Robert D. Putnam, “*Bowling Alone: America’s Declining Social Capital*” dalam Larry Diamond dan Marc F. Platner (eds), *The Global Resurgency of Democracy*. (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1996).

berperan dalam mengkonstruksi hak-hak individu dan perluasan ruang gerak bagi masyarakat (*public space*).²² Sementara pada tahap transisi, *civil society* melakukan provokasi untuk kejatuhan rezim-rezim otoriter melalui berbagai protes, demonstrasi dan berbagai aksi jalanan lainnya. Sedangkan pada tahap konsolidasi, *civil society* dianggap berperan dalam upaya pembentukan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat (*good governance*) serta upaya untuk memastikan bahwa demokrasi adalah satu-satunya aturan main yang berlaku.²³

Di Indonesia, reformasi memberikan ruang politik menjadi lebih terbuka dan menyediakan peluang untuk masyarakat menghimpun diri sebagai kekuatan baru yang memiliki peran penting. CSO diakui cukup berperan penting dalam proses kebangkitan masyarakat pada era orde Baru. Kebangkitan ini dalam artian naiknya posisi tawar masyarakat sipil di hadapan negara, khususnya pemerintah. Dalam perkembangan *civil society* pasca reformasi, banyak muncul CSO yang memainkan peran-peran berbeda seperti *relief service*, peran pemberdayaan, peran advokasi dan peran intermediasi.²⁴ *Relief service* memfokuskan pada dampak dari keberadaan CSO tersebut berdampak terhadap terbantunya masyarakat atas persoalan kemiskinan atau bencana. Sedangkan peran pemberdayaan yakni membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Sementara di ranah advokasi, CSO memiliki andil dalam perubahan

²² Bob Sugeng Hadiwinata, *Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 1, 2005, hlm. 3.

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁴ Abdi Rahmat, *op.cit.*, hlm. 4.

kebijakan publik, dan peran intermediasi yakni jejaring yang dibangun CSO untuk mendukung misi mereka.²⁵

Lebih spesifik lagi, CSO di Indonesia terbagi atas beberapa kategori yakni:

Tabel 1.1
Jumlah CSO di Indonesia (periode tahun 2000)

<i>Category</i>	<i>Number of Organizations</i>
<i>Think thanks and research organizations</i>	41
<i>Student and youth Association/Alumni groups</i>	36
<i>Humanitarian and welfare groups</i>	305
<i>Business/Profesional asss., chambers of trade and commerce</i>	555
<i>Union and Labour Groups</i>	20
<i>Media and Journalist Associations</i>	17
<i>Legal Organizations, advocacy, and monitoring groups</i>	36
<i>Women Organization</i>	38
<i>Environment groups</i>	18
<i>Leisure Organisations, culture foundation and clubs</i>	109
<i>Religious Organisations</i>	58
<i>TOTAL</i>	1.322

Sumber: UNSFIR berdasarkan MASINDO (2000) Association and NGO's Guide 2000. Dikutip dari Iwan Gardono Sujatmiko, "Wacana Civil Society di Indonesia," MASYARAKAT: *Jurnal Sosiologi* Edisi 9 (2001).

Jumlah CSO di Indonesia terhitung sejak era Reformasi semakin tumbuh dan berkembang. Ini berbanding lurus dengan situasi politik yang semakin demokratis dan menjadi isyarat bahwa Indonesia telah beranjak dari kekuasaan rezim otoritarian. Selain itu, kemunculan *civil society* pasca-Orde Baru juga menunjukkan proses ke arah negara demokrasi bukan hanya pada sistem pemerintahan, tapi juga pada ranah akar rumput yakni masyarakat.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

Dewasa ini, Indonesia menjalankan suatu sistem demokrasi kontemporer yang menyertakan pula isi substansif berbagai hak asasi di dalamnya. Dengan kata lain, meskipun terjadi semacam pemisahan antara demokrasi dengan hak asasi pada era Reformasi ini karena demokrasi diidentikan dengan pendekatan politik, tapi politik juga nyatanya dapat menjembatani demokrasi dengan hak asasi. Demokrasi tak lain adalah fasilitas yang memberikan kemungkinan bagi segala nilai dan imajinasi baik itu yang bersifat universal semacam hak asasi maupun yang bertentangan dengan hak asasi dan demokrasi itu sendiri. Maka demokrasi dengan pendekatan politik bisa menjembatani dengan kebijakan negara dalam mengakomodir pelaksanaan hak asasi manusia yakni hukum kewarganegaraan yang progresif baik berupa partisipasi warga negara maupun konstitusi.

CSO bisa menjadi contoh yang ideal dalam mengakomodir ketiga elemen yakni demokrasi, hak asasi, dan politik berada dalam satu kesatuan masyarakat yang demokratis. Perkembangan pesat CSO yang ada di Indonesia menjadi representasi pelaksanaan hak asasi manusia pada era Reformasi dengan segala kategorisasi yang ada. Dengan kata lain, demokrasi dan hak asasi dapat kembali dipertemukan melalui politik yakni dengan kepolitikan umum yang dinamis dari negara dalam menjamin keberadaan CSO di Indonesia sebagai wujud dari politik hak asasi.

KontraS merupakan salah satu wujud bagaimana ketiga aspek yakni hak asasi manusia, demokrasi dan politik menjadi kesatuan yang sinkron. Sebagai sebuah CSO KontraS mengimplementasikan demokrasi sebagai suatu jalan meraih cita-cita untuk mewujudkan penegakkan HAM yakni dengan politik sebagai alat perjuangan. Politik

itu sendiri dilakukan dengan berbagai macam taktik dan cara, mulai dari pendekatan hukum dalam upaya saluran di ranah konstitusi, hingga strategi kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan publik. Era reformasi membukakan keran demokrasi bagi masyarakat sipil untuk berdaulat dan mengkritisi pemerintah, tetapi di sisi lain juga melebarkan celah konflik horizontal karena demokrasi itu sendiri yang bersifat multitafsir dan politik yang dapat dijadikan agenda-agenda eksploitatif.

1.6.2 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak-hak dasar dan kebebasan dasar yang diakui secara universal mempunyai sifat hakiki dan melekat pada manusia secara kodrati sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.²⁶ Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Dan dikatakan ‘melekat’ karena hak-hak itu dimiliki oleh siapapun, berkat kodrat sebagai manusia dan bukan karena pemberian, maka hak-hak tersebut tidak boleh dirampas ataupun dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemegang kekuasaan.²⁷

Hak asasi manusia diajukan untuk menjaga negara agar tetap menjadi pelayan atau fasilitator dari masyarakat/individu-individu dan tidak terjadi penyalahgunaan

²⁶ Heribertus Nurmanto Bonur, *Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, (Depok: Filsafat UI Press, 2007), hlm. 21.

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*” dalam HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 1.

kekuasaan oleh aparat negara.²⁸ Negara merupakan pihak yang berkewajiban dalam menjamin serta menegakkan HAM. Tugas negara terhadap HAM adalah menghormati, menghargai, memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut.²⁹ Oleh karena itu, tiap negara memiliki konsep yang mengatur kehidupan warga negaranya yakni berupa undang-undang tentang hak asasi manusia.

Konsepsi HAM selanjutnya dioperasionalkan menjadi instrumen-instrumen legal (internasional) telah diadopsi oleh berbagai negara di dunia, serta dicantumkan sebagai bagian konstitusi nasional, perundang-undangan, atau ke dalam tata sistem hukumnya. Di Indonesia sendiri konsepsi HAM saat ini diatur diantaranya dalam UU No.39 Tahun 1999 yang menegaskan tentang perlunya jaminan atas HAM, dan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.³⁰

a) Konsep HAM Awal Kemerdekaan

Indonesia dalam sejarah penegakkan hak asasi manusia hingga saat ini telah mengalami setidaknya tiga zaman yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Pembicaraan mengenai hak asasi manusia pada masa Orde Lama bergulir sejak UUD 1945 disahkan. Salah satu masalah yang diperdebatkan pada proses pengesahan adalah mengenai perlu tidaknya pencantuman HAM dalam Rancangan UUD dengan membaca diskusi-diskusi yang terjadi di BPUPKI.³¹

²⁸ Michael Freeman, *human rights* (Cambridge: Polity Press, 2002), hlm. 167.

²⁹ Lihat IKOHI, “*Mengenal HAM dan Hak Kita*”. Jakarta: IKOHI dan HIVOS, hlm. 2.

³⁰ Lihat Skripsi Antonius Steven Sitohang, “*Human Rights Defender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kasus Peristiwa Munir)*”, 2013, Jakarta, hal. 18.

³¹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2001, hlm. 22.

Pada saat itu terdapat dua pandangan yang saling kontradiktif mengenai perlu tidaknya HAM dimasukan ke dalam Rancangan UUD. *Pertama*, kubu yang menolak yakni Soekarno dan Supomo menyebut bahwa konsep HAM bersifat individualistis dan berasal dari ideologi liberalisme, sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan yang sedang dibangun. *Kedua*, kubu yang mendukung yakni Muhamad Hatta dan Mohamad Yamin mengemukakan konsep HAM perlu dimasukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara dan juga sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara yang harus diakui UUD.³²

Akan tetapi, meski menolak konsep HAM dimasukan ke dalam Rancangan UUD 1945, bukan berarti menihilkan HAM itu sendiri. Karena pada kenyataannya, Naskah UUD 1945 yang dihasilkan oleh Panitia Kecil yang diketuai oleh Supomo, yang telah memuat pasal-pasal tentang HAM.³³ Materi HAM yang diatur antara lain persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta mencakup hak sipil dan politik. Hal tersebut menunjukkan keselarasan konsep HAM yang ditawarkan kubu pro adalah HAM yang bersifat universal, tanpa membedakan paham-paham atau ideologi tertentu, yakni apakah liberal, individual maupun kekeluargaan.³⁴ Akhirnya dapat

³² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid Pertama*, Siguntang, 1971, hlm. 228-230.

³³ Lihat Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta, hlm. 246-256. Lihat Skripsi Antonius Steven Sitohang, “*Human Rights Defender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kasus Peristiwa Munir)*”, 2013, Jakarta, hlm. 29.

³⁴ *Ibid.*,

direfleksikan sebagai kesimpulan dari konsep HAM yang dijalankan pada masa Orde Lama merupakan konsep HAM yang bersifat universal.

b) HAM Pada Masa Orde Baru

Harapan penegakkan HAM yang lebih baik mencuat pada awal-awal rezim Orde Baru berkuasa. Seminar tentang HAM pada sekitar tahun 1967 diadakan oleh berbagai kalangan masyarakat, antara lain Seminar Nasional Hukum II tahun 1968 yang mengeluarkan beberapa rekomendasi penting. Rekomendasi-rekomendasi itu antara lain berwujud perlunya praktek hak uji materil (*judicial review*) dilakukan guna melindungi HAM itu sendiri, dan gagasan mengenai perlunya pembentukan pengadilan HAM mulai dikemukakan.³⁵

Pada kenyataannya, peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno atau Orde Lama ke rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto diawali oleh pembunuhan massal pada 1965-1966. Politik kekerasan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kekuasaan Orde Baru.³⁶ Manipulasi histori Orde Baru juga menjadi bagian penting dalam membangun hegemoni otoriter bertopeng “pembangunan” dan “Pancasila”.

Pembunuhan massal dimulai dari operasi militer bawah pimpinan Kopassus ke daerah-daerah yang dianggap menjadi basis PKI. Kemudian virus kebencian dan kekerasan itu menulari kelompok masyarakat di daerah-daerah yang anti PKI untuk memulai penyerangan terhadap orang-orang yang dituduh menjadi anggota atau pun

³⁵ Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 41.

³⁶ Robertus Robert, “*Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY*” (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 91.

simpatisan PKI.³⁷ Cara ini dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik dan juga keamanan rezim Orde Baru.

Rezim Orde Baru juga membangun legitimasi sejarah demi keberlangsungan kekuasaan. Untuk itu, rezim Orde Baru melakukan manipulasi histori dimulai dengan terbitnya buku berjudul *40 Hari Kegagalan "G-30-S" 1 Oktober-10 November*³⁸ karya Nugroho Notosusanto. Kemudian dilanjutkan dengan membuat narasi sejarah yang diharapkan akan diterima oleh rakyat Indonesia dan bertahan selama mungkin. Ada empat narasi yang dibangun rezim Orde Baru yaitu *Pertama*, Orde Baru berhasil menyelamatkan dan mempertahankan Pancasila. *Kedua*, Orde Baru representasi dari kekuatan melawan komunisme. *Ketiga*, Orde Baru adalah Orde Pembangunan yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. *Keempat*, untuk kebutuhan itu ABRI mengemban amanat Dwi Fungsi.³⁹

Kondisi penegakkan HAM yang bobrok dan manipulatif telah mengakumulasi sehingga pada 1998 muncul sebuah gerakan besar yang mampu menggulingkan rezim Orde Baru. Legitimasi sejarah yang telah dibangun selama 32 tahun tak cukup untuk menolong keruntuhannya. Penyelamat Pancasila malah menyelewengkan nilai luhur dari Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Hantu komunisme tak lagi menakutkan para mahasiswa. Pembangunan justru menghasilkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Rakyat tak takut lagi menghadapi pendekatan keamanan ABRI

³⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁸ Katherine E. McGregor, "Legacy of a Historian in the Service an Authoritarian Regime," dalam Robertus Robert, "Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY" (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 91.

³⁹ Robertus Robert, *loc.cit.*,

dan kaum sipil tak rela segalanya dipimpin oleh militer.⁴⁰ Kegundahan itu akhirnya melahirkan pergerakan yang disebut dengan Reformasi.

c) Implementasi HAM di Era Reformasi

Pasca jatuhnya rezim otoriter, demokrasi menjadi arena di mana segala nilai, norma, dan ideologi dipasangkan di atasnya. Akibatnya, pada zaman demokrasi ini, hak asasi manusia secara normatif sudah dipisahkan dari demokrasi dan direlatifkan setidaknya dengan isu hak-hak yang lain kalau bukan oleh ideologi-ideologi politik yang baru.⁴¹ Hak asasi manusia sebelumnya merupakan poin penting yang terdapat dalam unsur demokrasi itu sendiri, mengalami dikotomi oleh karena definisi-definisi baru yang cenderung melekatkan pendekatan politik pada demokrasi ketimbang hak asasi. Kecenderungan yang dimaksud adalah menempatkan asas demokrasi sebagai pandangan politik saja dan mengabaikan aspek hak asasi.

Kendati demikian, penegakkan HAM merupakan salah satu agenda utama di era Reformasi ini. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakkan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah. Gelapnya masa lalu bangsa Indonesia pada masa Orde Baru telah memicu kesadaran masyarakat untuk menuntut dan mendorong upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan pemajuan HAM yang lebih baik. Penyelesaian kasus masa lalu dan mencegah terjadinya pengulangan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 97

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 6.

pelanggaran HAM menjadi cita-cita yang hendak diwujudkan pada era Reformasi, seperti yang diamanatkan konstitusi.⁴²

1.6.3 Kampanye Advokasi HAM

Kampanye didefinisikan sebagai suatu gerakan atau tindakan serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, menyalurkan aspirasi dan sebagainya).⁴³ Menurut Pfau & Parrot, kampanye merupakan sebuah kegiatan kampanye merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, berkelanjutan, dan dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan.

*“A campaign is conscious, sustained, and incremental process designed to be implemented over a specified period of time for purpose of influencing a specified audience”.*⁴⁴

Artinya, sebuah kegiatan kampanye memprasyaratkan adanya suatu kesadaran sebagai pemicu ke proses selanjutnya, yang membuat khalayak memiliki perhatian terhadap isu yang disampaikan untuk kemudian prosesnya berkelanjutan, dengan tahap-tahap yang direncanakan, dirancang, dan akan dilaksanakan. Sementara Roger dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.⁴⁵

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka setiap aktifitas kampanye setidaknya mempersyaratkan beberapa hal, yakni adanya tindakan kampanye yang ditujukan

⁴² Muchamad Ali Safa'at, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴³ Lihat www.kbbionline.com diakses pada 20 Nopember 2014.

⁴⁴ Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung, Simbiosis Rekatana Media, 2004).

⁴⁵ Kampanye menurut Roger and Storey, dalam Ruslan Rosady, “*Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

untuk menciptakan efek atau dampak tertentu; sasaran yang besar dengan cakupan luas dan dipusatkan biasanya dalam kurun waktu tertentu; dan dilakukan melalui serangkaian tindakan terorganisir. Dengan kata lain, kampanye adalah suatu tindakan yang dilakukan secara serentak, terencana, dan berkelanjutan sebagai reaksi untuk mendukung atau pun menolak suatu kebijakan tertentu, dan juga sebagai cara penyampaian aspirasi dengan misi sosial atau pun komersial.

Kampanye memiliki kemiripan dengan propaganda karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang dilakukan secara terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. Kedua bentuk kegiatan komunikasi ini juga sama-sama menyajikan gagasan atau pesan. Kampanye memiliki konotasi yang positif di masyarakat dibandingkan propaganda.

Setidaknya terdapat tujuh perbedaan antara kampanye dengan propaganda. Pertama, sumber kampanye dapat diidentifikasi dengan jelas sedangkan propaganda cenderung tersembunyi. Kedua, kampanye mempunyai periode waktu pelaksanaan sedangkan propaganda tidak. Ketiga, sifat gagasan dalam kampanye terbuka untuk diperdebatkan, sedangkan dalam propaganda mementingkan pesan itu dipercayai oleh khalayak. Keempat, tujuan dalam kampanye jelas, spesifik dan terukur sedangkan propaganda diarahkan untuk mengubah *belief system*. Kelima, penerima pesan kampanye biasanya secara sukarela, sedangkan propaganda lebih bersifat memaksa. Keenam, dalam kampanye mengenal kode etik sedangkan propaganda menerabas itu.

Terakhir, kampanye memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, propaganda lebih mementingkan bagaimana pesan itu harus diterima publik.⁴⁶

Berikut adalah tabel perbandingan antara kampanye dengan propaganda:

Tabel 1.2
Perbanding Kampanye dan Propaganda

Aspek	Kampanye	Propaganda
Sumber	Jelas	Cenderung samar-samar
Tujuan	Tegas, spesifik dan variatif	Umum dan ditujukan mengubah sistem kepercayaan/nilai.
Waktu	Terikat dan dibatasi waktu	Tidak terikat waktu
Sifat gagasan	Terbuka untuk diperdebatkan, membuka ruang dialog.	Tertutup dan dianggap sudah mutlak benar (<i>self evident</i>)
Audiens	Kesukarelaan/persuasi	Tidak menekankan kesukarelaan, melibatkan paksaan/koersi, dan terkadang melakukan manipulasi fakta/pesan.
Pelaksanaan	Diatur kode bertindak/etika.	Tanpa aturan etis dan serba boleh.

Sumber: hasil analisis peneliti

Sebuah kampanye HAM pada umumnya dimulai dengan menyebar informasi kepada publik tentang kejahatan pelanggaran HAM, dengan harapan setidaknya itu dapat membuatnya memiliki rasa malu dan merubah perilakunya. Aktivis menuntut pada negara untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim represif atas pelanggaran HAM berat dan mengangkat isu pelanggaran HAM tersebut ke masyarakat internasional.⁴⁷ Hal ini merupakan strategi untuk memprovokasi respon global agar kampanye yang dilakukan tersebut menjadi sebuah gerakan sosial transnasional.

⁴⁶ Robert Cole, *The International Encyclopedia of Propaganda*, (Routledge Press, 1998), hlm. 624.

⁴⁷ Gay Seidmen, "Labor, Citizenship, and Human Rights Campaign", *Perspective on Work*, Vol. 13, No. 1 (Summer 2009), University of Illinois Press, hal. 11.

Salah satu alasan hadirnya CSO pada era demokratisasi adalah menjalankan agenda kampanye dalam rangka mendorong advokasi kasus. Kampanye oleh CSO biasanya adalah jenis kampanye ideologi yakni mengangkat isu-isu sosial, politik, hukum dan HAM. Kampanye dalam kaitannya dengan advokasi adalah salah satu komponen atau upaya mengubah kebijakan publik. Kampanye tersebut biasanya berhubungan dengan politik informasi dan komunikasi.

Salah satu indikator penting dalam kampanye HAM adalah *Public Opinion* atau opini publik sebagai sebuah pondasi. Opini publik adalah suatu respon dalam konteks demokrasi yang berupa kritik terhadap sebuah kebijakan yang sifatnya tidak mutlak, dan bebas dari keberadaan fenomena sosial.⁴⁸ Dengan demikian, keterlibatan publik dalam kampanye advokasi HAM adalah salah satu prasyarat bagi CSO untuk menyelenggarakan kampanye.

Mempengaruhi perubahan sebuah isu publik biasanya mempersyaratkan suatu kampanye, yang merupakan serangkaian aktifitas dan aksi-aksi yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu demi mencapai tujuan tertentu yang dinyatakan secara jelas.⁴⁹ Kampanye advokasi kasus pelanggaran HAM menjadi jalan alternatif ketika sebuah perkara mengalami kemandegan atau cenderung diabaikan posisinya di mata hukum. Kampanye digunakan sebagai cara untuk menekan pemerintah agar memiliki

⁴⁸ Paul Almeida and Erica Walker. “*The Face of Neoliberal Globalization: A Comparison of Three Popular Movement Campaigns in Central America*”. Social Justice Vol. 33 (2006), hlm. 5.

⁴⁹ WRI Team, A-Z Kampanye Non-Kekerasan: *dari Filosofi Hingga Aksi* (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2009), hlm. 45.

kemauan politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mengalami *deadlock* di pengadilan.

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.⁵⁰ Menurut Silvermen, metodologi penelitian adalah sebuah pendekatan umum yang digunakan peneliti untuk mempelajari tentang topik dari suatu permasalahan.⁵¹ Maka dari itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif tersebut diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan *holistic*.⁵² Guna mendukung keabsahan data yang sudah ada, maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak penyelenggara kampanye dan mengkaji dengan analisis- analisis dari berbagai literatur yang relevan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2006), hlm. 1.

⁵¹ Silvermen, *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text, and Interaction* (London: Sage Publications, 1994), hal. 22.

⁵² Bogdan and Taylor, dalam Nur Fithry Amalia, *"Kampanye Public Relations dalam Membentuk Sikap Khalayak"* (Depok: FISIP UI, 2012).

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi tentang suatu masalah dengan memiliki batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.⁵³ Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus untuk melihat bagaimana Strategi Kampanye KontraS sebagai *Civil Society Organizations* dalam Advokasi Kasus Munir dilaksanakan dan relevansinya dengan upaya penegakan HAM di Indonesia pada era reformasi.

1.7.1 Peran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif amat diperlukan, karena peneliti sendiri merupakan alat (instrumen) pengumpul data yang sifatnya utama. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat yang juga berperan serta dalam kegiatan turun lapangan. Peneliti pada waktu penelitian melakukan pengamatan langsung, untuk mengetahui fenomena-fenomena yang nampak. Secara umum kehadiran peneliti di lapangan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: penelitian pendahuluan, pengumpulan data, kemudian menganalisis data tersebut untuk melakukan evaluasi.

⁵³ Nur Fithry Amalia, *Kampanye Public Relations dalam Membentuk Sikap Khalayak* (Depok: FISIP UI, 2012), hal. 8.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok atau organisasi yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan model *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.⁵⁴

Subjek penelitian ini diantaranya adalah Koordinator KontraS, Haris Azhar, selaku pengawas kegiatan kampanye, anggota Biro Kampanye dan Jaringan Alves Fonataba, Indah Nurmasari, dan Luh Putu Kusuma Ririen, selaku perancang strategi sekaligus pelaksana kegiatan kampanye, dan Chrisbiantoro selaku Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi yang tentunya tak dapat dipisahkan dari perencanaan dan perancangan kampanye KontraS.

1.7.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian literatur untuk mendapatkan gambaran dan analisis mengenai situasi penegakan HAM di Indonesia pada era reformasi, dan mendeskripsikan penyelenggaraan kampanye advokasi kasus kematian Munir. Peneliti dalam penelitian ini terlebih dahulu mencari studi sejenis guna menemukan relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

⁵⁴ Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jogjakarta: Erlangga, 2009).

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi langsung sebagai pengamat, tanpa mengatur situasi dan kondisi objek yang diteliti, atau dengan kata lain dalam situasi yang alamiah (*natural setting*). Atas dasar itu, maka hubungan epistemologis antara pengamat dengan objek merupakan suatu kesatuan subyektif dan merupakan perpaduan interaksi diantara keduanya.⁵⁵

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan metode wawancara pihak terkait dengan kampanye advokasi kasus Munir, serta data sekunder yaitu berupa observasi dokumen. Data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dokumen tersebut selanjutnya dikaitkan dengan konsep-konsep sosiologis untuk melihat gejala yang ada.

Untuk mendapatkan data seputar kegiatan kampanye yang dilakukan KontraS, peneliti mewawancarai orang-orang di Biro Kampanye dan Jaringan untuk mengetahui secara spesifik bagaimana strategi kampanye itu dirancang, apa tujuannya, dan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi untuk mendapatkan verifikasi tentang pelaksanaan kegiatan serta *progress* yang dihasilkan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara

⁵⁵ Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2006).

mendalam dengan Koordinator KontraS guna mengetahui secara keseluruhan bagaimana agenda kampanye tersebut dilaksanakan serta dievaluasi, baik itu *progress* maupun *impact* sebagai capaian, dan bagaimana pengaruhnya untuk penuntasan kasus.

Selain itu peneliti juga melakukan studi dokumen diantaranya: hasil temuan-temuan TPF, putusan persidangan, dan berita-berita media massa. Ini merupakan cara untuk mengetahui alur kasus baik itu kronik kematian Munir, proses advokasi kasus, kegiatan kampanye, maupun perkembangan kasusnya hingga saat ini. Peneliti juga melakukan terjun lapangan dalam salah satu agenda kampanye kasus terkait, untuk melakukan pengamatan sekaligus turut serta sebagai partisipan dalam kegiatan kampanye tersebut.

1.8 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana BAB I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II mendeskripsikan profil Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Pada bab ini akan dijelaskan peran KontraS sebagai *Civil Society Organizations* yang fokus di bidang HAM. Lalu akan dijelaskan pula Biro Kampanye dan Jaringan yang berperan melaksanakan strategi kampanye yang dilaksanakan KontraS dalam fungsinya sebagai CSO.

BAB III membahas latar belakang pembunuhan Munir, kronik kasus, serta proses advokasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara. Pada bab ini penulis juga menganalisis penyebab-penyebab yang menghambat penuntasan kasus Munir.

BAB IV mendeskripsikan strategi kampanye yang terdiri dari siaran pers, aksi turun ke jalan, kampanye populer, hingga lobi-lobi yang dilakukan dalam rangka mendukung proses advokasi. Bab ini juga membahas tinjauan strategi advokasi *civil society* dalam mengevaluasi strategi kampanye.

BAB V memberikan kesimpulan skripsi ini serta rekomendasi peneliti dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa dan pemerhati HAM.

BAB II

PROFIL KONTRAS

SEBAGAI *CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS*

2.1 Pengantar

Civil Society Organizations atau CSO merupakan pilar penting dalam proses demokratisasi suatu negara. CSO menjadi barometer bagi negara dengan masyarakat yang berdaulat, berdaya dan mandiri. Selain menjadi penyeimbang antara negara dan pasar, keberadaan CSO juga mampu menghimpun kekuatan alternatif diluar dominasi negara maupun pasar. CSO bahkan menjadi penyambung aspirasi politik masyarakat dan menyalurkannya melalui berbagai macam akses seperti media, aksi, atau bahkan karya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang lebih dikenal dengan nama KontraS merupakan salah satu *civil society organizations* alias Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada bidang hak asasi manusia. KontraS menjadi ruang konsolidasi bagi para korban maupun kerabat dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia untuk menghimpun diri mereka ke dalam satu wadah pergerakan baik itu dalam ranah advokasi hukum maupun aksi turun ke jalan.

Selain sebagai wadah konsolidasi, KontraS juga mempunyai beberapa peran dalam rangka pemajuan HAM dan demokrasi. Peran-peran itu diantaranya dengan menyelenggarakan pendidikan HAM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara dan apa yang dapat dilakukan jika menjadi korban pelanggaran HAM. Sementara di ranah hukum KontraS memberikan bantuan hukum melalui upaya advokasi yakni menyediakan advokat bagi para korban pelanggaran HAM. Sedangkan pada tataran sosial, KontraS berupaya mempopulerkan HAM melalui strategi kampanye hak asasi manusia.

2.2 Sejarah KontraS

KontraS merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang HAM dan mempromosikan pemenuhan hak serta keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Organisasi ini berdiri sejak 20 Maret 1998 dan bekerja untuk kasus penghilangan paksa aktivis pro demokrasi tahun 1997/1998.⁵⁶ Penulisan huruf kapital “S” pada penamaan KontraS ditujukan sebagai Kontra Soeharto, karena pada saat rezim Orde Baru berkuasa, Soeharto menjadi representasi pelanggaran HAM di Indonesia.⁵⁷

Selama penanganan kasus penculikan aktivis, sejumlah kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu juga meminta pada KontraS untuk mengadvokasi kasus mereka. KontraS juga terlibat dalam advokasi kasus-kasus kekerasan selama transisi politik di Indonesia, termasuk di Aceh, Papua, Timor-Leste, serta di daerah konflik lainnya seperti Maluku dan Poso dan kasus-kasus individu seperti penyiksaan.⁵⁸

⁵⁶ Leaflet KontraS, *Edisi Tahun 2013* (Jakarta: KontraS, 2013).

⁵⁷ Wawancara dengan Haris Azhar Koordinator KontraS pada 17 April 2015.

⁵⁸ Leaflet KontraS, *loc.cit.*,

Setelah rezim pemerintahan Orde Baru jatuh, KontraS berkembang menjadi organisasi HAM dengan mandat advokasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kasus penculikan atau penghilangan paksa. KontraS juga melakukan advokasi terhadap beragam isu dan kasus, khususnya yang berdimensi hak sipil dan politik, diantaranya penyiksaan, hukuman mati, brutalitas aparat TNI-POLRI, dan kasus-kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁹ KontraS dalam perumusan kembali peran dan posisinya, mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan *civil society* lainnya guna meningkatkan pengawasan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang substantif dan mendorong negara untuk mewujudkan keadilan dan akuntabilitas hak asasi manusia.

KontraS memiliki visi mewujudkan demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM.⁶⁰ Selain itu, KontraS juga memiliki misi yaitu: 1) memajukan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghargaan HAM; 2) memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM melalui upaya advokasi; 3) mendorong perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM.⁶¹

⁵⁹ Koran KontraS, *Edisi Melawan Lupa* (Jakarta: KontraS, 2014), hlm. 7.

⁶⁰ Lihat http://www.kontras.org/index.php?hal=visi_misi (Diakses pada 22 Nopember 2014).

⁶¹ *Ibid.*,

Sementara dalam menjalankan program-program serta kegiatan umumnya, KontraS memiliki lima preferensi yang didasarkan pada landasan visi dan misinya. Kelima preferensi tersebut adalah: 1) Prevensi viktimisasi dalam politik kekerasan; 2) *Due process of law*; 3) Rehabilitasi; 4) Rekonsiliasi dan perdamaian; 5) Mobilisasi sikap dan opini.⁶² Lebih spesifik untuk preferensi mobilisasi sikap dan opini terdiri dari tiga unsur yang menjadi jargon yaitu: anti politik kekerasan, pelanggaran HAM, dan *human loves human*.

2.3 KontraS sebagai *Civil Society Organizations*

Civil Society Organizations/CSO secara umum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu CSO internasional dan CSO nasional. CSO internasional biasanya memiliki perwakilan-perwakilan di negara berkembang. Sedangkan CSO nasional membatasi aktivitas-aktivitasnya untuk negaranya sendiri.⁶³ KontraS sendiri merupakan CSO berskala nasional dan memiliki perwakilan-perwakilan regional dengan konsen penanganan kasus-kasus berbeda tiap daerahnya. Keberadaan KontraS di daerah-daerah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengkoordinir kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah. Kehadiran KontraS di daerah-daerah juga ditujukan untuk mempercepat respon atas pengaduan-pengaduan atau pun laporan untuk ditindaklanjuti serta sebagai fungsi efektifitas dan efisiensi dalam penanganan maupun proses hukum.

⁶² Lihat http://www.kontras.org/index.php?hal=prog_ker (Diakses pada 22 Nopember 2014).

⁶³ Halili, *op.cit.*, hlm. 6.

Hingga saat ini, KontraS sudah eksis di tujuh wilayah yakni Jakarta (KontraS Pusat), Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Ke tujuh kantor cabang KontraS ini dalam pelaksanaan kerjanya memiliki fokus yang berbeda-beda, sesuai isu yang paling sering terjadi di daerah masing-masing. KontraS Jakarta sebagai Pusat memiliki fokus pada isu pelanggaran HAM masa lalu; *Human Rights Defender*; bisnis dan kekerasan; kekerasan terhadap kelompok agama minoritas; reformasi sektor keamanan; advokasi HAM Internasional; daerah konflik; kebebasan sipil dan kekerasan yudisial; dan hukuman mati.⁶⁴

Sementara itu KontraS Jawa Timur yang terletak di Surabaya memfokuskan pada konflik agraria masyarakat versus TNI; kekerasan dalam sektor sumber daya alam; kekerasan terhadap kelompok agama minoritas; dan kekerasan oleh aparat keamanan. KontraS Aceh fokus pada kasus pelanggaran HAM masa lalu; dan kekerasan oleh aparat keamanan. KontraS Sumatra Utara (Sumut) fokus pada kekerasan dalam sektor sumber daya alam; dan kekerasan aparat keamanan. KontraS Sulawesi fokus pada konflik komunal; kekerasan dalam sektor sumber daya alam; dan kekerasan oleh aparat keamanan. Sedangkan KontraS Nusa Tenggara fokus pada isu-isu kekerasan oleh aparat keamanan; dan kekerasan dalam sektor sumber daya alam. Dan, KontraS Papua yang berkantor di Jayapura memiliki fokus pada isu eksploitasi sumber daya alam; kekerasan oleh aparat keamanan; dan pembela HAM.⁶⁵

⁶⁴ Leaflet Kontras, *loc.cit.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

Kendati berskala nasional dengan konsentrasi pada regional, KontraS juga memiliki peranan penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan hak asasi manusia. Dengan semakin meningkatnya arus globalisasi, keberadaan non-governmental organizations (NGOs) saat ini semakin diperhitungkan perannya. Pendekatan *multitrack diplomacy* menjadi relevan dalam perkembangan hubungan internasional saat ini, di mana pemerintah bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh dalam suatu resolusi konflik, terutama di bidang HAM.⁶⁶

KontraS juga terlibat dalam upaya advokasi internasional, yakni melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi sejenis sambil membangun relasi antar *civil society* Internasional. Kerjasama tersebut merupakan upaya membangun jaringan solidaritas internasional untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara bersama-sama atau dalam bentuk dukungan, baik kasus dalam skala nasional maupun internasional. Kerjasama tersebut juga dilakukan dalam rangka mempopulerkan gagasan HAM dalam berbagai bentuk kampanye.⁶⁷

Civil society merupakan sebuah ranah masyarakat yang terpisah dengan ranah Negara karena dalam peran dan juga fungsinya yang lebih bebas dan merdeka dari intervensi Negara.⁶⁸ Oleh karena itu, *civil society* memiliki kebebasan untuk bersikap dan merespon kebijakan-kebijakan negara dengan kritis tanpa boleh ada pembatasan

⁶⁶ Farah Fathurrahmi, Nisrina Nadhifah Rahman, Rei Firdha Amalia, dan Ahmad Masihuddin, *Lintas Batas HAM: Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri* (Jakarta: KontraS, 2014), hlm. 6.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁸ Aditya Perdana, *Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia*, dalam Seminar Internasional ke-10 “*Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009*”, Salatiga, Juli 2009.

yang bersifat represif dari negara. KontraS selama ini selalu menyikapi dengan kritis kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana peran dan fungsinya dan terlepas dari campur tangan pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Relasi antara CSO dengan negara memiliki wajah yang tak tunggal, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eskalasi situasi negara, dinamika internal organisasi masyarakat sipil, maupun konteks ruang dan waktu relasi keduanya.⁶⁹ Begitu pula relasi KontraS dengan negara, sangat dipengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam isu HAM. Sebagai penyeimbang antara negara dengan warga negara, KontraS berperan menyalurkan aspirasi sekaligus pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah selaku penyelenggara negara sebagai bentuk sikap kritis masyarakat demokratis.

Setiap CSO mempunyai kerja yang berbeda dalam menjalankan organisasi dan isu-isu yang ditanganinya. Kerja tersebut tentunya disesuaikan dengan konsen dan isu-isu yang digeluti. KontraS sebagai CSO bidang HAM memiliki kerja-kerja yang meliputi: investigasi pelanggaran HAM, pendokumentasian pelanggaran HAM, mediasi, bantuan hukum, penelitian, lobi-lobi, kampanye, dan pendidikan Hak Asasi Manusia.⁷⁰

Sedangkan pada program mendatang atau KontraS menyebutnya Program Masa Depan, KontraS akan berkontribusi dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kekerasan dan ketidakadilan. Visi ini merupakan lanjutan dari

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 7

⁷⁰ Leaflet KontraS, *loc.cit.*,

kerja-kerja KontraS seperti yang disebutkan sebelumnya. Untuk mencapai visi ini KontraS akan melakukan Peningkatan akuntabilitas negara dalam memenuhi hak-hak korban hak asasi manusia; Pelindungan manusia dari kekerasan dan ketidakadilan sesuai dengan standar internasional hak asasi; KontraS menjadi organisasi yang lebih independen, partisipatif, dan akuntabel.⁷¹

2.3.1 Penanganan Kasus

KontraS sebagai CSO yang bergerak di bidang HAM sejauh ini telah dan terus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu yang dilakukan oleh Negara, korporasi, maupun kelompok masyarakat. Tak sebatas dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, KontraS juga berkecimpung dalam perumusan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia dan pemajuan demokrasi Indonesia.

a) Kasus Orang Hilang

Salah satu kejahatan yang dilakukan Negara yang kasusnya hingga kini masih terus ditangani adalah Kasus Orang Hilang, yang terjadi pada masa transisi dari pemerintahan orde Baru ke era reformasi. Advokasi yang dilakukan KontraS yakni berupa laporan dan rekomendasi dari Pansus Penanganan & Pembahasan atas hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa; kertas posisi singkat Penculikan 1998-2009 (28/10/2009); dan kronik kasus penghilangan paksa aktivis pada 1998.⁷²

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Lihat www.kontras.org Diakses pada 22 Nopember 2014

b) Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

KontraS juga menangani Kasus Masa Lalu seperti Kronik kasus Talangsari; kasus Trisakti; kasus Semanggi I dan Semanggi II; dan kasus Tanjung Priok 1984.⁷³ Kasus-kasus pelanggaran HAM Masa Lalu ini bahkan pernah ditangani oleh Munir dan menjadi salah satu indikasi motif pembunuhannya, karena membuat oknum TNI yang terlibat pada kasus-kasus ini menjadi habis karirnya alias diberhentikan secara tidak hormat.

c) Kasus Munir

Sedangkan untuk kasus Munir KontraS selain mengirimkan perwakilan untuk Tim Pencari Fakta, KontraS juga melakukan monitoring persidangan Muchdi PR, serta Peninjauan Kembali putusan MA untuk terdakwa Pollycarpus.⁷⁴ Selain itu, KontraS juga tergabung bersama para aktivis HAM, LSM, dan lembaga-lembaga bantuan hukum dalam Komunitas Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM). Melalui KASUM, KontraS melakukan serangkaian advokasi serta kampanye.

d) Persidangan Judicial Review Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Selanjutnya KontraS juga turut berperan dalam Persidangan Judicial Review Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan mempertanyakan apakah UU tersebut sudah menjamin prinsip keadilan, prinsip

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*,

non-diskriminasi, prinsip persamaan di depan hukum, dan prinsip negara hukum yang demokratis, dan prinsip ketidakberulangan (*non-recurrence*). Selain itu, yang menjadi objek dari KRR adalah pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁷⁵

e) Praperadilan Soeharto

Kemunculan KontraS tak dapat dilepaskan dari momen bersejarah pada era transisi orde Baru ke reformasi. Sebelum menuju ke babak baru masyarakat Indonesia menginginkan adanya peradilan atas ‘dosa-dosa’ yang terjadi selama rezim Soeharto. Mana dari itu, KontraS bersama Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS), serta masyarakat sipil lainnya mengajukan Praperadilan Soeharto. Praperadilan tersebut memutuskan untuk mengabulkan agar perkara dibuka dan dilanjutkan, dan menyatakan bahwa penghentian penuntutan perkara sebelumnya adalah tidak sah.⁷⁶

f) Pengadilan HAM

KontraS juga turut andil dalam beberapa pengadilan HAM yang digelar dalam rangka mengadili pelanggaran HAM masa lalu. Peran itu yakni diantaranya dengan membuat laporan pemantauan dan *monitoring* pengadilan. Beberapa diantara

⁷⁵ Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan, *Uji Materiil terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, (Jakarta, 2006).

⁷⁶ Putusan Praperadilan No.09/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel. No.10/Pid/Prap/2006/PN.Jak-Sel. No.11/Pid/Prap/2006/PN.Jak-Sel.

pengadilan HAM tersebut ialah Pengadilan HAM Adhoc Timor, Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok, Pengadilan HAM Abepura.

g) Kasus-kasus Lainnya

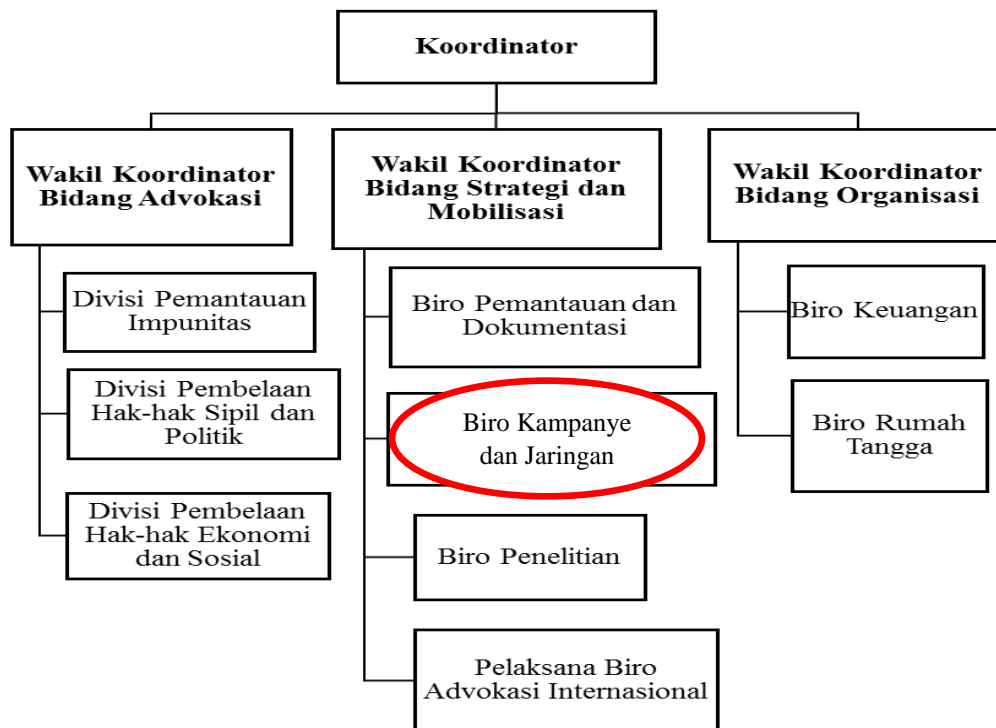
Selanjutnya KontraS juga mengadvokasi, memonitoring, dan juga melakukan kampanye untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran terhadap hak sipil-politik seperti kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berserikat, kebebasan memeluk beragama dan berkeyakinan, maupun hak ekonomi-sosial-budaya seperti kasus hak atas kepemilikan tanah, dan diskriminasi sosial.

Kasus-kasus di atas merupakan beberapa contoh kasus yang ditangani oleh KontraS sebagai CSO yang bergerak di bidang hak asasi manusia. KontraS dalam proses advokasi selain menyediakan sumber daya manusia sebagai advokat, juga bekerjasama dengan LSM lainnya seperti LBH Jakarta, ICW, IKOHI, dan lain-lain. Semua tentu disesuaikan dengan isu yang menjadi pembahasan. KontraS dalam advokasi kasus Munir tergabung dalam KASUM bersama beberapa aktivis peduli HAM. Sedangkan untuk ranah kampanye, KontraS melalui Biro Kampanye dan Jaringan beraliansi dengan beberapa LSM seperti Social Movement Institute dan komunitas-komunitas seni seperti Ruang Rupa dan Taring Babi.

2.3.2 Struktur Organisasi KontraS

Sebuah organisasi tentu mempunyai struktur organisasi yang disusun guna menjalankan program dan kegiatan. Struktur organisasi dirancang guna memberi gambaran mengenai pembagian tugas serta tanggung jawab kepada individu-individu yang berada dalam sebuah organisasi dalam menjalankan organisasi tersebut. Dalam menjalankan program dan kegiatan serta implementasi sebagai sebuah CSO, KontraS membagi struktur organisasi kepengurusan ke dalam tiga badan. Ketiga badan itu adalah Badan Penasihat, Badan Pengurus, dan Badan Pekerja.

Gambar 2.1
Struktur Badan Pekerja KontraS



Sumber: Bagan Struktur Organisasi KontraS 2014

2.4 Deskripsi Biro Kampanye dan Jaringan

KontraS merupakan CSO yang bergerak di bidang hak asasi manusia dalam hal ini dengan memberikan bantuan berupa advokasi serta strategi mobilisasi. Bidang advokasi terbagi atas tiga divisi, yakni: 1) Divisi Pemantauan dan Impunitas yang mengurus kasus-kasus masa lalu; 2) Divisi Pembelaan Hak-hak Sipil dan Politik yang menangani kasus pelanggaran hak sipil dan politik seperti kasus kekerasan atas nama agama; dan 3) Divisi Pembelaan Ekonomi dan Sosial yang menangani kasus seperti sengketa lahan.

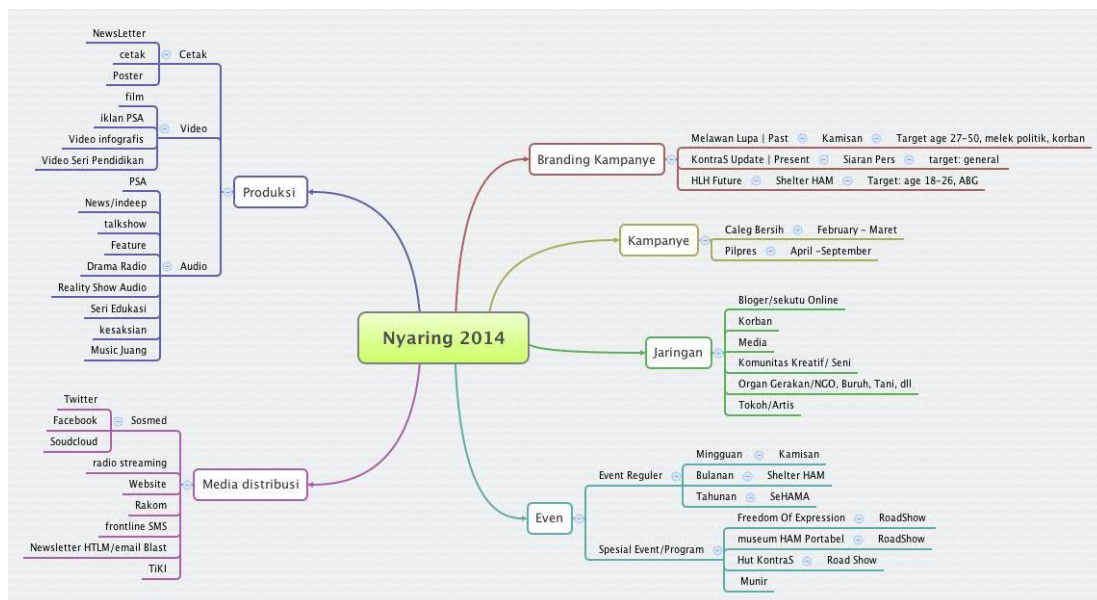
Sementara di bidang strategi dan mobilisasi KontraS terdiri atas empat biro seperti yang dipaparkan pada bagan di atas. Bidang ini mempunyai biro yang salah satunya bertugas khusus menjalankan agenda-agenda kampanye. Biro tersebut adalah Biro Kampanye dan Jaringan. Salah satu agenda kampanye biro ini kampanye untuk kasus Munir. Biro yang berada dibawah naungan Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi ini memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Merancang strategi dan melaksanakan kampanye

Sebagaimana penamaannya, Biro Kampanye dan Jaringan memiliki fungsi dalam merancang strategi sekaligus implementor atau pelaksana kegiatan kampanye. Sebelum melakukan eksekusi sebuah kampanye setidaknya ada beberapa tahapan, yakni: mengumpulkan data-data; menyusun rencana waktu dan tempat pelaksanaan, menyiapkan media kampanye; menghubungi jaringan. Biro ini biasanya membuat skema sebagai acuan untuk melaksanakan strategi kampanye.

Berikut adalah contoh skema yang dibuat Biro Kampanye dan Jaringan KontraS:

Gambar 2.2
Rancangan Strategi Tahun 2014
Biro Kampanye dan Jaringan



Sumber: Biro Kampanye dan Jaringan KontraS, tahun 2014.

b) Menyebarluaskan informasi

Informasi merupakan faktor penting dalam proses aktualisasi pengetahuan masyarakat. Informasi kaitannya dengan fungsi Biro Kampanye dan Jaringan adalah dalam rangka menghadirkan data baru atau *update* suatu kasus, atau bisa juga untuk memberitahukan tentang kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan khususnya oleh KontraS. Dengan kata lain, Biro Kampanye dan Jaringan mempunyai

peran strategis baik itu untuk mengenalkan dan mempopulerkan hak asasi manusia, maupun mengenalkan KontraS kepada masyarakat.

Ada dua cara yang KontraS lakukan untuk menyebarkan informasi ke publik. Yang pertama adalah metode *offline* yakni dengan alat-alat kampanye cetak seperti poster, sticker, pamflet, leaflet, stand banner, dan lain-lain. Selain itu, KontraS juga melakukan kampanye bersifat *online*. Kampanye *online* meliputi: poster elektronik, dan media sosial seperti *twitter*, *facebook*, dan *youtube* untuk mendukung advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Fungsi efisiensi menjadi prasyarat tersendiri untuk kampanye bersifat *online* ini. Berikut contoh tools campaign yang dibuat KontraS:

Gambar 2.3
Poster Dukung Pilkada Langsung



Sumber: tools campaign Dukung Pilkada Langsung oleh KontraS, tahun 2014.

b) *Propaganda isu*

Propaganda isu maksudnya adalah melakukan *blow up* suatu isu atau kasus kepada masyarakat untuk kemudian mengarahkan isu atau kasus tersebut menjadi bahan diskursus masyarakat. Isu yang beredar di masyarakat itu kemudian tersebar dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Media sosial dijadikan sebagai media untuk kampanye karena selain efektif mempengaruhi publik dengan cukup signifikan, juga efisien dalam persebaran isu dengan kalangan yang menjadi sasaran kampanye yaitu anak muda. Sebagian besar pengguna internet (netizen) khususnya media sosial adalah anak muda, oleh karena itu media sosial merupakan media yang paling ideal untuk menyebar propaganda. Selain itu, melalui poster elektronik KontraS melakukan propaganda berupa ajakan kepada masyarakat untuk turut menekan pemerintah.

Gambar 2.4
Poster Tolak UU Pilkada



Sumber: tools campaign Menggugat UU Pilkada oleh KontraS, tahun 2014.

c) *Memproduksi alat-alat kampanye*

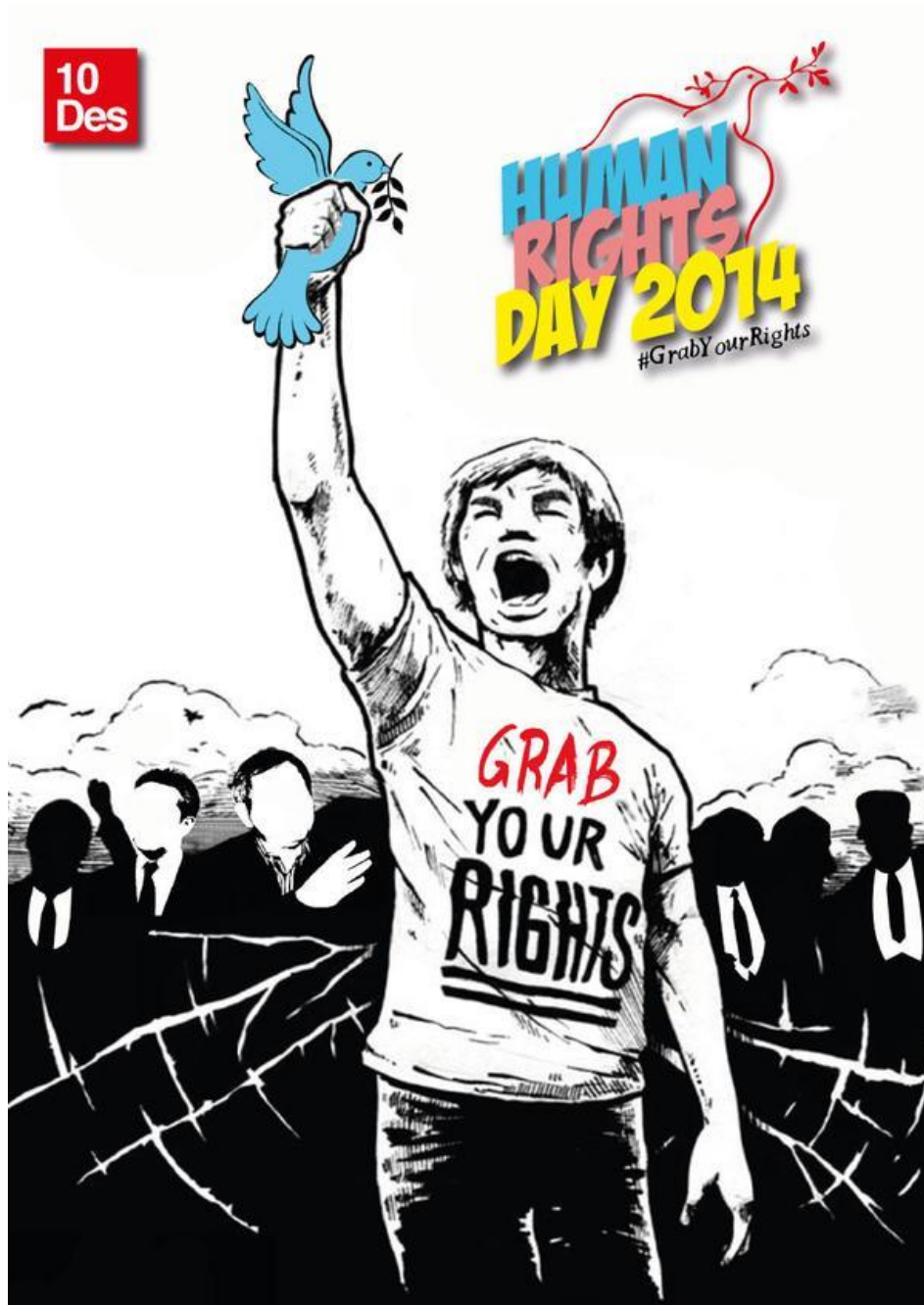
Kegiatan kampanye pada dasarnya memprasyaratkan alat-alat kampanye yang menjadi media untuk menyampaikan pesan. Alat-alat kampanye tersebut bisa berupa fisik maupun non fisik. Alat kampanye fisik diantaranya adalah *back drop*, poster, spanduk, miniatur, bendera, pamflet dan *leaflet*, hingga seni lukisan dengan objek tubuh manusia. Sedangkan alat kampanye non fisik atau yang bersifat *online* seperti *digital campaign* meliputi info grafis, video grafis, dan poster elektronik. Berikut adalah contoh alat-alat kampanye:

Gambar 2.5
Tools Campaign Grab Your Rights



Sumber: Biro Kampanye dan Jaringan, Poster sebaran menyambut Hari HAM, tahun 2014.

Gambar 2.6
Tools Campaign Poster Human Rights Day 2014



Sumber: Biro Kampanye dan Jaringan KontraS, Poster Utama Human Rights Day 2014.

d) Berjejaring

Sebagaimana penamaannya, Biro Kampanye dan Jaringan selain mengurus kegiatan kampanye, juga melakukan fungsi jaringan. Berjejaring merupakan faktor yang tak kalah penting bagi CSO, karena semakin luas jaringan yang ada maka isu yang hendak diangkat pun akan tersebar lebih masif. Jaringan KontraS diantaranya meliputi antar-LSM, mahasiswa, komunitas, dan perkumpulan keluarga dan korban pelanggaran HAM.

Sementara dalam fungsi intermediasi, Biro Kampanye dan Jaringan memiliki jaringan yang luas dalam menjalin relasi dengan berbagai organisasi dan melibatkan banyak komunitas dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan. Hal tersebut dilakukan untuk mempopulerkan isu HAM di Indonesia dan menjadi suatu gerakan penyadaran akan pentingnya hak asasi sebagai warga Negara. Penyadaran dan juga penguatan gerakan diartikan bahwa publik mendukung penyelenggaraan negara yang berlandaskan transparansi hukum dan menginginkan penuntasan kasus-kasus yang ada berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka demokratisasi dan penegakan keadilan.

2.5 Penutup

KontraS merupakan *civil society organizations* yang kiprahnya dimulai pada era transisi Orde Baru ke era Reformasi. Dalam menjalankan implementasi sebagai CSO yang bergerak di bidang hak asasi manusia KontraS memiliki preferensi yakni

anti politik kekerasan, pelanggaran HAM, dan *human loves human*. Ketiga indikator tersebut merupakan wujud dari sikap yang KontraS usung sebagai jargon dari preferensi mobilisasi sikap dan opini.

Sebagai CSO bidang hak asasi manusia, KontraS juga menangani beberapa kasus diantaranya adalah kasus Orang Hilang, dengan memberikan bantuan advokasi berupa membuat laporan dan rekomendasi. KontraS juga menangani kasus Masa Lalu seperti Kronik kasus Talangsari; kasus Trisakti; kasus Semanggi I dan Semanggi II; dan kasus Tanjung Priok 1984. Selain itu, KontraS juga mengajukan Praperadilan Soeharto bersama GEMAS, berkontribusi dalam beberapa Pengadilan HAM dan kasus-kasus pelanggaran hak-hak sipil-politik dan hak-hak ekonomi-sosial-budaya. Kemudian KontraS juga turut andil dalam Persidangan Judicial Review Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sementara dalam kasus Munir selain tergabung dalam KASUM sebagai ruang konsolidasi pada ranah hukum, KontraS juga melakukan agenda-agenda kampanye melalui Biro Kampanye dan Jaringan. Biro yang berada dibawah Koordinator Bidang Mobilisasi Sikap dan Opini ini berperan merancang strategi kampanye yang meliputi: penyebaran informasi dengan berbagai media baik itu *offline* atau *online*, pembuatan alat-alat kampanye seperti poster cetak, poster elektronik, pamflet, info grafis dan video grafis, dan berjejaring yakni melebarkan dan menyatukan pergerakan.

BAB III

DESKRIPSI KASUS MUNIR

3.1 Pengantar

Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir menjadi contoh bagaimana negara ini memperlakukan suatu kasus pelanggaran HAM, sebuah kejahatan yang terindikasi melibatkan aparaturnya dengan menyalahgunakan kewenangannya.⁷⁷ Advokasi hukum yang diharapkan tak berjalan sesuai ekspektasi. Mulai dari penetapan tersangka tunggal dibalik konspirasi besar hingga ‘sakti’nya para saksi kunci untuk menghindar dari dakwaan. Padahal merujuk bukti-bukti temuan TPF Munir menyebutkan kasus tersebut bukanlah pembunuhan biasa, melainkan sebuah konspirasi yang melibatkan peran aktor negara. Oleh karena keterlibatan itu pula kasus ini menjadi mandek, karena para terduga dengan mengatasnamakan tugas negara, dapat menolak untuk diproses secara hukum atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan Munir.

Persidangan Pollycarpus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir pada 20 Desember 2005, dengan putusan 14 tahun penjara bagi Pollycarpus. Hal menarik dari argumen putusannya adalah terbuktinya Pollycarpus yang melakukan pembunuhan terhadap Munir tidak seorang diri, namun melibatkan orang lain. Secara samar dalam putusan tersebut juga disebutkan banyak kemungkinan petunjuk lain bagi investigasi

⁷⁷ KontraS, *Keadilan Versus Kepastian Hukum* (Jakarta: KontraS, 2006), hlm. 1.

lebih lanjut.⁷⁸ Namun pada keputusan akhir pengadilan tetap hanya memberi vonis kepada Pollycarpus sebagai pelaku tunggal pembunuhan Munir.

Pasca-Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap hak asasi manusia cenderung mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Berbagai institusi demokrasi yang menunjang pemajuan HAM terus dibangun dan diperbaiki. Meski nampak mengalami kemajuan, situasi HAM di Indonesia juga ternyata masih memprihatinkan. Kasus Munir menjadi contoh relevan pelanggaran HAM berat yang syarat akan impunitas. Hal ini disebabkan masih kuatnya kelompok lama dalam pusaran politik Indonesia, sehingga kekuasaan menjadi tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik.

3.2 Kronik Kematian Munir

Pada tahun 2004, enam tahun setelah reformasi dimulai, seorang pembela hak asasi manusia di Indonesia bernama Munir, diracuni dan terbunuh oleh racun arsenik. Pemerintah selaku pihak yang berwenang hingga kini belum berhasil dalam menarik mereka yang bertanggungjawab atas kematian Munir untuk divonis dan diadili secara hukum.⁷⁹ Sementara masyarakat hingga kini masih menunggu kejelasan kasus ini.

6 September 2004 Munir berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Belanda *via* Singapura menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974. Bersamaan dengan itu Pollycarpus

⁷⁸ KontraS, *Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap*, Laporan HAM 2005, (Jakarta: KontraS, 2006), hlm. 186.

⁷⁹ Mathew Easton, *Strategi-strategi untuk Bertahan: Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia di Kolombia, Indonesia, dan Zimbabwe*, 2010, Frontline.

Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda juga terbang ke Singapura dengan pesawat yang sama. Namun, saat itu Pollycarpus Budihari Priyanto bukan sedang bertugas sebagai pilot tetapi sebagai *extra crew*.

Sesampainya di Bandara, Munir *check in* dan mendapat tempat duduk di kursi dengan nomor 40G *Economy Class*, ketika Munir selesai *check in* datang terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto menghampiri sambil menyapa dan menawarkan tempat duduknya di *Business Class*. Setelah di atas, perubahan tempat duduk tersebut diberitahukan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto kepada Brahmanie Hastawati selaku *purser* dan selanjutnya Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di *Premium Class*.

Di dalam pesawat, sebelum pesawat tinggal landas kepada para penumpang termasuk Munir oleh Yeti Susmiarti sebagai pramugari disajikan *welcome drink*. Munir mengambil *orange juice* yang disajikan paling depan ketika berada di depan Munir. Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, tepatnya pukul 23.32 WIB pesawat pun mendarat di Bandara Changi Singapura dan seluruh *crew* pesawat dan termasuk Pollycarpus Budihari Priyanto turun, karena penggantian *crew*.

Di Bandara Changi tersebut, Munir menunggu kurang lebih 1 (satu) jam untuk transit dan selanjutnya kembali naik pesawat dan duduk pada *seat*-nya sendiri yaitu nomor 40G *Economy Class*. Selang 15 menit setelah *take off*, Munir mulai merasakan mules yang selanjutnya disusul muntah-muntah. Tiga jam kemudian setelah ditangani

oleh seseorang bernama dr. Tarmizi *purser* Madjib R. Nasution melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa Munir sakit, dan dua jam sebelum mendarat di Belanda, akhirnya Munir meninggal dunia.⁸⁰

Sementara itu di kantor KontraS pada Selasa 7 September 2004, sekitar pukul 13.00 WIB tengah berlangsung pertemuan korban dan keluarga korban peristiwa Trisakti dan Mei 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, Tanjung Priok 1984 dan penculikan 1997/1998 serta pembunuhan massal 1965/1966. Pertemuan tersebut digelar untuk menyikapi pengesahan DPR terhadap Undang Undang No.27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tidak berapa lama, Usman Hamid meminta waktu sejenak untuk menyampaikan berita, yang ternyata sebuah berita duka bahwa Munir telah meninggal dunia dalam penerbangan pesawat Garuda GA-974 menuju Amsterdam. Berita itu diterima *via* telepon dari Mouvty Makaarim yang menerima kabar dari staf KontraS lainnya Agus Suparman yang menerima kabar *via* telepon dari pihak Garuda Indonesia.⁸¹

Pada saat yang sama, berita “kepergian” Munir telah menyebar di berbagai kalangan termasuk media pers yang kemudian berdatangan ke kantor KontraS untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Selain persebaran berita lewat pesan singkat dan telepon, sore itu juga banyak media elektronik radio, televisi, dan juga internet memberitakan tentang kepergian sang pahlawan orang hilang itu. Bahkan beberapa

⁸⁰ Berdasarkan Putusan Majelis Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Pidana PN Jakarta Pusat No. 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dan PT DKI Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI Dengan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto

⁸¹ Edwin Partogi, Haris Azhar, Indria Fernida, Papang Hidayat dan Usman Hamid, “*Bunuh Munir*”, (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 31.

radio sejak sore itu menyiarkan *feature* khusus berupa duka yang mendalam atas kepergian Munir.⁸²

Ungkapan belasungkawa juga terus membanjiri rumah kediaman almarhum serta kantor tempat Munir bekerja, KontraS dan Imparsial. Belum lagi ungkapan duka yang juga dituangkan dalam berbagai rangkaian karangan bunga yang dikirim ke tempat kediaman almarhum, KontraS dan Imparsial. Ratusan karangan bunga itu dikirim oleh pejabat dan lembaga-lembaga negara, perwakilan negara sahabat, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, pimpinan media cetak dan elektronik, organisasi non pemerintah (ornop), organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), organisasi profesi, partai politik, perusahaan swasta nasional dan internasional, organisasi keagamaan dan masyarakat luas yang bersimpati dengan almarhum.⁸³

Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Kementrian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. Robbert Visser bekerja sama dengan dr. B. Kubat menerangkan telah dilakukan otopsi mayat terhadap Munir dan menyimpulkan bahwa kematian Munir diakibatkan konsentrasi arsen yang meningkat di dalam tubuh. Pada pakaian yang terkena muntahan yang dikenakan Munir, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri juga ditemukan adanya arsen.⁸⁴

⁸² *Ibid.*, hlm. 32.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 33

⁸⁴ Putusan Majelis Eksaminasi, *loc.cit.*,

Pada tanggal 12 September 2004 Jenazah Munir dimakamkan di kota Batu, Malang, Jawa Timur. Setelah beberapa bulan tepatnya 11 November 2004 barulah pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.⁸⁵ Indikasi adanya pembunuhan yang terencana itu pun segera mencuat ke publik dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

3.3 Advokasi Kasus

Otopsi yang dilakukan Netherlands Forensic Institute (NFI) menyimpulkan, kematian Munir disebabkan karena diracun dengan zat arsenikum dosis tinggi dan mematikan. Fakta ini kemudian langsung memunculkan dugaan kuat bahwa Munir dibunuh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dugaan ini memicu reaksi keras, protes dan kecaman atas perbuatan biadab yang mengakhiri hidup Munir. Kemudian kasus ini pun berlanjut hingga proses hukum yang mengaitkan nama Co-Pilot Pollycarpus.

Dalam pembahasan atas Legal Annotasi Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir (Kajian Terhadap Putusan PN Jak-Pus No. 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST tanggal 20 Desember 2005 AN. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto), Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa

⁸⁵ Lihat KontraS, “*Kronik Kasus Munir*”, Juli 2008.

Munir adalah sosok vokal yang sering melakukan kritik keras terhadap pemerintah terutama TNI dan BIN dalam mengambil langkah kebijakan, khususnya untuk permasalahan Hak Asasi Manusia.⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut, didapat suatu petunjuk bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap sikap vokal dan tindakan Munir. Oleh karena itu, sikap tidak senang itu harus diwujudkan seiring dengan munculnya daya bathin (*Motivation*) yang menghendaki aksi Munir harus dihentikan dengan cara berusaha menghilangkan Munir, artinya Munir harus dibunuh.⁸⁷ Dengan demikian, asumsi awal tentang kasus ini bahwa Munir sengaja dibunuh pun semakin menguat dan mulai menyeret nama-nama petinggi negara.

3.3.1 Pembentukan Tim Pencari Fakta

Gagasan pembentukan suatu tim investigasi independen menjadi diskursus yang integral dalam usaha pengungkapan kasus pembunuhan Munir itu sendiri. Gagasan ini kemudian bergulir tidak hanya dikalangan para aktivis NGO tetapi juga diserukan oleh banyak pihak, mulai dari komunitas korban pelanggaran HAM, para tokoh nasional, anggota legislatif, dan publik luas lainnya.⁸⁸ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai kalangan menghendaki adanya transparansi pada publik dalam kasus ini, untuk bisa dikawal secara bersama-sama proses hukumnya.

⁸⁶ Antonius Steven Sitohang, *op.cit.*, hlm. 63.

⁸⁷ Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), “*Risalah Kasus Munir Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum*” (Jakarta: KASUM, 2007), hlm. 233.

⁸⁸ KontraS, *Membongkar Konspirasi Kasus Munir* (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 2.

Presiden SBY ketika awal masa pemerintahannya mengakui bahwa kasus Munir harus menjadi prioritas kerja 100 harinya.⁸⁹ Namun demikian, komitmen pemerintah tersebut tidak serta merta bisa dipegang begitu saja tanpa kontrol dari publik. Terbukti kemudian sikap SBY tentang pembentukan suatu tim investigasi tidak terlalu jelas dan tegas.⁹⁰ Sekretaris Kabinet kala itu, Sudi Silalahi, pada tanggal 8 Desember 2004 menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunggu perkembangan penyelidikan kasus yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI. Ini merupakan sebuah bahasa politis untuk menyatakan “tidak” bagi tim investigasi independen.⁹¹

Bahkan saat itu Presiden SBY telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan koordinasi dengan pihak keluarga almarhum Munir untuk merancang usulan tim tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia.⁹² Akhirnya pada 23 Desember 2004, Presiden SBY pun mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir.⁹³ TPF ini dipimpin oleh Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi dan anggotanya dipenuhi oleh banyak aktivis LSM.⁹⁴ Menurut Keppres tersebut TPF bertugas membantu Polri melakukan penyelidikan, membuat

⁸⁹ *Kompas*, “DPR Bentuk Tim Khusus Kematian Munir”, 19 November 2004, dalam KontraS, *Membongkar Konspirasi Kasus Munir*, (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 2.

⁹⁰ KontraS, *loc.cit.*,

⁹¹ *Ibid.*, hlm.2.

⁹² *Ibid.*, hlm.3.

⁹³ *Jakarta Post*, “Susilo gives Christmas ‘gifts’ to Papua, Munir’s family”, 24 Desember 2004, dalam KontraS, *Membongkar Konspirasi Kasus Munir* (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 3.

⁹⁴ Asmara Nababan (Wakil Ketua), Bambang Widjojanto, Hendaradi, Usman Hamid, Munarman, Smita Notosusanto, I Putu Kusa, Kemala Candra Kirana, Nazaruddin Bunas, Retno LP Marsudi, Arif Navas Oegroseno, Rachland Nashidik, Mun’im Idris.

laporan kepada Presiden, dan nantinya Presiden yang mempublikasikan laporan tersebut.⁹⁵

3.3.2 Menelusuri Keterlibatan PT Garuda dan BIN

Pasca TPF Munir terbentuk, penyelidikan tahap awal dilakukan terhadap PT Garuda. Sebelumnya penyidik Polri telah meminta kesaksian dari beberapa anggota PT Garuda, mulai dari kru yang bertugas pada saat penerbangan pesawat GA 974, sampai pihak administrasi. Temuan-temuan dari hasil penyidikan tersebut selanjutnya didalami oleh TPF sebagai langkah awal menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Munir.

Awal Maret 2005, dari pertemuan TPF dengan direksi PT Garuda di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, telah ditemukan fakta bahwa manajemen PT Garuda tidak melakukan investigasi internal terhadap kematian Munir,⁹⁶ seperti tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Bahkan dari hasil investigasi, TPF mendapatkan bukti materil yang menunjukkan bahwa Aviation Security Garuda yakni Pollycarpus, *Vice President Corporation Security* Ramelgia Anwar dan Dirut Garuda Indra Setiawan bersekongkol dengan cara mengeluarkan surat-surat khusus guna menutupi kegagalan-kegagalan yang ditemukan TPF sebelumnya.⁹⁷

⁹⁵ *Jakarta Post*, *loc.cit.*,

⁹⁶ Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF, Desember 2005, dalam Kontras, Membongkar Konspirasi Kasus Munir, 2005, Jakarta, hlm. 4.

⁹⁷ www.detik.com, "TPF: Tiga Pejabat Garuda Sekongkol Racuni Munir", 3 Maret 2005.

Dalam pertemuan antara TPF dengan Presiden SBY, 3 Maret 2005, Ketua TPF, Brigjen Pol. Marsudi Hanafi —dalam laporan sementara— menyatakan bahwa TPF menyimpulkan terdapat cukup bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir merupakan suatu kejahatan konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan motif pribadi. Indikasinya ada persekongkolan antara pimpinan PT Garuda dalam menutup-nutupi perkara, berdasarkan sejumlah kejanggalan yang berhubungan pada tanggal 6 September 2004 dengan pihak-pihak di balik PT Garuda.

Selain itu, ditemukan pula sejumlah fakta yang saling berhubungan yang mengaitkan antara BIN dengan meninggalnya Munir. Setelah penyelidikan di dalam tubuh PT Garuda dianggap mencukupi, TPF berdasarkan temuannya mulai mengarah pada penyelidikan di Badan Intelijen Negara (BIN), suatu institusi yang selama ini sangat tertutup terhadap akses eksternal.⁹⁸ Meski pihak BIN menyatakan siap untuk diperiksa, namun pada kenyataannya hubungan kerja TPF dengan BIN kemudian bermasalah.

Masalah pertama yang dihadapi TPF adalah gagalnya pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Utama (Sesma) BIN, Nurhadi Djazuli. Penolakan Nurhadi untuk memenuhi panggilan TPF dan menilai TPF tidak berwenang melakukan penyelidikan yang merupakan wewenang Kepolisian Negara RI.⁹⁹ Persoalan kedua yang dihadapi TPF adalah keengganan BIN untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan untuk kasus Munir. Seorang anggota TPF, Asmara Nababan, mengakui hal ini;

⁹⁸ www.detik.com “SBY Persilakan TPF Munir Minta Keterangan ke BIN”, 3 Maret 2005.

⁹⁹ *Kompas*, “Mantan Sekretaris Utama BIN Tolak Diperiksa TPF Munir”, 28 April 2005.

“Tidak ada satupun dokumen yang diberikan BIN kepada TPF. Jelas bahwa BIN gagal bekerja sama dengan TPF....Pada tiga kali pertemuan dengan Presiden SBY, BIN menjanjikan akses yang lebih besar, namun pada kenyataannya mereka tidak memberikan akses kepada TPF untuk mendapat dokumen yang relevan dan gagal untuk mengatur pertemuan para pejabatnya dengan TPF”.¹⁰⁰

Masalah yang sama juga dihadapi TPF ketika berusaha memanggil mantan pejabat teras BIN, Muchdi PR (Mantan Deputy V BIN). Penyelidikan mulai mengarah kepada Muchdi PR karena mengingat TPF mendapat temuan dalam kerjanya yang membuktikan adanya hubungan sambungan telepon dari HP Pollycarpus ke Kantor BIN di masa kepemimpinan Hendropriyono, yaitu adanya sambungan telepon antara HP milik Pollycarpus dengan Kantor Deputy V BIN yang waktu itu dijabat oleh Muchdi PR. Terlacak ada 35 kali sambungan telepon antara keduanya. Meski belum diketahui pola hubungan keduanya, setidaknya fakta ini telah menggugurkan semua bantahan BIN sebelumnya yang menyatakan tidak memiliki kaitan apa pun dengan Pollycarpus.¹⁰¹

Meski TPF menghadapi batu sandungan, diantaranya keenganan BIN diawal untuk membuka akses penyelidikan TPF ke dalam BIN, pembuatan protokol bersama BIN – TPF yang memakan waktu yang lama, hingga resistensi beberapa (mantan) anggota BIN untuk dimintai keterangan, penyelidikan TPF tetap berlanjut sampai ke arah Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang saat kematian Munir masih menjabat

¹⁰⁰ Wawancara antara Human Rights First dengan Asmara Nababan, 16 Agustus 2005. Lihat Laporan *Human Rights First: After One Year: A White Paper on the Investigation and Prosecution in the Munir Murder Case*. 7 September 2005.

¹⁰¹ www.detik.com, “TPF Pertimbangkan Periksa Eks Kepala BIN Hendropriyono”, 18 Mei 2005, TPF Laporkan Kontak Pollycarpus dengan BIN, Kompas 19 Mei 2005. *Pollycarpus linked to BIN, says team, the Jakarta Post*, 19 Mei 2005.

posisi tersebut.¹⁰² Langkah ini diambil sebagai upaya mengetahui lebih jauh tentang keterlibatan aparat negara, apalagi setelah diketahui adanya kontak intensif antara Pollycarpus dengan Muchdi PR. Meski menghadapi resistensi, pemeriksaan terhadap Hendropriyono tetap merupakan keharusan. Apalagi Hendropriyono (dan Muchdi PR) memiliki pengalaman sejarah yang “khusus” dengan Munir.

Secara politik, Munir dan Hendropriyono mempunyai ketegangan berkaitan dengan beberapa kasus; mulai dari advokasi kasus Talangsari, Lampung hingga yang terakhir tentang peran Kepala BIN dalam hal tidak diperpanjangnya izin tinggal dan kerja Sidney Jones, Direktur *International Crisis Group* (ICG), sebuah lembaga internasional berbasis di Belgia yang pernah mengeluarkan laporan terkait dengan peran intelijen dalam sejumlah masalah sensitif di luar fungsinya.¹⁰³ Isu yang terakhir ini juga bersamaan dengan bersitegangnya Munir dan Kepala BIN Hendropriyono, seputar pernyataan dan laporan BIN tentang 20 LSM yang dituduh menjual Indonesia ke pihak asing.¹⁰⁴ Fakta-fakta tersebut semakin memperkuat dugaan TPF mengenai konspirasi yang melibatkan BIN.

¹⁰² KontraS, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁰⁴ *Kompas*, “Pernyataan Kepala BIN Dinilai Hidupkan Kembali Mesin Represi”, 31 Mei 2004, dalam, *Membongkar Konspirasi Kasus Munir*, (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 9.

3.3.3 Mandeknya Proses Hukum

Pada tanggal 24 Juni 2005 TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY. Dalam laporan tersebut beberapa rekomendasi diajukan seperti memberikan kesimpulan kurangnya kemauan Polri mengusut kematian Munir, keengganan BIN untuk membantu TPF, hingga beberapa kebijakan yang penting untuk mengaudit kinerja Polri pembentukan komisi khusus baru serta mengajukan beberapa nama yang perlu diselidiki lebih lanjut.¹⁰⁵ Laporan ini kemudian direspon oleh Presiden SBY, yang kemudian berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Laporan TPF juga didistribusikan ke pejabat terkait oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Mereka adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Menteri Hukum dan HAM.¹⁰⁶ Meski begitu, hingga saat ini laporan tersebut tidak pernah sampai kepada publik dikarenakan Presiden SBY selaku pihak yang memiliki wewenang tidak pernah mempublikasikannya.

Proses hukum kemudian dilanjutkan melalui Persidangan Pollycarpus pada 9 Agustus 2005, dan berakhir pada 20 Desember 2005 dengan putusan 14 tahun penjara bagi Pollycarpus. Meskipun temuan TPF menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai sebuah kejahatan konspirasi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih menunjukkan pembunuhan berencana terhadap Munir sebagai pembunuhan yang bersifat tunggal

¹⁰⁵ KontraS, "*Pasca TPF; Penyidikan Polri Mandeg*", dalam *Membongkar Konspirasi Kasus Munir*, (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 10.

¹⁰⁶ Media Indonesia, *Laporan TPF Didistribusikan ke Pejabat Terkait*, 28 Juni 2005, dalam, *Membongkar Konspirasi Kasus Munir*, (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 10.

(*individual crimes*).¹⁰⁷ Putusan yang cukup diluar dugaan, mengingat sejak awal persidangan seolah-olah logika pembunuhan Munir dibangun dengan motif personal dan tidak diarahkan pada pembuktian sebuah konspirasi politik, seperti temuan investigasi TPF.

Pasca putusan tersebut, tuntutan terhadap Polri untuk melakukan investigasi lanjutan kembali diajukan pihak keluarga korban, Suciwati bersama KASUM.¹⁰⁸ Akan tetapi, pada kenyataannya Polri sendiri hanya memberikan jawaban diplomatis bahwa mereka tidak akan menghentikan penyelidikan kasus Munir dan masih terus berkonsentrasi pada pemeriksaan terhadap Oedi Irianto, Yeti Susmiarty (keduanya pramugara dan pramugari Garuda), dan Ramelgia Anwar.

Kemudian Suciwati juga mendatangi Jaksa Agung, Abdurahman Saleh untuk meminta rekaman percakapan antara Pollycarpus dengan Muchdi PR yang dilakukan sebanyak 41 kali yang disebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Namun, Jaksa Agung sendiri hanya menjanjikan akan berkoordinasi dengan pihak Kapolri.¹⁰⁹ Menurut UU 36/1999 tentang Telekomunikasi ini, semua penyedia jasa telekomunikasi wajib merekam setiap pembicaraan antar pemakai telepon dan untuk kepentingan penyelidikan, pihak penyelenggara telekomunikasi wajib membuka

¹⁰⁷ KontraS, "*Pengadilan Pollycarpus*", dalam Membongkar Konspirasi Kasus Munir (Jakarta: KontraS, 2005), hlm. 10.

¹⁰⁸ Siaran Pers Kasum, *Evaluasi Satu Bulan Vonis Kasus Munir*, Jakarta, 23 Januari 2006, dalam Keadilan Versus Kepastian Hukum, hlm. 3.

¹⁰⁹ Kompas, "Kasus Munir; *Rekaman Percakapan Muchdi-Polly Bisa Diminta*", 27 Januari 2006, dalam Keadilan Versus Kepastian Hukum, hlm. 3.

rekaman tersebut atas permintaan Kapolri. Ini menunjukkan penyelidikan lanjutan kasus Munir lebih terhalang oleh tembok politik, ketimbang hambatan teknis.

Sementara itu, Setelah namanya sering muncul di media massa terkait kasus Munir, Muchdi PR mulai merespon balik. Langkah pertama Muchdi PR adalah dengan meminta bantuan hukum dari Tim Pembela Muslim (TPM) karena dia merasa resah dengan opini yang berkembang di masyarakat tentang kaitannya dengan kasus pembunuhan Munir.¹¹⁰ Muchdi juga melakukan upaya yang cukup ofensif dengan mempersiapkan gugatan berkaitan pemberitaan media massa yang dianggapnya tidak berimbang dan cenderung menghakimi dirinya. Meski demikian, Muchdi dan tim pengacaranya tidak merinci siapa saja yang rencananya akan digugat.¹¹¹ Selain itu, ia juga aktif mendatangi beberapa lembaga negara untuk menyangkal keterlibatannya dengan pembunuhan Munir, dan mengancam akan menuntut media massa yang kerap memberitakan tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Munir dengan gugatan pencemaran nama baik.¹¹²

Pada tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No. Putusan: 16/PID/2006/PT.DKI, kembali sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pada putusan itu pula Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan tidak mempersoalkan apakah racun arsenikum yang masuk ke lambung Munir melalui *orange juice* atau mie goreng seperti yang disebutkan pada

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

¹¹¹ Majalah *Tempo*, *Kasus Meninggalnya Munir; Muchdi PR Siap Gugat*, lihat *Kompas*, 17 Februari 2006. Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono: *Saya Belum Ngamuk*, Edisi 26 Februari 2006, dalam KontraS, *Keadilan Versus Kepastian Hukum*, hlm. 5.

¹¹² KontraS, *loc.cit.*,

putusan Tingkat Pertama dalam putusannya.¹¹³ Argumen tersebut menolak substansi materi yang dipersoalkan oleh tim pengacara Pollycarpus. Majelis hakim menegaskan:

“... bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan.”¹¹⁴

Namun sayangnya proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini tidak menghadirkan kesaksian atau barang bukti baru yang kurang pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal mengacu pada argumentasi majelis hakim di putusan tingkat pertama, banyak sekali kesaksian dan barang bukti yang harus ditindaklanjuti. Salah satu pihak yang perlu dikritik adalah Jaksa Penuntut Umum karena kewajiban untuk menghadirkan saksi ada di pihak mereka yang tidak juga mengajukan saksi baru, padahal Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, HM. Prasetyo menyatakan ada kemungkinan memanggil saksi lain.¹¹⁵

Saksi penting itu antara lain adalah Mantan Sekretaris Utama BIN, Nurhadi Djazuli, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria, Lie Khie Ngian, ahli kimia warga negara Belanda yang duduk di samping Munir saat di kelas bisnis dan Hian Tan alias Eni, seorang Pegawai Negeri Sipil yang tinggal di Papua, yang mengenal Pollycarpus sebagai agen intelejen dan pernah bertugas bersama dalam

¹¹³ Putusan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Basoeki SH (Ketua), Sri Handoyo SH, Mohammad Saleh SH MH, Rusdy As'as, SH MH, Untung Harjadi SH. Putusan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, 27 Maret 2006, dalam dalam KontraS, Membongkar Konspirasi Kasus Munir, 2005, Jakarta.

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Indopost, Saksi dari BIN Bisa Dipanggli Lagi; Di Persidangan Banding Kasus Munir*, 2 Januari 2006, dalam KontraS, Keadilan Versus Kepastian Hukum, hlm. 6.

suatu operasi intelejen. Hian Tan juga pernah diajak oleh Pollycarpus untuk bertemu dengan beberapa pejabat BAKIN/Badan Koordinasi Intelejen Negara (badan intelejen sebelum BIN), termasuk Nurhadi.¹¹⁶

Kendati fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan Pollycarpus sebagai terdakwa tunggal, tetapi proses hukum itu hingga kini tidak berjalan sesuai koridornya. Bahkan hingga tonggak kekuasaan telah berpindah kepada Presiden Jokowi, kelanjutan kasus tersebut masih kelabu. Dan yang tidak kalah mengecewakan adalah pembebasan bersyarat yang diterima oleh terdakwa Pollycarpus pada akhir 2014 lalu, dengan mengesamping penuntasan kasus tersebut.

3.4 Belenggu Kekuasaan Melanggengkan Impunitas

Upaya hukum melalui jalur advokasi tidak selalu berjalan sesuai koridor yang ada. Hal ini dikarenakan proses hukum yang syarat dengan intervensi, misalnya oleh kepentingan-kepentingan politik untuk melindungi orang-orang yang tersangkut pelanggaran HAM masa lalu. Situasi ini diasumsikan sebagai kelasalahpahaman Negara dalam melindungi dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan HAM. Kesalahpahaman negara dalam mengaplikasikan HAM kemudian menyebabkan hukum yang berjalan pada situasi tertentu tidak dapat menjangkau sesuatu yang seharusnya menjadi ranah pencarian dan penegakkan keadilan. Selain itu, masih kuatnya

¹¹⁶ Berkas Acara Pemeriksaan/BAP No. Pol: BP/10/VI/2005/Dit.I dengan tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005, dalam KontraS, Keadilan Versus Kepastian Hukum, hlm. 6.

pengaruh kelompok-kelompok kepentingan politik juga membuat penegakan HAM dengan jalur advokasi terhambat.

“Kapasitas Negara yang tidak paham soal HAM mengakibatkan hukum yang berlaku pun menjadi tidak jelas... Kondisi ini diperparah dengan masih kuatnya kelompok-kelompok kepentingan politik terutama pada level formal, dengan agenda-agenda yang eksploitatif, koruptif, dan tidak mementingkan kemanusiaan.”¹¹⁷

Kesalahpahaman negara mengaplikasikan HAM serta pengaruh kelompok-kelompok kepentingan juga kemudian diperparah oleh sarana partisipasi publik yang kurang. Akses yang terbatas merupakan penyebab dari kurangnya partisipasi publik yang berdampak pada tidak terakomodasinya aspirasi serta kritik publik kepada pemerintah dengan baik, sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah menjadi terhambat. Cara-cara yang diinisiasi oleh LSM-LSM, organisasi-organisasi buruh, mahasiswa, atau komunitas-komunitas yakni dengan kampanye-kampanye di media sosial, menggelar acara diskusi publik hingga aksi turun ke jalan, terlaksana tanpa memberi dampak untuk pemerintah. Hal ini tentu menghambat pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini telah melakukan beberapa terobosan guna merespon kritik-kritik tentang penegakkan HAM yang selama ini bermunculan. Hal tersebut terbukti dengan keluarnya beberapa wacana seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, dan peradilan HAM. Wacana RUU KKR muncul pada penghujung masa jabatan SBY sebagai pengganti KKR tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu rencana pembentukan kembali peradilan

¹¹⁷ Wawancara dengan Koordinator KontraS Haris Azhar pada 17 April 2015.

HAM juga mengemuka yakni peradilan HAM *ad hoc* untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kendati demikian, wacana RUU KKR maupun peradilan HAM *ad hoc* ini tak berjalan mulus. Yang pertama, wacana RUU KKR sejak awal kemunculannya telah mengalami pertarungan definisi makna dan isi rekonsiliasi itu sendiri dan menjadi perdebatan di kalangan atas. KKR ditafsirkan dengan pendekatan-pendekatan politis, sehingga mengaburkan makna rekonsiliasi yang seharusnya menjadi jalan pencarian keadilan para korban. Terakhir, muncul gagasan tentang pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi pada pertengahan tahun 2015. Tim ini terdiri dari beberapa organisasi, seperti Polri, Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Kementrian Hukum dan HAM.

KontraS beserta para tokoh pegiat hak asasi manusia kemudian menolak pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi karena dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Penolakan atas pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi selain disebabkan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas juga karena tidak dilibatkannya kepala negara. Padahal keterlibatan kepala negara dinilai penting karena memiliki wewenang yang kuat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di masa lalu.

“Pelebagaan atau institusinya harus diatur dengan baik dan jelas, jangan hanya persetujuan dari beberapa institusi saja yang tidak bisa diperkirakan ujungnya dimana. Pelebagaannya harus disusun dengan dan membawa otoritas kepala negara.”¹¹⁸

Sejatinya rekonsiliasi harus ditujukan untuk keadilan kepada korban bukan hanya untuk menciptakan harmonisasi hubungan antar lembaga. Hal lain yang perlu

¹¹⁸ Keterangan Amiruddin Al-Rahab dalam konferensi pers KontraS bersama para tokoh pegiat hak asasi manusia, Jakarta, 15 Juni 2015.

diperhatikan adalah tim gabungan ini seharusnya terbentuk atas dasar menghentikan praktik impunitas, memberi rasa keadilan terhadap korban dan pengungkapan sejarah.

“Tim gabungan ini seharusnya mendahulukan perlawanan terhadap impunitas, mengukuhkan hak-hak para korban dan membuka kebenaran historis mengenai pelanggaran HAM masa lalu sehingga membentuk kultur baru dalam hak asasi manusia di Indonesia.”¹¹⁹

Selain itu tidak diberikannya mandat kepada Komnas HAM untuk rekonsiliasi dan tidak bisa mengatasnamakan korban juga menjadi alasan lain penolakan terhadap pembentukan tim gabungan ini. Sementara itu, tim gabungan ini rencananya dibentuk untuk menyelesaikan tujuh berkas pelanggaran HAM yang saat ini ada pada Komnas HAM. Kasus itu antara lain, perkara Talang Sari, Wamena Wasior, penghilangan paksa orang, peristiwa penembakan misterius (petrus), G30S/PKI, kerusuhan Mei 98, dan pelanggaran HAM di Timor Timur.¹²⁰

Yang kedua, ide tentang peradilan HAM. Berbagai kegagalan dan kerapuhan pada mekanisme pra-peradilan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM selama ini, menambah keraguan berbasis fakta dan empiris terhadap peradilan HAM. Selain itu, keraguan konseptual mengenai sejauh mana peradilan HAM cukup memadai untuk menangani sebuah kejahatan dari rezim neo-fasis dan menghantarkan sebuah transisi yang benar-benar transisi dari rezim tersebut, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendukung paham legalis ini sendiri. Dari pengalaman-pengalaman empirik tersebut, maka dapat diukur dengan jelas kapasitas jalan legal ini dalam menghadapi para pelaku pelanggaran HAM.

¹¹⁹ Keterangan Robertus Robert dalam konferensi pers KontraS bersama para tokoh pegiat hak asasi manusia, Jakarta, 15 Juni 2015.

¹²⁰ CNN Indonesia, “*KontraS Tolak Pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi*”, Jakarta, 2015.

Selain itu, setidaknya terdapat lima problem dalam konsep transisi demokrasi (Robertus, 2014, hal. 88) yang mengindikasikan pengaruh kelompok lama masih signifikan dalam arena perpolitikan Indonesia yang baru. *Pertama*, argumen transisi didasarkan pada logika linear, yaitu dari politik otoriter/totaliter ke transisi demokrasi kemudian menuju ke demokrasi. Argumen ini mengabaikan kemungkinan keadaan politik dalam tahapan transisi demokrasi itu tidak menuju pada politik demokrasi tapi justru berbalik ke politik yang lain.

Kedua, keyakinan bahwa keringkahan ada pada situasi transisi dan bukan pada demokrasi itu sendiri. Di balik argumen ini ada pengandaian bahwa jika sudah masuk ke dalam situasi yang demokratis, tidak ada lagi bahaya dari kelompok lama yang otoriter. Padahal, demokrasi bukanlah suatu ruang kosong –meminjam istilah Claude Lefort—yang diperebutkan terus menerus oleh semua pihak bahkan pihak yang anti demokrasi sekalipun. Jadi, prinsip demokrasi adalah kontijensi.

Ketiga, argumen tentang demokrasi yang ringkih membuat kita terperangkap dalam suatu sikap menerima atau lebih tepatnya mengalami demi keselamatan proyek transisi demokrasi. Karena kita tahu bahwa para pelaku pelanggaran HAM masa lalu masih punya kekuasaan yang besar, kita terpaksa berkompromi demi keselamatan demokrasi yang baru mulai tumbuh. Kita juga lupa bahwa perjuangan meruntuhkan Orde Baru adalah perjuangan politik yang sesungguhnya terjadi, bukan kompromi politik dengan penguasa dan para pendukung rezim Orde Baru.

Keempat, fokus kekhawatiran dari kaum transisionis adalah adanya ancaman rezim lama untuk mengambil alih atau membalikan proses demokrasi yang telah di-

capai. Tetapi ancaman sesungguhnya bukan terletak pada ancaman fisik dari rezim lama tetapi justru rezim lama menggunakan mekanisme serta kelembagaan yang terbentuk dalam situasi politik yang lebih demokratis. Dengan kata lain, rezim lama mempunyai peluang yang sama dalam situasi politik yang demokratis ini untuk membangun kembali ideologinya itu melalui mekanisme kelembagaan yang ada.

Kelima, dari konsep transisi demokrasi itu muncul istilah *transisional justice*. Istilah ini juga bermasalah, misal, apakah *justice* hanya berlaku pada situasi transisi? Lalu, apakah dengan demikian kalau kita sudah demokratis maka tidak akan ada lagi *transisional justice*? Apakah benar ada keadilan yang khas dalam situasi transisi yang berbeda dengan konsep keadilan lainnya?¹²¹

Berdasarkan kelima asumsi mengenai transisi demokrasi tersebut maka proses peralihan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tak dapat dipisahkan dan menjadi landasan yang fundamentalis dalam menentukan penegakkan HAM. Demokrasi itu sendiri seiring dengan rezim berkuasa mengalami definisi ulang yakni interpretasi rezim tersebut dalam mengemas demokrasi. Misalnya, pada masa Orde Lama konteks demokrasi diistilahkan dengan Demokrasi Terpimpin. Kemudian pada masa Orde Baru didefinisikan ulang sesuai hegemoni yang dibawanya yakni Demokrasi Pancasila. Dengan demikian, definisi dan interpretasi tiap rezim tentang demokrasi pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap implementasi HAM di era transisi demokrasi.

¹²¹ Robertus Robert, *Op.cit.*, hlm. 88-89.

Menilik pada perspektif legalistik, pelanggaran HAM di Indonesia terjadi dikarenakan ketika perlindungan terhadap HAM terlihat memadai, pelaksanaan dan penegakkannya sering kali lemah. Situasi di mana perangkat-perangkat hukum hak asasi manusia sudah mengalami kemajuan dan reformasi kelembagaan juga terus berlangsung, akan tetapi pada ranah yang krusial yakni implementasi, penegakkan HAM sarat dengan intervensi politik dan rentan terjadi pelanggaran.

Kasus Munir menjadi tolok ukur bagaimana kesewenangan Negara terhadap hak asasi manusia. Fakta persidangan menyebutkan Munir adalah sosok vokal yang sering melakukan kritik keras terhadap pemerintah terutama TNI dan BIN dalam mengambil langkah kebijakan, khususnya untuk permasalahan hak asasi manusia.¹²² Hal ini menjadi petunjuk bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap sikap vokal dan tindakan Munir. Oleh karena itu, sikap tidak senang itu harus diwujudkan seiring dengan munculnya daya bathin (*Motivation*) yang menghendaki aksi Munir harus dihentikan dengan cara berusaha menghilangkan Munir, artinya Munir harus dibunuh.¹²³ Belum lagi kesimpulan TPF menyebutkan bahwa, terdapat bukti yang cukup kuat peristiwa meninggalnya Munir merupakan suatu kejahatan konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan motif pribadi. Indikasinya ada persekongkolan antara PT Garuda dan BIN.

¹²² Legal Annotasi Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir (Kajian Terhadap Putusan PN Jak-Pus No. 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST tanggal 20 Desember 2005 AN. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto)

¹²³ Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), “*Risalah Kasus Munir Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum*” (Jakarta: KASUM, 2007), hlm. 233.

PT Garuda merupakan maskapai penerbangan ternama di Indonesia dengan fasilitas dan pelayanan yang tak perlu diragukan. Kasus Munir menunjukkan bahwa kesaktian BIN memiliki koneksi cukup kuat bahkan dengan maskapai penerbangan sekaliber Garuda Indonesia. Tampak jelas bagaimana pembunuhan ini direncanakan begitu sistematis dan penuh perhitungan. Bagaimana oknum-oknum BIN melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan demi menghilangkan nyawa seseorang yang dirasa mengancam karirnya, dengan alibi mengatasnamakan kepentingan dan keamanan negara.

Keadilan seolah tunduk pada kekuasaan, di mana para pelaku dengan leluasa dapat menghindar atau bahkan menolak untuk diperiksa atas dugaan keterlibatannya. Apalagi saat ini salah satu nama yang santer disebut sebagai aktor intelektual kasus Munir yakni Hendropriyono memiliki pengaruh kuat di pemerintahan Jokowi-JK, semakin membuat lesu kasus Munir akan tuntas. Hal tersebut menunjukkan belenggu kekuasaan merupakan indikasi berlangsungnya kekebalan hukum para pelaku, dan kasus Munir adalah representasi bagaimana penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sering kali terhalang tembok besar bernama impunitas.

Perangkat hukum dan lembaga hak asasi manusia pasca reformasi memang tampak lebih baik sebagai jaminan penyelenggaraan hak asasi manusia akan lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut seperti yang diasumsikan oleh Andrew Rosser dalam tulisannya yang berjudul “Memahami pelanggaran HAM di Indonesia”, dalam perspektif legalistik ia menyebutkan bahwa pelanggara HAM di

Indonesia lebih disebabkan oleh militer dan polisi (pelaku utama pelanggaran hak-hak sipil dan politik) tidak bertanggung jawab, Kejaksaan Agung dan sistem peradilan tidak efisien, serta Komnas HAM memiliki kekuasaan dan mandat yang terbatas.¹²⁴

3.5 Penutup

Sejak awal kasus ini mencuat kecurigaan publik sudah mengarah pada opini bahwa Munir mati karena dibunuh. Pasca media ramai-ramai membicarakan hal ini, Negara yang pada saat itu dibawah pemerintahan SBY pun segera merespon dengan membentuk Tim Pencari Fakta. Penelusuran Tim Pencari Fakta ternyata mengarah pada keterlibatan Badan Intelijen Negara yakni adanya upaya penghilangan nyawa secara paksa. Setelah menetapkan beberapa orang terduga, meski fakta-fakta pada persidangan menunjukan adanya konspirasi, namun akhirnya hanya ada satu nama yakni Pollycarpus seorang co-pilot Garuda Indonesia yang dijadikan terdakwa. Kejanggalan proses hukum di pengadilan tak hanya berhenti disitu. Beberapa orang tersangka bahkan memiliki keleluasaan menolak untuk diperiksa. Intervensi politik terhadap hukum membuat advokasi kasus ini akhirnya mandek.

Selain itu, kesalahpahaman negara dalam mengaplikasikan hak asasi manusia membuat proses hukum sarat dengan intervensi, misalnya oleh kepentingan politik yakni untuk melindungi aktor-aktor intelektual sebagai dalang pembunuhan Munir. Kesalahpahaman dalam mengintepretasi hak asasi manusia juga menyebabkan hukum

¹²⁴ Andrew Rosser, *Op.cit.*, hlm. 37.

yang berjalan di tempat dan tidak dapat menjangkau sesuatu yang harusnya menjadi ranah pencarian dan penegakkan keadilan. Sementara itu, sarana partisipasi publik yang kurang dan akses yang terbatas berdampak pada tidak terakomodasinya aspirasi serta kritik publik kepada pemerintah, sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah menjadi terhambat dan transparansi hukum kasus Munir pun ikut kena imbasnya.

Kondisi ini diperparah dengan masih kuatnya pengaruh kelompok lama dan aktor-aktor intelektual mengintervensi kebijakan negara dalam penegakkan hak asasi manusia. Hendropriyono salah satu aktor intelektual dalam kasus Munir misalnya, ia saat ini merupakan orang penting di istana negara dan menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai penasihat kepresidenan. Belenggu kekuasaan merantai keadilan dan melanggengkan impunitas yang membuat kasus ini semakin jauh dari harapan untuk dapat dituntaskan.

BAB IV

STRATEGI KAMPANYE ADVOKASI

PENUNTASAN KASUS MUNIR

4.1 Pengantar

Setelah sekian lama kasus Munir bergulir, proses hukum masih seperti jalan ditempat. Bahkan, Pollycarpus sang eksekutor sudah kembali menghirup udara bebas pada 28 November 2014 lalu. Pembebasan bersyarat tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang tidak berkomitmen dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.¹²⁵ Kondisi ini membuat para pegiat HAM yang terdiri atas LSM, mahasiswa, hingga simpatisan merespon dengan berbagai macam aksi yang ditujukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah karena hanya melihat kasus ini dari aspek yuridis dengan mengabaikan fakta-fakta yang mengarah pada substansi perkara.

Menilik rincian fakta dan motif dugaan latar belakang pembunuhan Munir ini bukan kasus pembunuhan biasa. Nama-nama yang terseret dalam kasus konspiratif ini juga semakin menguatkan ada pihak-pihak yang sengaja ingin menghilangkan nyawa Munir. Keterlibatan nama-nama petinggi negara yang diduga menjadi penyebab mandeknya kasus Munir pada ranah hukum. Meskipun usaha advokasi hukum masih terus dilakukan, tetapi jalan menuju penuntasa kasus ini masih menemui terjal. Untuk itu, proses advokasi hukum juga hendaknya memerlukan dukungan publik karena

¹²⁵ Tempo.co, “KontraS Kecam Pembebasan Pollycarpus”, 30 November 2014.

dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara. Advokasi hukum untuk kasus yang konspiratif dan melibatkan petinggi negara seperti ini memprasyaratkan adanya dukungan publik, karena level perkara ini sangat tinggi. Oleh karena itu, kampanye merupakan salah satu cara efektif untuk meraih dukungan publik tersebut.

“...advokasi hukum tidak dapat berjalan sendiri dan harus didukung dengan keterikatan serta ketertarikan publik, karena publik lah yang akan membuat kasus ini tetap diingat oleh pemerintah... proses hukum kasus ini juga tidak hanya diawasi oleh KontraS maupun Suciwati saja, tetapi oleh masyarakat juga. Untuk itu, penting untuk terus memberikan perkembangan kasus ke masyarakat melalui media”.¹²⁶

Kampanye menjadi sangat penting dilakukan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM untuk mendapatkan perhatian publik dan membangun keterikatan rasa. Khusus kasus Munir, publik hingga saat ini selalu menanti kelanjutan proses hukum yang berjalan. Untuk itu, kampanye dilakukan sebagai cara untuk terus memberikan *update* terbaru perkembangan kasus. Media yang dapat digunakan sebagai sarana kampanye beragam macamnya, mulai dari siaran pers media baik itu cetak maupun elektronik, diskusi di kampus-kampus atau di komunitas-komunitas, pertunjukan seni, hingga aksi turun ke jalan. Kampanye juga dilakukan dengan mode *online* yakni di media sosial. Selain itu, lobi-lobi juga merupakan langkah strategis untuk mendapatkan dukungan dunia internasional, sebagai desakkan kepada pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

¹²⁶ Wawancara dengan Koordinator KontraS Haris Azhar pada 17 April 2015.

4.2 Kampanye Konvensional

Kampanye konvensional merupakan metode kampanye yang lazim dilakukan oleh para pelaku kampanye. Kampanye konvensional diantaranya dilakukan dengan media kampanye seperti spanduk, baliho, atau poster. Kampanye konvensional juga dilakukan melalui media siaran pers dan aksi turun ke jalan.¹²⁷ Metode kampanye ini biasanya menyasar pada kalangan umum atau tidak spesifik. Sedangkan target dari kampanye konvensional cenderung vertikal atau kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan.

KontraS melaksanakan metode kampanye konvensional melalui siaran pers dan aksi turun ke jalan. Kegiatan ini merupakan bagian dari cara mempublikasikan kepada masyarakat mengenai kasus Munir. Akan tetapi saat ini porsi untuk kampanye konvensional sangat minim, karena momentum untuk melakukan siaran pers—kasus Munir—mengacu pada momentum pemberitaan.

4.2.1 Siaran Pers

Media merupakan sarana kampanye yang cukup efektif karena mencakup ke publik secara luas. Di era global ini, arus informasi dengan begitu mudah masuk ke rumah-rumah *via* televisi, radio, atau koran. Siaran pers menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebuah berita, apalagi kasus ini menimpa seorang aktivis yang cukup vokal dalam menyuarakan HAM dan dikenal memiliki ‘musuh’ dari kalangan elit-elit penguasa.

¹²⁷ Arnold Steinberg. *Political Campaign Management*. (New York: Lexington Books, 1976), hlm. 88.

Gambar 4.1
Foto konferensi pers KontraS



Sumber: foto konferensi pers KontraS merespon kelanjutan kasus Munir, 2015.

Hingga saat ini, tak dipungkiri bahwa salah satu faktor penting bagi kasus ini untuk terus ‘hidup’ adalah karena peran media yang menjadi ‘alarm’ bagi pemerintah bahwa kasus ini belum sepenuhnya tuntas. Berita-berita tentang Munir terus mereka *update* ke masyarakat untuk diawasi bersama-sama perkembangannya. Siaran pers tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan itu sendiri, sebagai contoh adalah pada saat awal kasus ini mencuat, siaran pers menjadi ‘*trigger*’ bagi berita pembunuhan Munir. Dalam siaran pers terkandung strategi kampanye seperti bagaimana kalimat-kalimat yang hendak diucapkan itu mampu menarik perhatian publik, sehingga publik tertarik untuk peduli terhadap penyelesaian kasus.

Tabel 4.1
Siaran Pers Kasus Munir
Periode 2005-2015

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	10	11	11	8	13	3	3	-	2	3	3
Total	67										

Sumber: hasil analisis peneliti

Menilik pada tren pada tabel di atas, dapat kita lihat terjadi penurunan drastis jumlah siaran pers dari tahun ke tahun. Pada periode awal kasus Munir mencuat dan menjadi perhatian publik, KontraS membuat siaran pers sebanyak sepuluh kali pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi sebelas kali. Di tahun 2008 menurun menjadi delapan kali, lalu melonjak pada 2009 menjadi tiga belas kali karena pada saat itu terjadi peningkatan eskalasi pada saat pelaporan oleh Muchdi PR terhadap Usman Hamid atas pencemaran nama baik, dan juga Peninjauan Kembali (PK) terhadap Muchdi PR. Periode 2010 dan 2011 menunjukkan penurunan drastis masing-masing tiga siaran pers. Kemudian pada tahun 2012 bahkan tidak ada sama sekali siaran pers yang dilakukan oleh KontraS. Di tahun 2013 siaran pers dilakukan sebanyak dua kali, serta tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing tiga kali dilakukan siaran pers. Jumlah total siaran pers yang dilakukan KontraS semenjak periode 2005 hingga 2015 adalah enam puluh tujuh kali.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan siaran pers KontraS tidak dilakukan secara konsisten. Siaran pers yang merupakan bagian dari metode kampanye konvensional hanya dilihat secara momentum. Akibatnya, cara ini pun menjadi kurang efektif jika melihat konteks konsistensi karena memiliki efek yang hanya sesekali dan tidak berkesinambungan.

4.2.2 Aksi Turun ke Jalan

Selain siaran pers, strategi yang dilakukan adalah aksi turun ke jalan. Strategi ini merupakan bagian dari kampanye model klasik dalam menyuarakan aspirasi. Aksi turun memprasyaratkan kepedulian yang didasari kesadaran dari tiap individu bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah hal yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Aksi turun ke jalan yang dilakukan untuk mendukung advokasi kasus Munir diantaranya adalah Aksi Kamisan.

Berbeda dengan aksi turun ke jalan atau demonstrasi lainnya yang identik dengan orasi atau yang paling parah yakni membakar ban dan membuat kemacetan, Aksi Kamisan dilakukan hanya dengan berdiam diri sambil menuangkan tulisan-tulisan ke dalam berbagai media yang ada, mulai dari payung hitam hingga selebaran-selebaran. Bahkan, belakangan ini Aksi Kamisan mengusung tema *fun campaign* dengan pertunjukan musik maupun teatrikal, yang bertujuan untuk menarik perhatian publik sehingga memunculkan rasa keingintahuan dan kepedulian terhadap apa yang sedang diperjuangkan.

Aksi Kamisan adalah aksi berdiri dan diam di depan Istana negara di Jakarta, yang merepresentasikan sebuah simbol kekuasaan. Aksi ini dilakukan tiap Kamis sore oleh para korban maupun kerabat korban kasus-kasus pelanggaran HAM atau tindak kekerasan oleh aparat yang mengatasnamakan negara. Aksi ini ditujukan sebagai upaya menuntut penuntasan kasus-kasus yang menimpa mereka dan sanak keluarga mereka secara adil. Tindakan ini juga penting untuk menunjukkan bahwa mereka, para korban pelanggaran HAM dan tindak kekerasan itu ada, dan masih menjadi warga negara Indonesia.

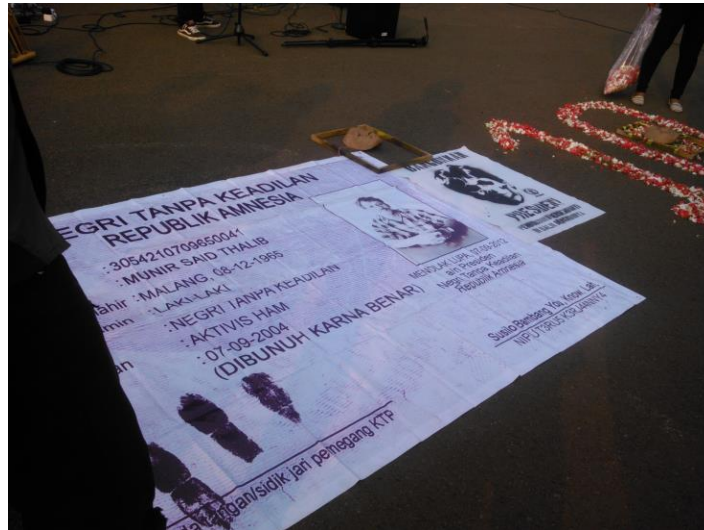
“...Meskipun kami hanya berdiri dan diam tapi kami tetap ada dan kami tetap menuntut hak kami sebagai manusia dan sebagai warganegara... Kami harus berdiri, sebagai simbol bahwa kami adalah warganegara yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan bahwa kami punya hak. Kami sadar bahwa Hak kami tidak gratis bisa didapat, terlebih-lebih ketika pemerintah dan masyarakat membiarkan kami dan tidak mendengar kami... Kami diam menunjukkan bahwa kami bukan perusuh, kami bukan warga negara yang sulit diatur dan bukan warganegara yang membuat bising telinga. Kami percaya dengan diam-pun kami tidak kehilangan hak kami. Walaupun kami diam, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi hak-hak kami...”¹²⁸

Aksi Kamisan adalah salah satu media kampanye kasus Munir yang memiliki efek cukup signifikan terutama di mata internasional. Jika KASUM merupakan ruang konsolidasi di arena hukumnya, Aksi Kamisan merupakan ruang konsolidasi untuk para kerabat dan simpatisan Munir dalam menyuarakan perjuangan mereka. Selain itu, Aksi Kamisan juga menjadi salah satu sarana ‘mimbar bebas’ untuk menyuarakan aspirasi dan protes. Aksi Kamisan tiap minggunya mengusung tema berbeda yang

¹²⁸ Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tragedi Trisakti Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998, Tragedi Penculikan Aktivis 1997/1998, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Talangsari Lampung 1989, Tragedi 1965, Tragedi 27 Juli 1996, Pembunuhan Munir, dalam Profil Kamisan, *Membisu, Berdiri Demi Keadilan*, Jakarta, 25 Januari 2006.

disesuaikan dengan isu yang sedang menjadi pembahasan, sesuai konteks kasus yang sedang dikampanyekan kepada publik.

Gambar 4.2
Aksi Kamisan ke-364



Sumber: dokumentasi peneliti pada Aksi Kamisan ke-364

Salah satu Aksi Kamisan yang didedikasikan untuk alm. Munir adalah pada Aksi Kamisan 4 September 2014, memperingati 10 tahun pembunuhan Munir, digelar aksi tabur bunga di atas kartu tanda penduduk Munir berukuran raksasa sebagai bentuk belasungkawa atas penanganan kasus yang tak kunjung pasti. Selain itu, dilakukan pula orasi untuk mengenang jasa Munir dalam memperjuangkan HAM terutama para keluarga korban peristiwa 1965, Talangsari, Tanjung Priok, dan penculikan aktivis 1998. Aksi Kamisan kemudian ditutup dengan pertunjukan musik yang menyanyikan lagu-lagu yang didedikasikan untuk almarhum Munir.¹²⁹

¹²⁹ Aksi Kamisan ke-364 mengusung tema “10 Tahun Pembunuhan Munir”, Jakarta, 4 September 2014.

4.2.3 Lobi-lobi

Selain siaran pers dan aksi turun ke jalan, strategi yang tak kalah penting dalam agenda kampanye KontraS dalam kasus Munir adalah lobi-lobi. Lobi-lobi di sini maksudnya adalah melobi pemerintah dalam konteks melakukan tekanan, meyakinkan, serta menghadirkan data dan fakta. KontraS melalui KASUM yang merupakan ruang konsolidasi, meminta kepada Presiden agar penegakan kasus ini berjalan sesuai koridor hukum yang benar.

Sementara itu, Suciwati berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk menerima Human Rights Award 2006 yang diberikan kepada dirinya dan Munir¹³⁰ oleh *Human Rights First*, sebuah organisasi HAM Internasional. Keberangkatannya kali ini selain untuk menerima penghargaan, juga dipersiapkan untuk bertemu dengan beberapa pejabat PBB, pemerintah AS, dan parlemen AS. Langkah ini diambil untuk melobi komunitas HAM Internasional untuk kasus Munir, karena bila penanganan di dalam negeri gagal, maka kasus ini akan menjadi perhatian Dewan HAM PBB.¹³¹ Selain dukungan Internasional, kunjungan ke New York juga menghasilkan berita kasus Munir pada editorial *New York Times* edisi 15 Oktober 2006 yang berjudul *Poisoned Justice*.¹³²

¹³⁰ *Kompas*, Suciwati dan Munir Raih Penghargaan HAM 2006; Undangan Diajak Kirim Petisi ke Presiden Yudhoyono, 18 Oktober 2006, dalam Suara Pembaruan, *Munir Dapat Penghargaan HAM; Internasional Dukung Perjuangan Suciwati*, 20 Oktober 2006, dalam KontraS, Keadilan Versus Kepastian Hukum, hlm. 14.

¹³¹ KontraS, *Respon Internasional (Masih) Kuat*, dalam Keadilan Versus Kepastian Hukum, 2006, Jakarta: KontraS, hlm. 14.

¹³² *Ibid.*, hlm. 15.

Strategi kampanye dengan lobi-lobi ini membuahkan hasil diantaranya adalah Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPF Munir pada awal kasus ini mengemuka. Lobi-lobi juga berhasil menggalang dukungan dunia Internasional, yang bisa jadi tekanan moral dan juga politik bagi pemerintah Indonesia. Meski sejak awal kasus Munir sudah menjadi perhatian internasional karena kematiannya yang sangat tidak lazim, meninggal di luar Indonesia, diotopsi di Belanda, dan terlebih lagi Munir memang cukup dikenal di komunitas internasional atas kiprahnya di bidang HAM.

Tabel 4.2
Lobi-lobi kasus Munir

Lobi-lobi	Tahun	Tujuan
Suciwati mendatangi Jaksa Agung	2006	Meminta rekaman percakapan antara Pollycarpus dengan Muchdi PR
Suciwati berangkat ke New York	2006	Melobi komunitas HAM Internasional untuk kasus Munir
Kontras desak PBB	2007	Mendesak PBB agar mendukung SBY selesaikan kasus Munir
Suciwati ke Kongres AS	2008	Mengklarifikasi lobi BIN
Sahabat Munir menagih janji SBY	2012	Menagih janji SBY untuk membuktikan ucapannya
Suciwati mengingatkan Presiden	2012	Mengingatkan Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus Munir

Sumber: hasil analisis peneliti

4.3 Kampanye Populer

Siaran pers, aksi turun ke jalan dan lobi-lobi adalah strategi kampanye dengan sasaran vertikal yaitu pemerintah selaku penyelenggara negara. Sedangkan pada ranah publik, diperlukan suatu aksi yang dapat menginformasikan lebih detail mengenai kronik kasus Munir ini. Untuk itu, KontraS melalui Biro Kampanye dan Jaringan merancang strategi kampanye yang dapat memberikan kebutuhan masyarakat akan informasi itu dengan kampanye populer.

Kampanye populer adalah kampanye yang dilakukan dengan cara-cara kreatif dan inovatif yang bersifat kontemporer, dan bertujuan pesan dari apa yang hendak disampaikan itu dapat mudah dimengerti. Kampanye populer diantaranya dilakukan dengan diskusi atau seminar, kampanye di sosial media, pertunjukan seni musik dan teatrikal, dan menerbitkan buku atau komik. Sasaran yang dituju kampanye populer biasanya adalah usia-usia muda yakni kalangan mahasiswa, pelajar, atau pun orang-orang yang tergabung dalam komunitas tertentu. Oleh karena itu, kampanye populer ini akrab dengan *fun campaign* dan disesuaikan dengan konteks kekinian.

“Kampanye populer itu kampanye yang dilakukan untuk mempopulerkan isu, tapi dengan cara-cara kreatif, fun, dan mudah dimengerti... jadi, konten yang dibuat juga biasanya bahasanya tidak terlalu berat, tapi dengan bahasa yang lebih akrab dalam keseharian.”¹³³

Kampanye populer juga menjadi salah satu strategi kampanye yang dipakai KontraS dalam menjalankan agenda kampanye kasus Munir. Bukan hanya KontraS atau pun kerabat Munir yang berhak mengetahui kronik kasus maupun perkembangan

¹³³ Wawancara dengan Luh Putu Kusuma Ririen, Biro Kampanye dan Jaringan KontraS, pada 28 oktober 2014 di kantor KontraS.

kasus ini, tapi publik juga berhak untuk turut mengawasi. Oleh karena itu, kampanye populer merupakan strategi untuk ‘membentangkan sayap’ agar isu ini populer di masyarakat.

“...kampanye itu sendiri merupakan cara untuk mempopulerkan isu kepada publik, supaya publik tahu dan peduli bahwa orang-orang yang bekerja untuk HAM seperti Munir ini patut diapresiasi dan didukung perjuangannya, karena rentan dihilangkan nyawanya atas nama negara... selain itu, juga untuk mengingatkan bahwa kasus Munir ini belum sepenuhnya tuntas.”¹³⁴

Kampanye populer yang dilaksanakan KontraS dalam menjalankan strategi kampanye untuk kasus Munir diantaranya adalah dengan mengadakan diskusi publik di kampus-kampus atau komunitas, kampanye di media sosial seperti *twitter*, *youtube* dan *facebook*, pertunjukan teatrikal, dan menerbitkan komik Munir.

4.3.1 Diskusi Publik

Diskusi publik tentang Munir menjadi agenda yang sangat penting karena menjadi salah satu akses bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kasus ini bisa menjadi begitu rumit dan mengapa proses hukumnya hingga kini bermasalah. Agenda kampanye dengan metode diskusi publik seperti ini gencar dilaksanakan di kampus-kampus dan komunitas-komunitas anak muda. Dalam diskusi publik juga biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang dapat menjadi stimulan bagi mereka untuk kemudian menaruh perhatian lebih terhadap kasus Munir.

¹³⁴ Wawancara dengan Chrisbiantoro, Koordinator Bidang Mobilisasi Sikap dan Opini, pada 4 Maret 2015 di kantor KontraS.

Gambar 4.3
Diskusi: “Obrolan Anak Muda” di SMAN 25 Jakarta



Sumber: Dokumentasi peneliti.

Diskusi “Obrolan Anak Muda” merupakan rangkaian kegiatan yang diadakan di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk mempopulerkan hak asasi manusia di kalangan pelajar, termasuk mempopulerkan sosok Munir sebagai ikon pembela HAM Indonesia. Selain dilaksanakan di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus, diskusi publik juga dilaksanakan di kantor KontraS dengan mengundang pembicara seperti dari KASUM, Komnas HAM, Polri, bahkan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari TPF Munir. KontraS juga menyebar undangan terbuka untuk para audiens dengan tujuan agar masyarakat juga turut mengawasi perkembangan kasus Munir. Diskusi publik biasanya mengundang antusias masyarakat untuk datang terutama bagi mereka yang menaruh perhatian dan simpatik terhadap kasus Munir, karena kebutuhan akan informasi kurang tercukupi di media-media mainstream.

4.3.2 Kampanye Media Sosial dan Messenger

Di era globalisasi seperti sekarang ini arus informasi berlangsung tanpa batas. Kemudahan untuk mengakses internet menjadi alasan pertukaran informasi berjalan begitu cepat. Media sosial adalah salah satu media yang dapat memudahkan akses informasi maupun pengetahuan itu sampai kepada para pengguna internet (*user*). Di Indonesia, hampir semua kalangan muda merupakan pengguna internet, khususnya media sosial. Hal terbukti bahwa Indonesia merupakan *user* aktif *facebook* dan *twitter* terbanyak di dunia.

Melihat geliat tersebut, maka KontraS berusaha memaksimalkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan kampanye. Selain karena mempunyai daya tarik yang mudah diakses, kampanye di media sosial juga tidak mengeluarkan banyak biaya.

“...kampanye di media sosial itu selain mudah dan murah, juga cukup efektif dalam mempengaruhi publik... NGO-NGO di luar negeri juga banyak memanfaatkan media sosial untuk sarana kampanye mereka, dan itu sangat efektif dan efisien.”¹³⁵

Dalam melaksanakan agenda kampanye, KontraS menggunakan media sosial seperti *facebook* dan *twitter* yakni mengadakan lomba-lomba berkaitan dengan kasus Munir. Selain itu, *facebook* dan *twitter* juga dijadikan saran untuk terus memberikan *update* mengenai kasus Munir kepada publik dan juga informasi penyelenggaraan diskusi-diskusi, aksi, atau pun karya-karya berkaitan dengan Munir. KontraS juga

¹³⁵ Wawancara dengan Alves Fonataba, Biro Kampanye dan Jaringan, pada 8 September 2014 di kantor KontraS.

memanfaatkan *youtube* dalam kampanyenya untuk mewadahi dan menyalurkan para simpatisan yang mengekspresikan atau menampilkan karyanya tentang Munir.

Selain media sosial, KontraS juga memanfaatkan teknologi *line messenger* seperti SMS, WhatsApp, LINE, dan Blackberry Messenger. Metode yang digunakan yaitu dengan mengirim secara *blasting* atau menyebar dan *broadcast messege* kepada kontak-kontak yang merupakan orang-orang atau kelompok bagian dari jaringan KontraS. Pesan yang *diblasting* ini biasanya berupa informasi *update* seputar kasus atau pun seruan untuk melakukan aksi atau gerakan. Meski sifatnya *grassroot* tetapi cara ini kurang efektif, karena sebegus apapun konten yang disampaikan, cara ini kurang memberikan ketertarikan psikis atau kurang membangun simpati dan empati bagi pembaca dan cenderung sebatas propaganda.

4.3.3 Karya Seni

Sejak meninggal pada 2004 silam, banyak karya-karya yang didedikasikan untuk alm. Munir. Karya-karya itu mulai dari lagu, puisi, komik, tulisan, *art*, hingga pertunjukan teatrikal. Karya-karya tersebut berasal dari berbagai macam kalangan, dan dibuat secara sukarela. KontraS berperan untuk mewadahi karya-karya tersebut dan mendokumentasinya sehingga menjadi arsip yang menarik untuk dilihat atau pun didengar dan membangkitkan kepedulian publik pada kasus Munir.

Selain menjalin kerjasama dengan komunitas seperti Taring Babi ataupun komunitas Sudut Kota di bidang *art & gravity*, serta bidang seni musik dengan band-

band *indie* seperti Marjinal. KontraS juga bekerjasama dengan Social Movement Institute menerbitkan sebuah komik berjudul “Mereka Bunuh Munir!” pada awal September 2014 lalu. Terbitnya komik itu disusul dengan *launching* disertai diskusi publik di kampus-kampus untuk mengenalkan karya tersebut kepada mahasiswa.

Gambar 4.4
Launching Komik “Mereka Bunuh Munir”



Sumber: Dokumentasi Biro Kampanye dan Jaringan KontraS, Launching Komik “Mereka Bunuh Munir” September 2014.

“...komik ini dikeluarkan bertepatan dengan 10 tahun kasus Munir. Meskipun, kasus tetap tidak jelas, tapi komik ini hadir untuk melawan lupa. Kami tidak lupa bahwa keadilan yang diperjuangkan Munir belum tuntas, demikian pula kasus Munir itu sendiri.”¹³⁶

Karya-karya yang didedikasikan untuk Munir umumnya merupakan bentuk sebuah perlawanan publik atas kesewenangan negara. Karya-karya ini merupakan reaksi atas aksi ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus Munir. Karena bukan tidak mungkin karya-karya ini nantinya menjadi stimulan untuk gerakan yang lebih besar lagi dalam mendukung advokasi Munir.

¹³⁶ Haris Azhar dalam Komik Munir: *Seni Berkeadilan dan Melawan Lupa*.

Gambar 4.5
Karya-karya persembahan untuk Munir



Sumber: google

4.4 Kampanye dalam Strategi Advokasi

Advokasi adalah upaya untuk menegakkan suatu keseimbangan kekuasaan yang tepat antara warga negara dengan lembaga-lembaga pemerintah: *”Advocacy is about influencing or changing relationships of power.”*¹³⁷ Aktivitas Advokasi adalah proses di mana individu-individu dan organisasi berusaha mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. *“At its best, advocacy expresses the power of an individual, constituency, or organization to shape public agendas and change public policies.”*¹³⁸ Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa advokasi adalah upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menegakan suatu keseimbangan antara warga negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

Advokasi berkaitan dengan politik dan perubahan, dengan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, kesadaran dan pengetahuan. Pada saat tertentu, advokasi dapat didefinisikan lebih sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain, advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat.¹³⁹

Strategi-strategi advokasi dapat beraneka ragam cara. Mulai dari pendekatan-pendekatan yang menekankan kerjasama dengan pihak penguasa hingga pendekatan

¹³⁷ Linda Mayoux, *“Advocacy For Poverty Eradication And Erment: Ways Forward For Advocacy Impact Assessment”*. Sumber: <http://www.enterprise-impact.org.uk/pdf/Advocacy.pdf>. Download pada 14 Januari 2016.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

¹³⁹ Valerie Miller dan John Covey, *Pedoman Advokasi: perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, edisi terjemahan oleh Hermoyo, (Jakarta: Obor dan Yaysan TIFA, 2005). hlm. 8.

yang memusatkan perhatian pada pendidikan dan himbauan, dan akhirnya sampai pada pendekatan yang secara terbuka menentang dan berlawanan dengan pemegang kekuasaan.¹⁴⁰ Strategi advokasi yang sering digunakan dapat diklasifikasikan menjadi kategori berikut: kerjasama, persuasi, litigasi (tuntutan hukum), serta kontestasi (perlawanan).¹⁴¹

a) Strategi Kerjasama

Dalam strategi kerjasama, kelompok boleh jadi bekerjasama dengan negara untuk menyebarkan inovasi setempat yang berhasil atau untuk memperbaiki layanan negara, strategi pendidikan membina kewaspadaan politik dan kesadaran kritis, memperkuat LSM dan kelompok warganegara, dan juga memberi informasi, analisis dan kebijakan alternatif. KontraS dalam hal ini dimungkinkan untuk melakukan suatu hubungan yang bersifat koperatif dengan negara sebagai langkah mempengaruhi apa yang akan menjadi keluaran dari kebijakan pemerintah.

Pembentukan TPF Munir membuka jalan bagi KontraS untuk bekerjasama dengan elemen pemerintahan. TPF dipimpin oleh Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi dan anggotanya dipenuhi oleh banyak aktivis LSM. TPF Munir dibentuk dengan maksud untuk membantu kepolisian dalam proses penyelidikan. Akan tetapi, kesempatan untuk menjalin hubungan yang kooperatif tersebut tidak serta merta mempermudah penuntasan atau bahkan pengungkapan kasus. Hal ini terjadi karena TPF mengalami

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 72.

kendala ketika harus berhadapan dengan formalitas birokrasi dan sistem koordinasi yang kurang baik dengan pihak yang berwenang yakni POLRI.

b) Strategi Persuasi

Strategi persuasi menggunakan informasi, analisis dan juga mobilisasi warga negara untuk mendesakkan perubahan. Kampanye merupakan contoh konkrit dari strategi persuasi dalam menjalankan advokasi. Melalui kampanye, KontraS mengajak publik untuk peduli dan menjadi bagian dari perjuangan dalam penuntasan kasus Munir. Dua jenis kampanye yakni kampanye konvensional dan kampanye populer yang dilakukan KontraS dalam kasus Munir, mampu memberikan efek baik itu secara vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, KontraS melalui metode kampanye konvensional mampu memberikan desakkan atau tekanan kepada pemerintah. Kampanye konvensional melalui siaran pers, aksi turun ke jalan, dan lobi-lobi menghasilkan Keppres No. 111 tahun 2004 tentang pembentukan TPF Munir dan terbit berita “Poisoned Justice” di New York Times edisi 15 Oktober 2006 sebagai desakkan kepada pemerintah Indonesia. Sedangkan secara horizontal, KontraS melalui metode kampanye populer berkontribusi pada ranah publik yaitu sebagai sebuah gerakan penyadaran atas kasus pelanggaran HAM. Kampanye populer diantaranya: diskusi publik, media sosial dan messenger, dan karya seni.

c) Strategi Litigasi

Strategi litigasi (tuntutan hukum) mempromosikan suatu perubahan kebijakan dengan menggunakan sistem peradilan. Strategi ini merupakan metode konvensional yang dilakukan melalui jalur formal. Litigasi dilakukan oleh KontraS bersama tim hukum untuk proses persidangan kasus Munir. Meskipun temuan TPF menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai sebuah kejahatan konspirasi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih menunjukkan bahwa pembunuhan berencana terhadap Munir sebagai pembunuhan yang bersifat tunggal (*individual crimes*). Intervensi politik yang cukup kuat mengakibatkan strategi litigasi tidak berjalan sesuai harapan.

d) Strategi Kontestasi

Strategi kontestasi menggunakan protes untuk menarik perhatian ke dampak-dampak negatif kebijakan dan memberi tekanan demi perubahan. Strategi kontestasi memiliki irisan dengan strategi persuasi. Jika strategi persuasi lebih cenderung pada kampanye, strategi kontestasi condong ke arah propaganda. Strategi ini juga dipakai KontraS dalam advokasi kasus Munir, yakni dengan melakukan propaganda tentang dampak buruk jangka panjang jika negara terus melakukan pengabaian terhadap hak asasi manusia.

4.5 Tinjauan Kampanye dalam Unsur-unsur Pokok Advokasi

Berkaca pada apa yang KontraS lakukan dalam rangka advokasi kasus Munir, terdapat unsur-unsur yang merupakan bagian dari advokasi yang efektif. Karena hanya merupakan bagian maka tidak perlu menggunakan setiap bagian tersebut untuk menciptakan strategi advokasi.¹⁴² Unsur-unsur pokok advokasi itu sebagai berikut:

a) Memilih tujuan advokasi

Tujuan advokasi dipersempit sampai pada tujuan yang didasarkan jawaban terhadap pertanyaan: dapatkah masalah ini mengajak berbagai kelompok bersama-sama membentuk koalisi yang kuat? Apakah tujuannya mungkin tercapai? Apakah tujuannya benar-benar menangani masalah itu?

Kampanye KontraS dalam kasus Munir berhasil membangun sebuah ruang konsolidasi yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat. Akan tetapi wadah yang telah tercipta ini belum bisa optimal dikarenakan pergerakannya hanya didasarkan pada momentum. Meskipun solid dan konsisten secara dukungan, namun yang sangat penting adalah bagaimana impactfull dari koalisi yang tercipta ini untuk kasus Munir.

b) Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi

Data dan penelitian merupakan hal sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan ditangani, mengidentifikasi solusi bagi masalah tersebut, kemudian menentukan tujuan yang realistis. Dalam kasus ini, dapat

¹⁴² Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi: Panduan dan Latihan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). hlm. 26.

dipastikan langkah yang dilakukan sebelum membuat sebuah strategi kampanye, KontraS melakukan pengolahan data dan penelitian. Hasil dari pengolahan data dan penelitian tersebut kemudian dijadikan acuan untuk mencari solusi alternatif yang selanjutnya diformulasi ke dalam langkah-langkah strategis.

c) Mengidentifikasi sasaran advokasi

Jika masalah dan tujuannya telah dipilih, usaha advokasi itu lalu diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan idealnya, kepada orang yang mengambil putusan itu. Usaha ini dapat dilihat melalui kampanye konvensional yang dilakukan KontraS yakni dengan siaran pers, aksi turun ke jalan, dan lobi-lobi. Sasaran advokasi kampanye tersebut bersifat vertikal, dengan kata lain menyasar langsung kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Tetapi secara umum kampanye KontraS dalam kasus Munir juga menyasar masyarakat luas sebagai capaian horizontal.

d) Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi

Berbagai macam sasaran advokasi memberikan tanggapan terhadap pesan yang berbeda pula. Pesan apa yang perlu sampai kepada sasaran advokasi pilihan dan juga kepada publik. Kampanye KontraS dalam kasus Munir bertujuan menyampaikan pesan kepada pemerintah agar tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, sedangkan pesan kepada publik adalah penggalangan dukungan dengan membangun empati dan simpati hingga akhirnya menciptakan suatu opini publik.

e) Membentuk koalisi

Seringkali kekuatan advokasi terdapat pada beberapa orang yang mendukung tujuan umum. Dalam suatu organisasi pembentukan koalisi melibatkan orang dari berbagai bagian di dalam menyusun program, membantu membentuk kesepakatan untuk bertindak. Strategi kampanye merupakan gerakan yang melibatkan berbagai elemen, baik itu jaringan antar LSM, jaringan mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi kampanye tidak lain adalah gerakan koalisi.

f) Membuat presentasi yang persuasif

Kesempatan untuk mempengaruhi sasaran advokasi yang merupakan tokoh kunci seringkali terbatas. Persiapan yang cermat dan mendalam untuk membuat argumen yang meyakinkan dan gaya penyajian mungkin dapat mengubah kesempatan yang sempit itu menjadi advokasi yang efektif. Secara praktik, metode ini dilakukan KontraS melalui media dua model kampanye, yakni lobi-lobi yang merupakan bagian dari kampanye konvensional, dan kampanye populer.

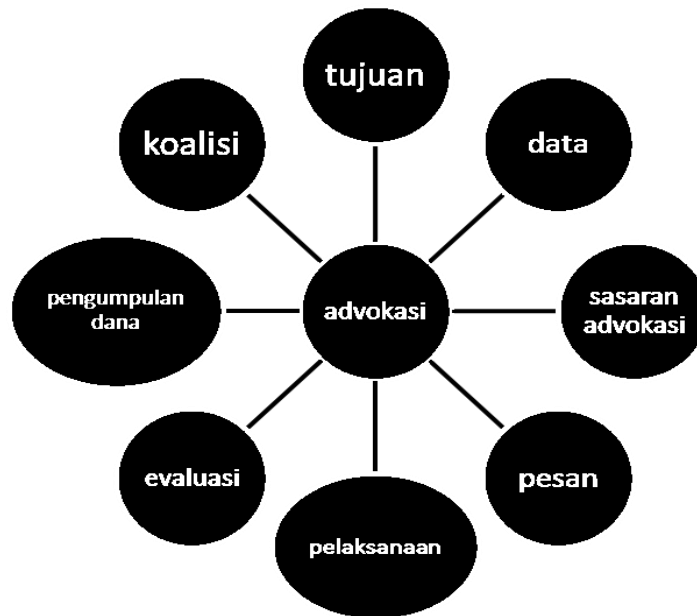
g) Mengumpulkan dana advokasi

Sebagian besar kegiatan, termasuk advokasi, pasti memerlukan sumber dana. Usaha untuk melakukan advokasi secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang berarti menyediakan waktu dan energi dalam mengumpulkan dana atau sumber daya yang lain untuk mendukung tugas. Kampanye KontraS dalam kasus Munir dilakukan sebatas pada implementasi dan tidak sampai pada pengumpulan dana.

h) Mengevaluasi usaha advokasi

Strategi kampanye adalah cara yang dilakukan setelah mengevaluasi capaian advokasi hukum. Akan tetapi, penyelenggaraannya strategi kampanye juga perlu dilakukan evaluasi. Efektifitas dan efisiensi aktifitas strategi kampanye belum mampu menyatukan potensi gerakan yang muncul secara simultan. Selain itu, sasaran yang dirancang pun belum sesuai capaian yang ada. Hal ini dapat kita lihat dari *impactfull* yang ada sejauh ini, di mana secara vertikal belum ada kemajuan lain yang dicapai dan secara horizontal gerakan hanya mencakup sekup terbatas dan sulit berkembang.

Gambar 4.6
Unsur-unsur Pokok Advokasi



Sumber: Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi: Panduan dan Latihan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

4.4 Penutup

Sejak adanya bukti Munir meninggal karena diracun, pihak keluarga Munir dan rekan-rekan aktivis kemanusiaan sepakat mendesak kepada pemerintahan SBY untuk membentuk sebuah tim investigasi independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil untuk mengungkap secara tuntas kasus terbunuhnya Munir. Hal ini dinyatakan pertama kali melalui siaran pers bersama di kantor KontraS, 12 November 2004.¹⁴³ Langkah ini diambil sebagai respon cepat pasca informasi yang diterima dari Belanda tentang kematian Munir yang menyebutkan Munir diracun. Sementara itu, gagasan untuk aksi turun ke jalan juga diinisiasi para aktivis kemanusiaan dan juga masyarakat sipil, sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan mereka terhadap kasus Munir.

Berpijak pada situasi tersebut kemudian KontraS menginisiasi sebuah strategi kampanye yakni diantaranya dengan siaran pers dan aksi turun ke jalan; kampanye populer; dan lobi-lobi. Secara horizontal strategi kampanye mampu menarik simpati publik yakni dengan semakin banyak masyarakat yang tahu dan peduli akan kasus Munir. Selain itu, banyak karya-karya yang didedikasikan untuk almarhum Munir. Akan tetapi, secara vertikal penuntasan kasus ini masih jauh dari harapan. Karena keputusan ada di tangan pemerintah yakni Presiden yang berwenang menindaklanjuti laporan yang mencakup data dan fakta kasus Munir ini.

¹⁴³ Siaran Pers Bersama di KontraS, 12 November 2004, atas nama Suciwati (Istri Munir), Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik (Imparsial), dan Usman Hamid. Salah satu isi Siaran Pers tersebut adalah perlu dibentuknya tim investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan masyarakat sipil dan Komnas HAM, dalam KontraS, Membongkar Konspirasi Kasus Munir, 2005, Jakarta, hlm. 2.

Tabel 4.3
Perbandingan capaian Strategi Kampanye kasus Munir

Dampak	Vertikal	Horizontal
Tujuan	Menekan pemerintah untuk menuntaskan proses hukum	Mempopulerkan isu pelanggaran hak asasi manusia dan sosok Munir sebagai pembela HAM
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi pers, berita di televisi, radio, dan media cetak; • Aksi turun ke jalan: aksi kamisan; • Lobi-lobi: tekanan pada pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi publik; • Kampanye di media sosial; • Blasting dan broadcast messege; • Kampanye kreatif: fun campaign.
Capaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Munir • Terbit berita “Poisoned Justice” di New York Times edisi 15 Oktober 2006. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosok Munir populer di masyarakat, terutama di kalangan anak muda; • Muncul gerakan-gerakan sosial untuk Munir • Karya-karya persembahan untuk almarhum Munir (tulisan, art, lagu, buku komik, dan lain-lain.)

Sumber: hasil analisis peneliti.

Merujuk pada strategi advokasi, langkah-langkah yang dilakukan KontraS melalui strategi kampanye mencakup keseluruhan indikator yang ada. Mulai dari strategi kerjasama, strategi persuasi, strategi litigasi, hingga strategi kontestasi. Pada strategi kerjasama, KontraS melalui Usman Hamid pernah tergabung dalam TPF Munir yang dibentuk SBY. TPF Munir adalah tim yang dibentuk untuk membantu POLRI melakukan penyelidikan dan terdiri dari gabungan elemen pemerintahan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sementara pada strategi persuasi, KontraS

melakukan berbagai aksi kampanye dengan sasaran publik. Pada strategi litigasi KontraS yang tergabung bersama LSM lainnya menysasar pada ranah advokasi hukum untuk merubah kebijakkan. Sedangkan pada strategi kontestasi, KontraS mengajak publik untuk turut serta dalam gerakkan mendukung penuntasan kasus Munir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi penegakkan HAM yang tidak sesuai ekspektasi—khususnya dalam kasus Munir— disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kesalahpahaman negara dalam memahami HAM. Pada tatanan hukum, negara cukup baik dalam membuat kebijakan terkait hak asasi manusia, akan tetapi pada ranah implementasi sering terjadi pelanggaran atau lemahnya perlindungan terhadap HAM. Hal ini diasumsikan adanya kesalahpahaman negara dalam memahami dan menjalankan kebijakan HAM itu sendiri. Salah satu faktornya adalah karena masih kuatnya pengaruh kelompok lama dalam sistem perpolitikan Indonesia, sehingga kerap terjadi kekakuan untuk mengadili orang-orang yang terindikasi pelanggaran HAM yang berat. Kasus Munir menjadi contoh konkrit bagaimana penegakkan HAM atas nama keadilan merupakan sesuatu yang mahal di negeri ini.

Strategi kampanye dilakukan oleh KontraS sebagai upaya mendukung proses hukum yang mandek. Adapun dalam perjalanannya, strategi kampanye yang tadinya ditujukan untuk mendorong advokasi ternyata memiliki efek secara horizontal. Meski pada awalnya strategi kampanye—kasus Munir—bertujuan memberi tekanan kepada pemerintah agar mempunyai kemauan politik menuntaskan kasus ini, nyatanya

strategi kampanye juga memiliki andil dalam sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk empati dan secara voluntaristik menyumbang ide dan gagasan.

Strategi kampanye secara vertikal mampu mendesak kepada pemerintah dan menghasilkan Keppres Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus Munir. Selain itu, strategi kampanye juga mampu menarik perhatian komunitas Internasional dengan terbitnya berita "*Poisoned Justice*" pada editorial *New York Times* edisi 15 Oktober 2006. Sedangkan, secara horizontal strategi kampanye mampu menarik empati dan simpati publik yakni dengan semakin banyak masyarakat yang tahu dan peduli akan kasus Munir. Selain itu, banyak karya-karya yang didedikasikan untuk almarhum Munir seperti tulisan, art, lagu, buku komik, dan lainnya.

Akan tetapi, strategi kampanye nyatanya belum mampu menggerakkan kasus ini ke tahapan yang lebih krusial yakni pada tataran hukum. Bagaimana pun, tujuan awal dan yang utama strategi kampanye ini adalah untuk mendorong agar advokasi yang mandek dapat dituntaskan. Jika menilik pada Strategi advokasi, kampanye belum mampu mengakumulasi dukungan menjadi sebuah gerakan sosial yang masif, karena pergerakan yang ada masih berjalan sendiri-sendiri tanpa komando dan visi yang jelas.

Kendati begitu, keikutsertaan masyarakat yang dibangun atas dasar kesadaran dan kepedulian bersama menunjukkan bahwa publik akan menjadi pengawas yang mengawal kasus ini. Kesadaran dan kepedulian publik ditunjukkan melalui berbagai cara seperti aksi, diskusi, hingga karya-karya yang didedikasikan untuk Munir.

Potensi ini harus dilihat lebih jauh sehingga menjadi sebuah gerakan sosial yang mampu menekan pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat kita ketahui bahwa strategi kampanye merupakan cara yang efektif untuk menggalang dukungan publik. Akan tetapi, perlu dipikirkan langkah-langkah strategis untuk mengelola dukungan tersebut agar tak sebatas gerakan yang berjalan sendiri-sendiri. Strategi kampanye ini akan menjadi modal kekuatan yang penting dalam penuntasan kasus Munir, yakni dengan mengakumulasikan dukungan melalui berbagai metode kampanye sehingga menjadi sebuah gerakan sosial. Karena sejatinya demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dengan kampanye sebuah gerakan dapat tergugah dan terbentuk menjadi akumulasi kekuatan masyarakat (*power of people*). Melihat potensi ini KontraS harus melakukan pengelolaan dan menyusun strategi-strategi lanjutan terhadap dukungan-dukungan tersebut, sehingga potensi ini akan menjadi modal penting yang mampu menekan pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonur, Heribertus Nurmanto. *Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Filsafat UI Press, Depok, 2007.
- Bronkhorst, Daan, *Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan: Komisi Kebenaran di Berbagai Negara*. ELSAM, Jakarta, 2002.
- Cole, Robert. *The International Encyclopedia of Propaganda*, Routledge Press, 1998.
- Fathurrahmi, Farah, dkk. *Lintas Batas HAM: Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri*, Jakarta KontraS, 2014.
- Freeman, Michael. *Human Rights*, Polity Press, Cambridge, 2002.
- Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata, *Demi Kebenaran: Pemetaan Upaya-Upaya Pencarian Keadilan dalam Masa Transisi di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Howard, Rhoda E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Human Rights Support Facilities (HRSF), *Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*, HRSF, Jakarta, 2010.
- Idrus, Muhamad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Jogjakarta, 2009.
- Imparsial, Tim, *Perlindungan Terhadap Human Rights Defenders (Hambatan dan Ancaman dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Imparsial, Jakarta 2006.
- Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), *Risalah Kasus Munir Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum*, KASUM, Jakarta, 2007.
- KontraS, *Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2006*, KontraS, Jakarta, 2007.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Gramedia dan SPES Foundation, Jakarta, 1993.

- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Bandung, 2001.
- Miller, Valerie dan John Covey, *Pedoman Advokasi: perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Obor dan Yaysan TIFA, Jakarta, 2005.
- Pratikno, Cornelis Lay, dkk. *Komnas HAM 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Robert, Robertus. *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY*, ELSAM, Jakarta, 2014.
- Ruslan Rosady, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006.
- Sharma, Ritu, R. *Pengantar Advokasi: Panduan dan Latihan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Silvermen, *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text, and Interaction*, Sage Publications, London, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatana Media, Bandung, 2004.

Jurnal

- Almeida, Paul and Erica Walker. “*The Pace of Neoliberal Globalization: A Comparison of Three Popular Movement Campaigns in Central America*”, Social Justice Vol. 33, 2006. (JSTOR).
- Blazevic, Neil. “*Defending Human Rights: A Resource Book for Human Rights Defenders (2nd Edition)*”, Human Rights House, 2012. (JSTOR).
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 1, 2005.

Halili, “*Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil dalam Gerakan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Kajian Kewarganegaraan, CIVICS Vol. 6, No. 1, 2009.

Putnam, Robert D. “*Bowling Alone: America’s Declining Social Capital*”, Larry Diamond dan Marc F. Platner (eds), The Global Resurgency of Democracy, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1996. (JSTOR).

Rahmat, Abdi. “*Peran Civil Society dalam Pembangunan Indonesia*” Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2013.

Rosser, Andrew. “*Memahami Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, Indonesia: The Rise of Capitol, in Richard Robinson, Jurnal Prisma Vol. 32, No. 1. 2013, hal. 37.

Seidmen, Gay. “*Labor, Citizenship, and Human Rights Campaign*”, Perspective on Work, Vol. 13, No. 1, University of Illinois Press, 2009. (JSTOR).

Sujatmiko, Iwan Gardono., “*Wacana Civil Society di Indonesia*,” MASYARAKAT: *Jurnal Sosiologi* Edisi 9, 2001.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis, : ELSAM, Jakarta, 2005.

Makalah

Easton, Mathew. *Strategi-strategi untuk Bertahan: Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia di Kolombia, Indonesia, dan Zimbabwe*, Frontline, 2010.

Howard, Rhoda E. “*HAM Penjelajahan Dalih Relatifisme Budaya*”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

Kaldor, Mary. “*Transnasional Civil Society*”, Human Rights in Global Politic, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Khilnani, Sunil. “*The Development of Civil Society*”, Civil Society: Histories and Possibilities, 2005.

KontraS, *Keadilan Versus Kepastian Hukum*, KontraS, Jakarta, 2006.

KontraS, *Membongkar Konspirasi Kasus Munir*, KontraS, Jakarta, 2005.

Partogi, Edwin, dkk. “*Bunuh Munir*”, KontraS, Jakarta, 2005.

Perdana, Aditya. *Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia*, Seminar Internasional ke-10 “Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009”, Salatiga, Juli 2009.

Safa’at, Muchamad Ali. “*Penegakan HAM di Era Reformasi*”, HAM di Era Reformasi, nitropdf, Malang, 2011.

Team, WRI. *A-Z Kampanye Non-Kekerasan: dari Filosofi Hingga Aksi*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2009.

Regulasi

Berkas Acara Pemeriksaan/BAP No. Pol: BP/10/VI/2005/Dit.I dengan tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005.

Putusan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Basoeki SH (Ketua), Sri Handoyo SH, Mohammad Saleh SH MH, Rusdy As’as, SH MH, Untung Harjadi SH. Putusan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, 27 Maret 2006, dalam dalam KontraS, Membongkar Konspirasi Kasus Munir, 2005, Jakarta.

Putusan Majelis Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Pidana PN Jakarta Pusat No. 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dan PT DKI Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI Dengan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.

Putusan Praperadilan No.09/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel. No.10/Pid/Prap/2006/PN.Jak-Sel. No.11/Pid/Prap/2006/PN.Jak-Sel.

Internet

www.kbbionline.com

www.kontras.org

www.google.com

<http://www.enterprise-impact.org.uk/pdf/Advocacy.pdf>

Skripsi

Amalia, Nur Fithry. *Kampanye Public Relations dalam Membentuk Sikap Khalayak*, Hubungan Masyarakat FISIP UI, Depok, 2012.

Sitohang, Antonius Steven. “*Human Rights Defender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kasus Peristiwa Munir)*”, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, 2013.

Sumber Lainnya

Koran KontraS, *Edisi Melawan Lupa*, KontraS, Jakarta, 2014.

Leaflet KontraS, *Edisi Tahun 2013*, KontraS, Jakarta, 2013.

Majalah Tempo, *Fakta Terbaru Pembunuhan Munir*, edisi Desember 2014.

Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Topik Pertanyaan	Informan
1	Langkah apa saja yang dilakukan KontraS dalam penuntasan kasus Munir?	Strategi advokasi	Koordinator KontraS, Divisi Pemantauan dan Impunitas, Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi.
2	Bagaimanakah proses advokasi pada ranah hukum kasus Munir?	Strategi advokasi	Koordinator KontraS, Divisi Pemantauan dan Impunitas.
3	Mengapa proses hukum kasus Munir mandek dan cenderung jalan di tempat?	Hambatan	Koordinator KontraS, Divisi Pemantauan dan Impunitas.
4	Apa upaya yang KontraS lakukan untuk membantu advokasi agar hukum berjalan sesuai koridornya?	Strategi advokasi	Koordinator KontraS, Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi.
5	Bagaimana strategi kampanye KontraS dalam menunjang proses hukum kasus ini?	Strategi kampanye	Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi, Biro Kampanye dan Jaringan.
6	Bagaimana efektifitas kampanye populer sebagai salah satu strategi kampanye KontraS?	Strategi kampanye	Biro Kampanye dan Jaringan.
7	Bagaimana implikasi strategi kampanye KontraS terhadap kasus Munir?	Capaian	Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi, Biro Kampanye dan Jaringan.
8	Mengapa strategi kampanye belum mampu secara optimal membantu advokasi kasus?	Hambatan	Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi.
9	Bagaimana kebijakan Hak Asasi Manusia di Indonesia era reformasi?	Gambaran umum kebijakan HAM	Koordinator KontraS.
10	Mengapa pelanggaran HAM berat seperti kasus Munir terjadi di era Reformasi?	Hambatan	Koordinator KontraS, Divisi Pemantauan dan Impunitas.
11	Apa saja tantangan dalam advokasi kasus pelanggaran HAM dengan situasi penegakkan hukum di Indonesia?	Tantangan	Koordinator KontraS.
12	Apa yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya?	Tantangan	Koordinator KontraS.

LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

"Untuk Keadilan" Jakarta, 26 Juli 2007

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Agung RI

Melalui

Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat

Di –

J a k a r t a

Perihal : Permohonan Prninjaan Kemabli Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.

.....
Mengingat putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, Nomor : 1185/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006, atas nama terpidana ;

Nama lengkap : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;

Tempat lahir : Solo;

Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 26 Januari 1961;

Jenis Kelamin: Laki-laki;

Kebangsaan: Kebangsaan;

Alamat: Jalan Pamulang Permai I Blok B Nomor 1 RT 01 / 22 Pamulang Barat, Tangerang;

Agama: Katholik

Pekerjaan: Pilot

Dengan amar putuan Mahkamah Agung RI tersebut berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 16/Pid/2006PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/PN.jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurang seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat Garuda Indonesia Nomor : Garda/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal surat penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT Garuda Indonesia);
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A.330 yang ditandatangani oleh ROHAINIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Chief Pilot A.330 yang ditandatangani oleh ROHAINIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
 4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M.Ramelgia anwar (Vice Corporate Security).
 5. 1 (satu) lembar Surat asli interoffice Correspondence dengan kop Garuda Indonesia, ditujukan kepada OFA No.Ref: IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M.Ramelgia ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781;
 6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh Pollycarpus Budihari Priyanto BHP yang ditujukan kepada bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;

7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh Pollycarpus BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;
8. 1 (satu) bendel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP.CORPORAT SECURITY PT.GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 ttg Laporan Penugasan PDZ-2270/04;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No.522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN ACHMAD;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
12. 1 (satu) Bundel asli kninklihe Merchaussee Distric Schipol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Doo Munir Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia;
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood" yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004;
14. Surat "Voorlopige Bevindegen" yang dikeluarkan oleh dr.R.VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van justitie-Nederlands Forensich Instituut, d Rijkwijk 8 September 2004.
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004;
16. Surat dari dr.R.VISSER dari NFI kepada Mr.E.VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004.
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem proo Justitia No.04-419/R102 dibuat oleh dr.R.Visser dari Ministerie van justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004;
18. Surat "Deskundigenrapport, vorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr.K.J.LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw.Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133. Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 November 2004;
20. Copy surat Tanda Penyerahan Berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 november 2004;
21. 1(satu) buah hand phone merek NOKIA casing hitam berikut nomor kartu (Sim Card) Nomor : 081596690617;
22. 1 (satu) ekslembar foto copy dilegalisir Geberal Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004;

23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004;
24. Satu buah buku Memo Pad milik terdakwa POLLYCARPUS;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL 1 berikut tasnya;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE type RAE-3N;
27. Simcard Nomor Telkomsel No.6210100013006566;
28. Pakaian yang dikenakan korban Munir, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam;

Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) :

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan peninjauan kembali, maka kami terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat mengajukan peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI", pada hakekatnya merupakan salah satu ketentuan hukum publik yang sifatnya imperative, yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan penegakan hukum.

Bekaitan dengan ketentuan pasal 263 ayat (1) tersebut, timbul pertanyaan : Apakah hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI hanya semata-mata merupakan hak terdakwa atau ahli warisnya ? apakah Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali ?

Dalam ketentuan KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya larangan bagi jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung RI, telah melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* terhadap ketentuan-ketentuan imperative yang ada dalam KUHAP.

Penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* ataupun *overrule* terhadap ketentuan KUHAP tersebut, ditinjau dari doktrin, pada hakekatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih fair, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah "*According to the principle of justice*".

2. bahwa tujuan dari hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, in casu khususnya Pasal 263 KUHAP, dengan memberikan kesempatan kepada jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu perlu menggeser perspektif ketenagaan hukum acara pidana, dari offender oriented menjadi victim oriented dan dari keadilan retributive menjadi keadilan restorative atau keadilan sosiologis.

3. tujuan dari hukum acara tersebut sejalan pula dengan doktrin yang berkembang, yaitu antara lain bahwa korban tindak pidana berhak untuk menggunakan upaya hukum / *rechtmiddelen* (pandangan Arif Gosita dan JE Sahetapy), yang menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan dalam lingkup prosedural, yang telah dimiliki pula oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun individual, akan tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga karena itu bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan berdasarkan yurisprudensi di atas, maka upaya hukum yang dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali.
4. Doktrin tersebut sejalan pula dengan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak Asas antara kepentingan perseorangan / terdakwa (Termohon Peninjauan Kembali) dengan Kepentingan Umum, Bangsa dan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa penuntut Umum, di mana Jaksa Penuntut Umum juga harus diberi kesempatan yang sama, untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan putusan bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Alasan ini sesuai dengan konsep *daad-dader-strafrecht* yang oleh Prof. Muladi disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
5. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 / 2004 berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-Undang". Pasal 23 ini mengatur tentang peninjauan Kembali baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara perdata jelas yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah Penggugat dan Tergugat, Dalam perkara pidana pihak-pihak adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana terdakwa dijatuhi putusan

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka jaksa Penuntut Umumlah sebagai pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, karena terpidana yang juga sebagai pihak yang berkepentingan tentu tidak mungkin mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan demikian, karena pasal 263 ayat (1) melarangnya dan dalam logika tidak mungkin seorang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum mengajukan Peninjauan kembali. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidana".

Ketentuan pasal 263 ayat (3) ini tentu/pasti bukan diperuntukkan bagi terdakwa yang telah tidak dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan. Di sini jelas yang dimaksud untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk perkara yang dakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti pidana adalah Jaksa Penuntut Umum bukan terpidana karena di sini tidak ada terpidana.

Apabila ketentuan pasal 263 ayat (2) hanya dibaca secara *satute aproach harafiah*, maka seorang yang dijatuhi putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, walaupun kemudian ditemukan *novum* dalam bentuk bukti-bukti baru yang dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa tidak lagi dapat diapa-apakan. Hal ini tentu akan bertentangan dengan rasa keadilan, di mana seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, apalagi suatu tindak pidana besar seperti yang didakwakan kepada terdakwa Polycarpus, tidak dapat dihukum karena suatu alasan yang bersifat formal.

Untuk dapat memenuhi rasa keadilan, maka pasal tersebut hendaknya dibaca dengan menggunakan konstruksi hukum dalam bentuk *argumentum acontrario*, yaitu membaca ketentuan tersebut dari sisi lain, yaitu dari sisi kebalikannya. Dengan demikian akan dapat dibaca dan dipahami, bahwa terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, di mana kemudian ditemukan *novum*, maka dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Di samping itu, pasal 263 KUHAP, sama sekali tidak melarang Jaksa penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan kembali.

6. Bertitik tolak pada motivasi dan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, demi mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal. Mahkamah Agung telah menerapkan *ekstensive interpretation* terhadap ketentuan Pasal 263 KUHAP, dengan menerima beberapa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: dalam perkara atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan (putusan MA Nomor : 55PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996), dalam perkara atas nama terdakwa Ram Gulumal alias V. Ram (Putusan MA Nomor: 3PK/Pid/2001 tanggal 2 Agustus 2001) dan dalam perkara terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih (Putusan MA Nomor: 15PK/Pid/2006 tanggal 9 Juni 2006).

7. Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas *stare decisis* atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan (Consistency in court decision), Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan Kembali berikutnya telah cenderung mengikuti putusan perkara Peninjauan Kembali yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung terdahulu, karena putusan-putusan *a quo* merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, sekaligus merupakan sumber hukum dan pembentukan hukum.
8. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kami uraikan di atas. Maka Jaksa Penuntut Umum dapat dan berhak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.

Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, adalah sebagai berikut :

- A. Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim (Judex Jurist) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1185K/Pid/2006 adalah sebagai berikut :

Mengadili

Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2006/PT DKI tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005 :

Mengadili Sendiri

- 1) Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
- 2) Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.
- 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 5) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 6) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat dengan kop Garuda Indonesia No. Gauda/D2-2270/04, tanggal 11 Agustus 2004, perihal surat penugasan yang ditujukan kepada Polycarpus Budihari Priyanto/522659 Unit Fight Operation (JK TOFGA) yang ditandatangani oleh Indra Setiawan (Direktur PT Garuda Indonesia).
- Sampai dengan 27 Sim Card nomor Telkomsel No. 62101000113006556.

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 15 menyatakan "bahwa Pengadilan tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor: 16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/pid.B/2005/PN Jkt.Pst dan dengan mengadili sendiri :
 - menyatakan terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu.
 - Membebaskan ia oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut.
 - Menyatakan terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang Putusan Pengadilan tinggi Jakarta, telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena Amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan terdakwa.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - Dan seterusnya.
2. Bahwa Mahkamah Agung selaku Judex jurist telah salah menerapkan hukum pembuktian, seharusnya dengan pertimbangannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan Judex Factie harus dibatalkan, bukan dakwaan tidak terbukti (asal kata kasasi adalah caseren yaitu membatalkan, lihat kamus hukum Belanda Indonesia MARIANE TERMOSITUZEN). Atas dasar pembatalan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) undang-Undang nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan Tingkat Pertama. Jelas di sini majelis hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan pada butir 8 tersebut di atas bahwa (halaman 39 putusan) Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut. Pertimbangan tersebut

butir 5 sampai dengan 7 adalah pertimbangan tentang Judex factie telah alah menerapkan hukum pembuktian bukanlah pertimbangan tentang unsur-unsur delik yang didakwakan.

Kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (onvaldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP).

3. Bahwa Judex Jurist telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan Judex Factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan kasasi halaman 36 angka 4 dan halaman 37 angka 5.

Dalam pertimbangan Judex Jurist tersebut, terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian, antara lain sebagai berikut :

Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, diman akarena pembunuhan terhadap korban Munir, SH., tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO. Bila mana mempergunakan surat palsu tersebut terbukti seharusnya pembunuhan yang didakwakan terhadap POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO harus juga terbukti.

Hal ini diperkuat dengan apa yang termuat dalam putusan kasasi halaman 35 yang berbunyi ; "Bahwa adalah tidak masuk akal seorang pilot senior seperti terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu hanya untuk dapat menikmati pergi ke Singapura dan tidur di hotel mengingat hal tersebut adalah pekerjaan terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIANTO membuat surat palsu dan selanjutnya mempergunakan surat palsu tersebut agar bisa berangkat ke Singapura?

Inilah seharusnya yang digali dalam pemeriksaan kasasi, sejauhmana koreksi penggunaan surat palsu tersebut dengan kematian korban Munir, SH.

- a) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari priyanto memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH ?
- b) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto menelpon ke Hand Phone korban Munir, SH. Pada tanggal 4 September 2004 yag diterima Suciwati (istri korban Munir, SH) menanyakan kapan Munir, SH berangkat ke Belanda ? dan dijawab Hari Senin tanggal 6 September 2004.

c) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat palsu yang dipergunakan oleh terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah sarana untuk dapat melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Munir, SH dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Dengan mempergunakan surat palsu tersebut terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat berada dalam satu pesawat dengan korban Munir, SH. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak dapat menjelaskan apa motivasinya mempergunakan surat palsu tersebut.
- Dengan mempergunakan surat palsu tersebut terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat berkomunikasi langsung dengan korban Munir, DH. Di dalam pesawat.
- Apa maksud terpidana memberikan tempat duduk kepada korban Munir, sehingga berpindah tempat duduk ke nomor 3K Bisnis sambil memberitahukan kepada Purser Brahmanie astawati, bahwa Munir adalah teman dekatnya dan akan duduk dikursi terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, sedangkan terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sendiri tidak duduk di tempat duduk munir tetapi mondar-mandir di sekitar pantry dn bertemu serta menyapa Oedi Irianto, Pramugara yang aat itu menyiapkan well come drink dan juga dengan Pramugara Yetti Susmiarti.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa surat palsu tersebut bukan hanya alat bukti surat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP (dakwaan kedua) tetapi juga alat bukti surat dalam pembunuhan berencana terhadap korban Munir, SH (dakwaan kesatu). Karena dengan mempergunakan surat palsu tersebut merupakan sarana atau modus operandi oleh terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Munir, SH. Bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan surat palsu tersebut yang ada hubungannya dengan kematian Munir, SH. Dikaitkan dengan keterangan saksi dan leterangan terdakwa adalah merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (ketting bewijs).

Dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 37 Nomor 5 yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata pendapat Judex factie tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidaklah tepat atau keliru.

Bahwa pendapat Hakim Agung Artijo Alkottsar dalam putusan mahlamah Agung halaman 42 Nomor 9 yang berbunyi: “Tidak ternyata judec factie tidk menerapkan Paasl 183 KUHAP karena judex factie dalam putusan telah mempertimbangkan lebih dari dua alat bukti yang sah dan valid. Bukti peunjuk yang sah timbul di persidangan.

Hakim kasasi dalam putusannya halaman 37 point 6, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa judec factie menyimpulkan saat masuknya (in take) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada penyajian makanan (putusan Pengadilan Negeri hal 99), kesimpulan judec factie ini salah, sebab:”

- a. Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arssen ke tubuh manusia dan terlihatnya gejala awal adalah:
 - 1) Ket. Addy Quresman ST: 30 menit sampai 4 jam;
 - 2) Ket. Dr. Boedi Sampoerno: 10 menit sampai 110 menit;
 - 3) Ket. Dr. Ridla Bakri: 30 menit sampai 90 menit;Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara : 10 menit sampai 4 jam;
- b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihat gejala awal pada diri korban (Munir) adalah dalam penerbangan pesawat Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat promag sekitar 10-15 menit sebelum take off dan sebelum penyajian makanan 30-40 menit setelah take off, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak (ket. saksi Tia Dewi Ambari, pramugari, dalam putusan PN hal 4C):
- c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :
 - 1) Penerbangan pesawat Jakarta-Singapura : 98 menit;
 - 2) Transit di Bandara Changi : 60 menit;Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10-15 menit;
- d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihat gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat asuknya (in take) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir), yaitu:
 - 1) Sebelum penerbangan Jakarta-Singapura;
 - 2) Dalam penerbangan Jakarta-Singapura;
 - 3) Sesudah penerbangan Jakarta-Singapura (di Bandara Changi);
- e. Kapan dan di mana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta dalam persidangan perkara ini, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya.

Hakim kasasi menimbang dan berpendapat judec factie salah menerapkan hukum pembuktian. Hal ini menurut pemohon PK adalah suatu pendapat yang berakibat putusan memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan pertimbangan hukum, karena Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 35 dan 36 point 1 s/d 5 tersebut, melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang diterangkan oleh judec factie dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan kasasi sebagaimana jurisprudensi MA Nomor : 14PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain :

“Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan memeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya.”

Hakim Kasasi bukan *judex factie*, dalam kasasi Mahkamah Agung bukan pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III).

Dari point 6 sub 1,2 dan 3 putusan Mahkamah Agung, jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dari *judex juris* yang melakukan penilaian pembuktian sehingga *judex juris* berkesimpulan menyebut istilah terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*intake time*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta-Singapura (di Bandara Changi);

Pendapat Majelis Hakim Kasasi tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena judex juris telah melakukan penilaian terhadap pembuktian yang merupakan kewenangan judex factie.

Bahwa Hakim Kasasi (judex Jurist) mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan menyatakan tidak terpebuhi sehingga dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu. Menurut pemohon PK, pertimbangan Hakim Kasasi (Judex Jurist) adalah keliru, hal ini nyata dari kesimpulannya pada point 8 hal 37 putusan kasasi, kekeliruan mana dapat pemohon ajukan antara lain :

“Bilamana ingin mengetahui secara jelas dan lengkap bahwa ddakwaan kesatu melalui unsur-unsurnya terbukti atau tidak terbukti, seharusnya ada suatu penilaian secara obyektif dari masing-masing unsur dari dakwaan yang terdapat dalam Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Hal ini sudah pemohon tuangkan di dalam tuntutan JPU melalui pembahasan juridis mulai dari 63 s/d hal 73, namun hal inipun sama sekali tidak diperimbangkan oleh judex juris dalam putusannya, sehingga dalam menentukan alasan dan pendapatnya judex juris dalam putusannya menjadi keliru.

Sebab seandainya judex juris memperhatikan dan juga memperimbangkan dengan teliti, cermat dan obyektif terhadap semua berkas termasuk berkas dalam pembahasan juridis yang dibuat JPU yang telah memuat semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka judex juris sudah seharusnya menyatakan dakwaan kesatu terbukti.

Diketemukannya keadaan baru (Novum).

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, salah satu alasan diajukan peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadikan putusan menjadi berbeda.

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini, telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli sebagai berikut ;

1. Saksi Joseph Ririmase menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi selaku Station Manager Garuda Schipol Amsterdam menggantikan Taufik A Rahman atas perintah Direktur Strategi dan umum tanggal 3 september 2004, melakukan perjalanan Jakarta-Amsterdam tanggal 6 September 2004 dengan pesawat Garuda GA 974 dan duduk di kursi Nomor:2K, bersebelahan dengan Asrini Utami Putri, yang duduk di kursi Nomor 2J.
- Ketika pesawat transit, di ruang tunggu Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Ongen Latuihamallo, teman saksi di Ambon ketika kecil dan Asrini Utami Putri, selanjutnya saksi mengenalkan Asrini Putri kepada Ongen Latuihamallo.

2. Saksi Asrini Utami Putri menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang Garuda GA 974 yang berangkat dari Jakarta menuju Belanda tanggal 6 September 2004, yang duduk di kursi 2J bersebelahan dengan tempat

duduk Joseph Ririmase. Di dalam pesawat tersebut saksi berkenalan dengan Joseph Ririmase.

- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi ikut turun menuju ke ruang tunggu transit di Bandara Changi dan bertemu dengan Joseph Ririmase, selanjutnya Joseph memperkenalkan Ongen Latuihamallo alias Ongen kepada Saksi.
- Ketika di ruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42) saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen.

3. Saksi Raymond JJ Latuihamallo alias Yongen alias Ongen menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang pesawat Garuda GA 974 berangkat tanggal 6 September 2004, dari Jakarta menuju Amsterdam dengan maksud untuk mengunjungi keluarga dan mempromosikan album musik saksi, karena saksi adalah seorang musisi.
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Joseph Ririmase di dalam waiting room Gate D42 dan oleh Joseph, saksi diperkenalkan dengan seorang wanita (Asrini Utami Putri).
- Saat saksi masuk ke Coffe Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Coffe bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus.

4. Saksi Raden Mohammad Patma Anwwar alias Ucok alias Empe alias Aa.

- Saksi adalah agen BIN sejak tahun 2000, dengan pangkat Agen Muda Golongan IIC, berkantor di Jalan Seno Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gedung K Direktorat 22 Lantai 2, satu rangan dengan Sentot Waluyo dan Murdjono.
- Saksi kenal dengan Munir sejak tanggal 27 Juli 1999, karena saksi sering mengikuti diskusi di Kantor Kontras, membahas masalah Dwifungsi ABRI dan Rezim Orde Baru.
- Pada tanggal 8 atau 9 Juli 2004, saksi didatangi oleh Sentot yang mengatakan kalau saksi dan Sentot dapat tugas dari Bapak E (Deputi II BIN / Drs Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden.
- Saksi juga diperintah untuk membuat proposal pengajuan biaya untuk operasi membunuh Munir, rencana yang akan dijalankan, cara kerja dan biaya yang dibutuhkan, namun saksi tidak mau membuat proposal tersebut.
- Saksi juga pernah mencoba menyantet Munir, melalui Ki Dharma di Ratuja Depok, namun tidak jadi dilakukan, karena saksi tidak yakin dengan Ki Dharma.
- Saksi bersama-sama Sentot dan Wahyu Sarontoo (Deputy IV BIN) jug pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas.
- Pada kesempatan lain, Sentot berhasil menemui Ki Gendeng Pamungkas namun santet tersebut tidak berhasil karena Munir punya keris.

- Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, saksi ditelepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir.
- Cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati.
- Tersangka adalah Direktur Utama Garuda Indonesia yang menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai Staf Perbantuan di Unit Corporate Security.
- Surat tersebut dikeluarkan Tersangka, atas permintaan tertulis dari sdr. As'ad, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, sekitar bulan Juni / Juli 2004, namun surat tersebut hilang bersama-sama dengan tas saksi ketika mobil saksi diparkir di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004.

5. Saksi Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi., Apt. menerangkan sebagai berikut:

- Korban terdeddah oleh racun arsen campuran (III) sebanyak 83% dan As (V) sebanyak 17%. Arsen dalam usus korban belum sempurna terserap.
- Konsentrasi As (III) yang relatif tinggi di dalam tubuh korban dapat menyebabkan inhibisi reaksi detoksifikasi.
- Terjadi penekanan ekskresi Arsen melalui ginjal akibat pengaruh keracunan akut Arsen.
- Analisa ratio konsentrasi As (III) dan As (V) di darah korban dan berdasarkan atas simulasi farmakokinetik konsentrasi Arsen di darah, dapat diperkirakan waktu "intake" Arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum meninggal.

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut diatas, di dalam pertimbangan Judex Factie telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 11 Agustus 2004 memperoleh surat penugasan sebagai Aviation Security dari Dirut Garuda Indra setiawan yang sesuai kebiasaan tidak pernah terjadi seorang pilot ditugaskan menjadi Aviation Security.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Rohainil Aini selaku Flight Operation Support Officer type Air Bus PT Garuda Indonesia, atas permintaan Pollycarpus telah merubah schedule pollycarpus, yang seharusnya pada tanggal 5 s/d 8 September 2004 dengan GA 7890 Pollycarpus terbang ke Peking dirubah menjadi tanggal 5 dan 6 September 2004 di hapus, tanggal 7 September 2004 ada rapat, dan tanggal 8 September 2004 stand by.
3. Bahwa pada tanggal 4 september 2004, terdakwa pollycarpus Budihari priyanto telah menelepon ke HP Munir yang diterima oleh Suciwati (istri Munir) menanyakan kapan Munir berangkat ke Belanda yang dijawab oelh Suciwati bahwa Munir akan berangkat tangal 6 September 2004, padahal tidak ada hubungan apapun antara Pollycarpus dengan Munir.
4. Pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto dengan didasarkan surat Dirut Garuda (Indra Setiawan) Nomor GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004, menghubungi Rohainil Aini, meminta perubahan jadwal terbangnya, sehingga tanggal 6 September 2004 Pollycarpus sebagai Aviation Security terbang ke Singapura dengan

- pesawat GA 974 dan tanggal 7 September 2004 kembali dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat yang pagi, dengan alasan ada dinas dari Kantor Pusat, tanpa sepengetahuan Ramelgia Anwar dan Karmal Fauza Sembiring.
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat dengan pesawat terbang Garuda Indonesia GA 974 jam 22.23 WIB dengan tujuan Singapura bertemu Munir, SH.
 6. Bahwa setelah di atas pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di kelas bisnis nomer 3K dan Munir, SH duduk dikelas ekonomi 40G namun tempat duduk tersebut oleh Pollycarpus diberikan kepada Munir, SH tanpa minta persetujuan Brahmani Hastawatiselaku pusher kemudian pollycarpus duduk di Premium Class.
 7. Bahwa Pollycarpus tidak pernah melakukan tugas Aviation Security terbukti laporannya tertanggal 8 September 2004 tidak memenuhi syarat laporan Aviation Security (isinya bukan hasil dari tugas-tugas sebagai Aviation Security).
 8. Bahwa Pollycarpus setelah sampai di Singapura chek in sendiri di Hotel Novotel.
 9. Bahwa Munir,SH jam 00.30 melanjutkan perjalanan ke Belanda dengan pesawat yang sama dan sekitar 10 – 15 menit di dalam pesawat Munir, SH merasa mual dengan minta obat maag kepada Tia Ambari (pramugari) sampai akhirnya muntah-muntah dan meninggal dunia 2 – 3 jam sebelum pesawat landing di Bandara Schipol, Belanda.
 10. Bahwa setelah Munir, SH meninggal dunia, selanjutnya Pollycarpus menelpon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetti Susmiarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk beretmu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi aagar jawabannya bersesuaian.
 11. Bahwa Pollycarpus minta kepada Ramelgia Anwar untuk dibuatkan surat guna melegalkan perjalanannnya ke Singapura.

Analisa Terhadap Keadaan Baru (NOVUM) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

Berdasarkan keterangan ahli Dr.rer. Nat. I Made Agung gelgel Wirasuta Msi., Apt, kematian korban diperkirakan antara delapan sampai sembilan jam setelah minum racun. Menurut keteangan saksi dr. Tarmizi, Bondan dkk, korban Munir diperkirakan meninggal tiga jam sebelum mendarat.

Berdasarkan fakta persidangan, Munir meninggal akibat keracunan Arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi Applied Speciation And Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seattle USA, Arsen yang terdapat di tubuh korban Munir adalah jenis As III 83 % dan As V 17 %.

Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. rer. Nat. I Made Agus Geigel Wirasuta, Msi, Apt., kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan.

Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekitar tiga jam sebelum pesawat sampai / mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak tempuh / waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara schipol Belanda sekitar 12 jam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut

di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseph Ririmase dan Asrini utami putri, mereka berkenalan di pesawat dalam penerbangan Jakarta-Singapura dan ketika pesawat transit di Bnadara Changi, Josep Ririmase memperkenalkan Asrini utami dengan Raymond J Latuihamallo alias Ongen di ruang tunggu Bandara Changi. Di ruang tunggu bandara Changi room Gate D42, Asrini Utami Putri melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah smoking Room atau Money Changer bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen.

Saksi Raymond J Latuihamallo alias Ongen, menerangkan bahwa saksi diperkenalkan oleh Joseph Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting room gate D42 bandara Changi Singapura. Ketika saksi masuk Coffe Bean, saksi melihat Pollycarpus, berjalan dari counter pemesanan minuman dan duduk berjarak sekitar dua meter dari tempat duduk Munir dan pollycarpus dan melihat Munir berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Bahwa Raden Mohamad Patma Anwar sebagai Agen BIN bersama-sama dengan Agen BIN Sentot pernah mendapat tugas dari Deputy II BIN (Drs Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum pemilihan Presiden, baik melalui santet maupun racun.
2. Raden Mohamad Patma Anwar bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas.
3. Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, Raden Mohamad patma Anwar ditelepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir. Dan cairan tersebut telah di coba leh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati, namun pembunuhan terhadap Munir tidak jadi dilakukan oleh Raden Mohamad patma Anwar dan Sentot.
4. Raden Mohamad patma Anwar pernah melihat Pollycarpus sebelum kematian Munir, di parkiran BIN, dengan menggunakan sedan volvo warna hitam, ketika sedang dibonceng oleh sentot dan sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja.
5. Sekitar bulan juni/Juli 2004, Ir. Indra Setiawan, MBA selaku Direktur Utama Garuda Indonesia berdasarkan permintaan tertulis ddari As'ad selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara telah menerbitkan dan menandatangani surat Nomor; Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus sebagai staf Perbantuan (Aviation Security) di Unit Corporate Security.
6. Bahwa Pollycarpus tanggal 4 September 2004, menelepon ke HP Munir yang diterima Suciwati memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam.
7. Tanggal 6 september 2004, Rohainil Aini atas permintaan Pollycarpus via telepon telah merubah jadwal terbang Pollycarpus, sehingga pada tanggal 6 September 2004 tersebut, Pollycarpus bisa berangkat sebagai Aviation Security dengan pesawat GA 974 ke singapura bersama-sama dengan Munir.

8. Dalam pesawat, pollycarpus telah menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengan Pollycarpus, tetapi Pollycarpus tidak menempati tempat duduk korban.
9. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Pollycarpus tidak langsung ke Hotel seperti crew pesawat lainnya melainkan ikut ke tempat transit di Bandara Changi, bahkan terlihat Pollycarpus membawa 2 gelas minuman masing-masing untuk Munir dan Pollycarpus, selanjutnya Pollycarpus duduk bersama-sama dengan Munir di Coffe Bean.
10. Ketika pesawat take off menuju Amsterdam, sekitar 10 s/d 15 menit, Munir terlihat sakit dan meminta promag, dan sekitar 2/3 jam sebelum mendarat di Bandara Schipol, Munir meninggal dunia.
11. Berdasarkan hasil lab dari tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu intake arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia.
12. Bahwa antara delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang beada di Coffe Bean Bandara Changi Singapura.
13. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minumann kepada Munir adalah pollycarpus.
14. Sesudah Munir diketahui meninggal, Raden Mohamad patma Anwar sekitar tanggal 13 atau 14 september 2004, menanyakannya kepada Sentot melalui HP, yang dijawab oleh sentot: itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak di atas.
15. Bahwa Setelah Munir, SH. meninggal dunia. Pollycarpus menelepon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetti Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian.
16. Bahwa sesuai keterangan Raden Mohamad patma Anwar, sistem operasi Badan Intelijen Negara, menggunakan sistem Sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan / pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan.
17. Bahwa walaupun perbuatan memberi racun terjadi di Badara Changi Singapura maka perlu dijawab tentang masalah locus delictie yang tentunya dihubungkan dengan jurisdictie hukum pidana Indonesia.
18. Bahwa walaupun perbuatan memberi racun terjadi di Bandara Changi singapura (perbuatan materiilnya/matriele gedraging), namun akibat konstitutifnya terjadi di atas pesawat Garuda yang berbendera Indonesia.
19. Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya Ons Strafrecht Algemeen deel het matriele strafrecht hal 84 : Pada umumnya diterima bahwa tempat dan waktu dari delict adalah tempat dan waktu perbuatan ,ateriil yang dilakukan (over het algemeen worden de tijd en de plaats, van de matriele gedraging als tijd en plaats van het delict beschowed), namun dalam Azewijnse Paard Arrest HR 8 Juni 1936 NJ 36 No 954 diputus bahwa tempat /locus di mana

alat bekerja berlaku juga sebagai tempat dari feit (lihat juga Hazewinkel Suringa inleideng tot de studie van de Nederlands Strafrecht hal 308-309).

20. Bahwa selain itu Mahkamah Internasional dalam kasus Lotus Boskourt juga membenarkan kapal lotus di adili oleh Pengadilan Turki dengan menggunakan hukum Pidana turki, karena tabrakan kapal Lotus dengan kapal Turki Boskourt mengakibatkan beberap awak kapal Turki meninggal, Mahkamah Internasional (Permanent International Court of Justice) berpendapat karena akibat dari tabrakan adalah diatas kapal, Turki, maka itu berarti perbuatan terjadi di wilayah Turki.
21. Bahwa dengan demikian, walaupun perbuatan materiil diri terdakwa terkadi di Bandara Changi, namunn karena akibat / bekerjanya alat diatas pesawat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan dalam kasus ini.

Bahwa dengan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim MA nomor: 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan keadaan baru yang lazim disebut novum yang telah kami uraikan di atas, serta mengingat ketentuan Pasal 263, 264, 265 dan 266 KUHP, maka kami Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini, meminta agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :

1. Menerima permintaan peninjauan kembali ini.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
4. Menyatakan terdalwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara seumur hidup dan membebankan biaya perkara kepada terpidana sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

JAKSA PENUNTUT UMUM,

EDI SAPUTRA, SH.

Jaksa Pratama Nip.230025395

The New York Times

Munir Said Thalib was one of Indonesia's most respected human rights lawyers. Over 15 fearless years of work, he exposed military and police atrocities in East Timor and Aceh, defended labor activists and urged all Indonesians to demand accountability from their government. So it was a tragedy, but tragically less than a surprise, when Munir died suddenly on a plane flight to Amsterdam in 2004 - a victim of arsenic poisoning.

Munir's memory and Indonesian justice suffered another tragic assault this month when the country's Supreme Court overturned the conviction of his alleged murderer: a pilot with ties to Indonesia's intelligence services.

The investigation into Munir's death was an important test for Indonesia's still young democracy. It has failed several times over.

There was optimism when President Susilo Bambang Yudhoyono appointed an independent fact-finding team. According to local news reports, their findings implicated not only Pollycarpus Budihari Priyanto - the airline pilot traveling as a passenger on the fateful flight - but also senior intelligence officials. An examination of Pollycarpus's phone records showed that in the days before and after the flight he made more than two dozen calls to a high-ranking member of the state intelligence agency.

The full facts are still not known because Yudhoyono has refused to release his commission's report and prosecutors did not argue the existence of a broader conspiracy. The conviction of Pollycarpus, and only Pollycarpus, was less than satisfying. The Supreme Court's decision to overturn even that sole conviction, claiming insufficient evidence, only adds to the crime.

Yudhoyono has said that the investigation into Munir's death was a "test case for whether Indonesia has changed." If he is sincere about defending human rights and building an honest legal system, Yudhoyono should immediately release the suppressed report. He should also order a new independent investigation, with a clear presidential mandate to follow the evidence wherever it leads.

The truth about who killed Munir is the only antidote for Indonesia's poisoned justice system.



Penulis bernama lengkap Fauzan Ramadhan, lahir di Bogor pada tanggal 8 Maret 1993. Ia anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis saat ini tinggal di RT 01 RW 05 Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Ciampea Udik 03 dan lulus pada tahun 2005, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Cibungbulang dan lulus pada tahun 2008, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ciampea dan lulus pada tahun 2011, lalu melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas Negeri Jakarta sebagai mahasiswa Program S1 Sosiologi Universitas Negeri Jakarta.

Selama menimba ilmu sebagai Mahasiswa Sosiologi UNJ penulis mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi mahasiswa. Ia pernah bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Sosiologi selama dua periode. Ia juga aktif mengurus organisasi Diskusi Kamis Sore (DKS) Sosiologi di tahun kedua kuliahnya. Penulis ketika Kuliah Kerja Lapangan (KKL) melakukan penelitian mengenai penyebab pernikahan usia dini di pedesaan. Kemudian ia memperoleh banyak pengalaman berharga saat Praktek Kerja Lapangan di KontraS dan bergabung di Biro Kampanye dan Jaringan.

Pengalaman bergabung di LSM KontraS memberinya jalan untuk bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama satu bulan. Selain itu, ia juga aktif

menulis fiksi di blog pribadi: forzafauzan.wordpress.com dan opini di kompasiana. Ia kemudian mencoba pengalaman baru bekerja sebagai content writer di perusahaan digital advertising Think Digital. Saat ini penulis aktif di Humanity First Indonesia, sebuah LSM yang fokus di bidang Kemanusiaan. Di LSM tersebut penulis sebagai anggota Divisi Volunteer di tahun pertamanya, dan kini berkesempatan mengemban pengalaman baru di Divisi Program.

Contact Person:

Email: forzafauzan@gmail.com

Twitter: @forzafauzan